

# ANALISA

1980 — 9

## ASIA TENGGARA DALAM SOROTAN



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



## ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/*

*Penanggung jawab :* Kirdi DIPOYUDO

*Dewan Redaksi :* Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR, J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, Pande Radja SILALAH, M. Hadi SOESASTRO, B. SUNARIO, Harry TJAN SILALAH, Jusuf WANANDI dan Rin Purwani BUDI

*Redaksi Pelaksana :* Kirdi DIPOYUDO, B. SUNARIO, Rin Purwani BUDI

STT: S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tanggal 28-28-1978  
ISSN 0126 — 222X

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI	768
DIMENSI-DIMENSI KEAMANAN ASIA TENGGARA	
<i>Jusuf WANANDI</i>	771
LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA	
<i>Asnani USMAN</i>	789
DIPLOMASI DAN KEPENTINGAN NASIONAL: INDIA DAN KRISIS INDOCINA.	
<i>Sutomo ROESNADI</i>	802
PERSETUJUAN PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NIUGINI	
<i>R.S. ROOSMAN</i>	812
HUBUNGAN PERDAGANGAN JEPANG-ASEAN: BEBERAPA MASALAH DAN PROSPEK	
<i>J. PANGLAYKIM</i>	824
PELARIAN DARI IRIAN MASALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA	
<i>R.S. ROOSMAN</i>	881

# PENGANTAR REDAKSI

*Sejarah telah memperlihatkan bahwa Asia Tenggara mempunyai daya serap yang besar dalam penerimaan gelombang-gelombang manusia, gagasan-gagasan dan barang-barang dari berbagai penjuru dunia. Letak kawasan yang amat strategis, yaitu di "jalan silang dunia", mempermudah lalu lintas dan berbondong-bondong orang datang untuk berdagang, menetap atau bahkan menyerang guna mengambil alih kekuasaan atas suatu daerah. Berkat keterbukaannya itu dan kekayaan alamnya, Asia Tenggara selalu menjadi sasaran konflik kepentingan negara-negara besar dari luar kawasan. Kecuali Muangthai, negara-negara di kawasan ini sebelumnya adalah jajahan negara-negara Barat. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, Pilipina oleh Spanyol serta Amerika Serikat, dan Indocina oleh Perancis.*

*Kini negara-negara itu telah merdeka dan sedang sibuk melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk memperbaiki nasib rakyat. Untuk itu diperlukan stabilitas, keamanan dan perdamaian regional, akan tetapi sejauh ini masih terdapat banyak ancaman. Pada garis besarnya dapat dikatakan, bahwa negara-negara Asia Tenggara menghadapi tiga kelompok masalah keamanan, yaitu masalah keamanan dalam negeri, masalah keamanan intraregional dan masalah keamanan ekstern yang menimbulkan konflik ekstraregional. Pada hakekatnya masalah keamanan ini menyangkut banyak soal, yaitu politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan ideologi, bukan hanya soal militer dalam arti konvensional.*

*Bagi ASEAN dewasa ini Vietnam merupakan ancaman langsung, karena akibat keterlibatan militernya di Kamboja berpengaruh langsung terhadap situasi dalam negeri Muangthai. Ancaman terhadap Muangthai itu dapat berwujud tekanan-tekanan di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja akibat serangan-serangan pengejaran dan penghancuran tentara Pol Pot atau dukungan Vietnam bagi kelompok-kelompok pemberontak di Muangthai. Ancaman Vietnam ini secara tidak langsung didukung oleh Uni Soviet dengan bantuan-bantuan politik, ekonomi serta militer dan peningkatan kehadiran militernya di Asia Tenggara melalui fasilitas-fasilitas yang diperolehnya di Danang*



dan Cam Ranh. Ancaman ini menjadi lebih besar karena cenderung untuk menjadi bagian konflik Cina-Soviet.

Dengan merosotnya ketahanan negara-negara Asia Tenggara, baik secara individu maupun secara kolektif, maka hubungan antara dimensi intern dan ekstern masalah-masalah keamanan mereka menjadi lebih kuat. Hal itu merupakan hipotesa dasar yang digunakan oleh Jusuf WANANDI dalam ulasan "Dimensi-dimensi Keamanan Asia Tenggara", yang merupakan karangan pertama nomor ANALISA ini. Makin besar ancaman keamanan yang bersumber dari dalam negeri, makin besar ancaman dari luar yang harus dihadapi oleh negara-negara tersebut. Ancaman dari luar terhadap Asia Tenggara tidak dapat diabaikan, tetapi tampaknya tidak begitu penting, dalam arti bahwa infiltrasi dan subversi dari luar hanya efektif jika terdapat kekuatan lokal yang dibantunya, seperti partai komunis atau kelompok pemberontak lain. Ancaman dari luar itu dapat menjadi lebih langsung jika stabilitas dan ketahanan nasional negara-negara ASEAN memburuk akibat kegagalan pemerintah masing-masing menghadapi tantangan-tantangan intern.

Perkembangan situasi di Indocina mendapat perhatian dunia internasional pada umumnya dan ASEAN pada khususnya, terutama sejak penyerbuan pasukan Vietnam ke Kamboja dan membanjirnya pengungsi di perbatasan Kamboja-Muangthai. Langkah-langkah penyelesaian masalah Kamboja akibat penyerbuan itu ditandai dengan kesibukan-kesibukan kunjungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam krisis itu dibahas oleh Asnani USMAN dalam karangan "Langkah-langkah Penyelesaian Masalah Kamboja", yang merupakan karangan yang kedua.

Pengakuan India terhadap Pemerintah Heng Samrin dari Kamboja yang didukung oleh Vietnam telah menimbulkan rasa kecewa di kalangan ASEAN. India, yang secara geografis dekat dengan Asia Tenggara, seharusnya bertetangga baik dengan negara-negara di kawasan ini. Sikap India bagi ASEAN seakan-akan suatu "fait accompli", sedangkan ASEAN, jika hanya melontarkan kecaman-kecaman kekecewaan, belum tentu dapat menyelesaikan persoalan ini. Sebagai salah satu negara besar, India pernah mempunyai nama harum di dunia Asia-Afrika dan oleh sebab itu rasanya mustahil dia dapat demikian

*saja diperalat oleh Uni Soviet. Namun kalau sudah sampai pada kepentingan nasionalnya, India seperti negara lain manapun akan menyisihkan kepentingan-kepentingan lainnya dan tidak memperdulikan sikap negara-negara lain yang bersahabat maupun yang tidak bersahabat. Sikap India itu dibahas oleh Sutomo ROESNADI dalam karangan yang ketiga dengan judul "Diplomasi dan Kepentingan Nasional: India dan Krisis Indocina".*

*Biarpun dalam politik luar negerinya terhadap negara-negara tetangganya Indonesia memberikan prioritas kepada Asia Tenggara daripada Papua Niugini, Indonesia menempatkan 25.000 tentara di Irian Jaya dalam rangka pengamanan propinsi yang berbatasan dengan negara tetangganya itu. Permasalahan perbatasan ini merupakan suatu masalah internasional yang rawan, khususnya sehubungan dengan masalah pelarian dari Irian Jaya ke Papua Niugini. R.S. ROOSMAN membahas persoalan itu dalam "Persetujuan Perbatasan Indonesia — Papua Niugini", yang merupakan karangan yang keempat.*

*Kerja sama erat antara negara-negara ASEAN dan Jepang tak dapat dihindarkan. Kerja sama semacam itu seharusnya diusahakan agar menguntungkan kedua belah pihak. Namun patut dicatat bahwa ketergantungan yang berlebihan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan politik dan sosial. Dalam kenyataan bagian Jepang dalam perdagangan dengan negara-negara ASEAN terus meningkat, sedangkan bagian negara-negara ini menurun, kecuali untuk bahan-bahan mentah tertentu. Itulah tema karangan J. PANGLAYKIM "Hubungan Perdagangan Jepang—ASEAN: Beberapa Masalah dan Prospek".*

*Sebagai penutup disajikan karangan R.S. ROOSMAN "Pelarian dari Irian Jaya Masalah Tanggung Jawab Bersama" yang mengulas masalah pelarian dari Irian Jaya yang timbul karena garis perbatasan itu pada hakekatnya adalah garis tak nyata. Perbatasan yang berupa daerah rimba raya dengan hanya tugu-tugu beton pada jarak-jarak yang jauh memudahkan pelarian dari Irian Jaya ke Papua Niugini.*

# DIMENSI-DIMENSI KEAMANAN ASIA TENGGARA\*

Jusuf WANANDI

## I. PENGANTAR

Untuk memahami masalah-masalah keamanan Asia Tenggara orang harus melihat dimensi-dimensi intern dan ekstern serta hubungan antara dimensi-dimensi tersebut. Hypothesa dasar saya adalah bahwa dengan merosotnya ketahanan negara-negara Asia Tenggara, baik secara individu maupun secara kolektif, maka hubungan antara dimensi itu menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, semakin besar ancaman keamanan yang bersumber dalam negara maka semakin besar ancaman dari luar yang harus dihadapi oleh negara tersebut. Karena demikianlah hakekat masalahnya, keamanan di Asia Tenggara mencakup banyak soal, yakni politik, ekonomi, sosial, dan bahkan kebudayaan dan ideologi, dan bukan semata-mata soal militer sebagaimana lazim diambil dalam arti konvensional.

Bagi Asia Tenggara, masalah-masalah keamanan yang paling segera akan dihadapi selama 3 sampai 5 tahun mendatang, berasal dari dalam negeri masing-masing. Hakekat dan tingkat ancaman keamanan dalam negeri bergantung dari keberhasilan pemerintah masing-masing untuk memenuhi tuntutan dan harapan rakyat yang meningkat, termasuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang seimbang, yang mencakup semua aspek kehidupan dan memperhatikan stabilitas nasional maupun keadilan sosial. Dari perumusan ini segera menjadi jelas bahwa tugas dan tantangan masing-masing pemerintah bukan hal yang mudah. Semuanya itu menjadi lebih sulit jika kekuatan

\* Terjemahan sebuah kertas kerja Jusuf WANANDI pada Conference on New Foundations for Asian and Pacific Security, Pattaya, Muangthai, Desember 1979, oleh Oct. Ovy NDOUK



luar, dengan sengaja atau tidak, menciptakan suatu lingkungan yang mengharuskan pemerintah masing-masing mengalihkan perhatian dan sumber-sumber daya mereka.

Ancaman dari luar terhadap keamanan Asia Tenggara tidak dapat diabaikan, tetapi ancaman itu agaknya tidak begitu penting, dalam arti bahwa infiltrasi dan subversi hanya dapat efektif jika terdapat kekuatan lokal yang dibantunya, seperti partai komunis setempat atau kelompok pemberontak lainnya. Ancaman dari luar dapat menjadi lebih langsung jika stabilitas dan ketahanan nasional negara-negara anggota ASEAN memburuk sebagai akibat kegagalan pemerintah masing-masing menghadapi tantangan intern tersebut di atas.

Mengingat kenyataan bahwa ancaman potensial yang utama terhadap keamanan Asia Tenggara berasal dari dalam negeri sendiri, maka bagian II dari tulisan ini akan membahas dimensi-dimensi intern masalah-masalah keamanan negara-negara anggota ASEAN. Dalam bagian III kita akan meneliti dimensi-dimensi eksternnya, dan antara lain mengulas peranan dan konfigurasi kekuatan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara.

## II. DIMENSI-DIMENSI INTERN

Bukan merupakan hal yang sederhana untuk menganalisa masalah-masalah dalam negeri dari negara-negara anggota ASEAN dalam suatu kerangka tunggal. Hal itu sebagian besar ialah karena negara anggota ASEAN masing-masing mempunyai sejarah, nilai-nilai kebudayaan, karakter nasional, pola dan kondisi perkembangannya sendiri. Hal ini jelas jika orang membandingkan Indonesia yang berpenduduk lebih dari 140 juta dengan Singapura yang berpenduduk 2,5 juta. Juga, Malaysia dan Singapura sebelumnya adalah daerah jajahan Inggris, Pilipina di bawah pemerintahan Spanyol dan AS, dan Indonesia daerah jajahan Belanda.

Dalam tulisan ini, kita hanya akan memberikan suatu gambaran kasar mengenai negara-negara ASEAN, kurang lebih seperti suatu laporan wartawan. Tulisan ini tidak berpretensi menganalisa semua masalah setiap negara ASEAN, namun sekedar berusaha untuk meneliti aspek-aspek yang lebih penting yang langsung menyangkut



keamanan negara-negara itu. Penulis akan menyambut baik uraian lebih lanjut dan koreksi dari peserta-peserta negara-negara ASEAN lainnya.

Meskipun terhadap banyak perbedaan di antara negara-negara ASEAN mereka menghadapi masalah-masalah yang serupa, yakni:

- a. pembangunan nasional dengan semua akibat sampingannya, seperti perubahan dalam nilai-nilai kebudayaan bangsa dan pembagian hasil pembangunan yang tidak merata;
- b. persatuan bangsa dan negara masih merupakan perjuangan yang nyata dari negara-negara ASEAN;
- c. mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga politik sesuai dengan rencana (perbaikan) pembangunan ekonomi, dan juga terus memperbaiki tegaknya hukum dan hak-hak asasi manusia;
- d. masalah penggantian pemerintah masih merupakan suatu tantangan yang besar untuk kestabilan dan kelangsungan negara dan bangsa.

### **Pembangunan Nasional**

Masalah utama yang timbul dari setiap usaha pembangunan adalah menjamin agar pembangunan itu dapat diteruskan sehingga pemerintah masing-masing dapat memenuhi janjinya. Bersamaan dengan itu, hanya melalui hasil-hasil merekalah pemerintah-pemerintah itu dapat mempertahankan legitimasinya.

Selama 10 tahun terakhir ini negara-negara ASEAN telah dapat mencapai laju pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonominya, antara 5 sampai 10% per tahun. Akan tetapi ketidakpastian perekonomian internasional akhir-akhir ini mungkin mempengaruhi keberhasilan negara-negara ASEAN itu. Terus meningkatnya harga-harga energi menimbulkan tekanan-tekanan terhadap Muangthai dan Pilipina. Tetapi, karena sumber-sumber daya alam yang berlimpah-limpah, situasinya untuk waktu yang lama kiranya tak akan menggawat. Langkah-langkah jangka pendek kiranya akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan di atas. Pilipina, khususnya, akan memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sumber-sumber finansial. Indonesia mungkin perlu mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk menekan inflasi akibat devaluasi.

15 Nopember 1978, karena terus berlangsungnya inflasi yang tinggi secara langsung akan mempengaruhi mereka yang berpenghasilan tetap, terutama pegawai negeri yang merupakan pendukung utama pemerintah.

Namun secara keseluruhan, agaknya tidak begitu sulit untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha untuk mengatasi akibat-akibat sampingan keberhasilan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Perubahan nilai-nilai kebudayaan yang menyertai perkembangan ekonomi memerlukan identitas nasional yang baru. Secara ideal, ini akan meliputi nilai-nilai tradisional yang tetap hidup dan nilai-nilai baru yang datang dari luar negeri. Untuk mendapatkan perimbangan yang wajar antara nilai-nilai tradisional dan pandangan modern kiranya dibutuhkan waktu. Perbaikan sistem pendidikan dapat memperlancar proses ini. Pada saat ini, tidak satupun negara ASEAN yang telah berhasil menyelesaikan proses akulturasi itu. Dalam masa transisi ini, diduga bahwa ketidakamanan cukup meluas dalam masyarakat. Tetapi, dari sudut pandangan sejarah rakyat Asia Tenggara, orang dapat merasa optimis bahwa masalah ini dapat diatasi. Di Asia Tenggara telah diserap beberapa kebudayaan kuno seperti Hindu, Cina dan Islam.

Pembangunan juga menimbulkan masalah-masalah lain, yakni permintaan yang meluap, pola konsumsi yang demonstratif, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Sampai batas-batas tertentu, hal-hal itu inheren dalam strategi pembangunan yang dianut, yakni perekonomian terbuka yang menyandarkan diri pada mekanisme pasar.

Pada dasarnya, pemerintah masing-masing telah melancarkan usaha-usaha untuk memperbaiki akibat-akibat seperti itu, yakni:

- a. menekan pola konsumsi yang demonstratif, mempertinggi solidaritas nasional maupun memberantas korupsi, antara lain dengan mengawasi iklan melalui televisi dan mass-media lainnya maupun cara-cara pemasaran yang lain; dan terus berusaha memberantas korupsi, khususnya yang dilakukan oleh segolongan kecil penguasa;

- b. menggunakan sistem perpajakan progresif, dan kebijaksanaan sosial lainnya, seperti meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat, khususnya bagi golongan miskin. Jadi, sekalipun kelompok masyarakat ini belum dapat — pada saat ini — secara langsung berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, mereka dapat menikmati hasil pembangunan itu.

### **Persatuan Nasional**

Persatuan bangsa dan negara menjadi suatu masalah akibat sejarahnya. Setiap negara anggota ASEAN dengan banyak kelompok etnis dan perbedaan-perbedaan agama cenderung mempunyai implikasi-implikasi sosial-politik. Dewasa ini Pilipina menghadapi masalah minoritas Islam di Pilipina Selatan. Malaysia masih menghadapi segregasi berdasarkan perbedaan etnis, yakni antara penduduk Melayu (45%) dan Cina (35%). Singapura masih berusaha membentuk suatu bangsa Singapura. Muangthai mempunyai banyak minoritas di sepanjang perbatasannya. Indonesia juga terdiri dari banyak kelompok etnis.

Dengan demikian pembangunan bangsa merupakan suatu keharusan bagi semua pemerintah. Melalui usaha ini diharapkan agar minoritas-minoritas, etnis maupun keagamaan, dapat sepenuhnya diintegrasikan dalam masyarakat. Pengalaman yang lampau menunjukkan bahwa golongan minoritas mudah sekali dimanfaatkan oleh kekuatan dari luar untuk menciptakan keresahan dan keadaan tidak stabil dengan tujuan menggulingkan pemerintah nasional.

Fanatisme agama merupakan faktor lain yang memecah-belah. Pada mulanya, revolusi Islam Khomeini di Iran mengilhami kaum Muslim di Asia Tenggara. Tetapi, melihat hasil-hasilnya yang tidak mementu itu, pengaruhnya jadi berkurang. Kebanyakan pemimpin Muslim mengakui juga bahwa situasi di Asia Tenggara berbeda dengan situasi di Iran, selain itu bahwa pengalaman Islam di Iran berbeda dengan di Asia Tenggara, dan yang lebih penting lagi, bahwa unsur-unsur agama itu saja tidak dapat dipakai sebagai dasar bagi pemerintah alternatif manapun.

Faktor penting yang menentukan apakah suatu pemerintah dapat mempertahankan dukungan rakyat adalah seberapa jauh tuntutan mereka dapat dipenuhi maupun partisipasi mereka dalam semua aspek



pembangunan. Implikasi-implikasi sosial-politik fanatisme agama dapat menambah dan menyulitkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, tetapi sendirian hal itu bukan merupakan faktor yang menentukan untuk mengganti pemerintah. Hal ini telah ditunjukkan dengan kasus Darul Islam di Indonesia.

Beberapa pemerintah di Asia Tenggara telah memperhatikan peranan Islam dalam perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan nasionalnya, karena sebagian besar penduduknya Muslim, terutama di Malaysia dan Indonesia. Meskipun demikian, harus dibedakan antara urusan-urusan negara dan urusan-urusan agama, karena jika tidak maka hal ini dapat menjadi sumber perpecahan bagi masyarakat yang majemuk di negara-negara itu.

### **Partisipasi Nasional**

Pengembangan politik penting artinya karena hal itu membuat masyarakat merasa lebih diikutsertakan, dan dengan keterlibatan mereka dalam proses membuat kebijaksanaan, maka dukungan yang lebih besar bagi program pembangunan nasional dapat diperoleh dari bagian penduduk yang lebih besar.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap keberhasilan dalam pembangunan akan menimbulkan lebih banyak permintaan dan harapan-harapan yang lebih besar, sehingga keuntungan ekonomi itu saja tidak memuaskan. Tuntutan-tuntutan itu jauh melampaui kebutuhan akan kesejahteraan material, yakni tuntutan akan tegaknya hukum dan keadilan, partisipasi politik, dan sejumlah besar hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Tetapi patut dicatat, bahwa dalam suatu negara yang sedang berkembang adalah penting merumuskan perimbangan yang tepat antara hak-hak individu dan hak-hak komunal. Perimbangan ini akan bergantung pada hasil yang dicapai dalam pembangunan perekonomian, stabilitas politik dan tingkat kesatuan nasional. Pola dan nilai-nilai Barat tidak dapat diambil begitu saja karena hanya akan menimbulkan tuntutan-tuntutan baru yang — sehubungan dengan kelangkaan dan hambatan-hambatan yang ada — belum dapat dipuaskan, dan karenanya, hanya akan menciptakan ketidakstabilan yang dapat menghilangkan arti dari hasil-hasil yang telah dicapai.

Meskipun demikian, tak pernah terlambat untuk memulai proses mendirikan lembaga-lembaga politik. Karena lembaga-lembaga itu menyediakan suatu mekanisme untuk menyerap akibat-akibat sampingan dari pembangunan ekonomi. Partai politik bukan satu-satunya lembaga politik yang penting karena masih terdapat berbagai lembaga sosial lainnya yang mempunyai fungsi yang penting yakni: serikat buruh dan tani, organisasi pemuda dan wanita, dan sebagainya. Mass media, para mahasiswa dan intelektual harus diberi perhatian khusus karena mereka merupakan kelompok penyambung lidah (corong) dalam masyarakat.

Singkatnya, suatu perkembangan politik yang sehat dan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan ekonomi merupakan jaminan untuk menanggulangi implikasi-implikasi negatif dari pembangunan. Pemerintah bersama pemimpin-pemimpin masyarakat, dapat membuat pola rencana pembangunan jangka panjang dalam bidang ini dan melaksanakan rencana ini sebagaimana mestinya.

### **Masalah Penggantian Pemerintah**

Demokrasi itu berfungsi jika pemindahan kekuasaan dapat berjalan lancar sesuai dengan undang-undang. Adanya lembaga-lembaga sosial politik yang telah didirikan dapat menjamin kelangsungan pembangunan, yang berarti bahwa nasib bangsa tidak ditentukan oleh satu orang saja. Dengan kata lain, pembangunan politik secara berangsur-angsur dapat menghilangkan masalah penggantian pemerintah.

Dalam tahun 1980-an, semua negara ASEAN akan menghadapi masalah penggantian pimpinan, semata-mata karena alasan alamiah saja. Walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan, kepemimpinan negara-negara ASEAN sekarang ini telah dapat melakukan pembangunan negara mereka masing-masing, di bawah suatu kepemimpinan yang kuat tetapi dengan dasar dukungan yang luas dari rakyat.

Ketidaktentuan berkenaan dengan penggantian pimpinan timbul dari kenyataan bahwa lembaga-lembaga politik yang ada, yang pada akhirnya harus melaksanakan pemindahan kekuasaan itu, belum teruji. Dengan alasan ini maka di Asia Tenggara saat ini perlunya membangun lembaga-lembaga politik diakui secara luas oleh para pimpinan itu sendiri, partai politik dan organisasi-organisasi politik pada umumnya.



Barangkali hanya di Pilipina proses seperti ini harus dipercepat dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Penyelidikan di atas mengisyaratkan bahwa dalam memecahkan masalah-masalah dalam negeri yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN, peranan kekuatan domestik lebih penting daripada faktor-faktor dari luar. Faktor-faktor dari luar dapat berpengaruh lebih besar jika timbul suatu krisis nasional. Karena itu, kegagalan mengatasi situasi dalam negeri akan memperbesar dan mempersulit masalah-masalah yang dihadapi oleh negara pada umumnya.

Golongan militer merupakan suatu faktor penting tetapi sendirian golongan itu tidak cukup untuk menghadapi rumitnya pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan.

Di setiap negara ASEAN golongan militer memainkan peranan yang penting dalam bidang keamanan dan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman potensial dari pemberontakan dan golongan-golongan ekstrim dalam negeri mereka, tetapi masalah-masalah itu pada akhirnya membutuhkan penyelesaian politik.

Mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN, diharapkan bahwa sahabat-sahabat ASEAN, terutama AS, menunjukkan pengertian yang lebih besar terhadap nilai-nilai sejarah, tradisi, tahap perkembangan ekonomi dan politik setiap negara anggota ASEAN, agar tidak memperbesar kesulitan-kesulitan yang telah ada.

Kebijaksanaan politik luar negeri AS akhir-akhir ini terlalu sempit; pertimbangan-pertimbangan hak-hak asasi manusia, meskipun hal itu merupakan suatu prinsip yang mulia, tidak dapat diterapkan begitu saja dan perlu dinilai dalam hubungan secara keseluruhan antara negara-negara. AS tidak dapat memaksakan nilai-nilainya pada negara-negara lain tetapi agaknya hak-hak asasi manusia itu dapat diusahakan dengan cara konsultasi yang intensif dengan pemerintah masing-masing. Cara AS yang telah diterapkan di negara-negara Amerika Latin tidak dapat dialihkan ke Asia Tenggara. Bahkan kalau dalam pandangan negara-negara Barat terlihat adanya kecenderungan otoriter dalam tata pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara, namun sistem seperti itu memperhatikan kesejahteraan penduduk sebagai



suatu keseluruhan. Kalau tidak, maka pimpinan di negara ini tidak mungkin bertahan lebih dari satu dasawarsa. Pimpinan yang kuat sudah dianggap suatu keharusan, terutama pada tahap permulaan dari pembangunan, tetapi harus diimbangi oleh hasil-hasil dan keuntungan-keuntungan yang nyata dan juga dibagi secara lebih merata.

Pemerintah-pemerintah asing — sekarang — mungkin sudah memahami dilema sebenarnya yang dihadapi oleh pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara. Akan tetapi pendapat umum juga merupakan suatu aspek penting dalam hubungan antar negara. Suatu hubungan yang dapat terus berlangsung memerlukan partisipasi dan dukungan dari kelompok-kelompok yang lebih besar dalam masyarakat. Sangat disayangkan bahwa situasi dalam suatu negara ASEAN digunakan bagi politik dalam negeri negara lain. Kunjungan kepala-kepala pemerintahan ke negara-negara yang lain seringkali disertai dengan pernyataan politik yang hanya dimaksud untuk konsumsi dalam negeri mereka. Di satu pihak, hal itu dapat menimbulkan kesan yang salah dalam negara-negara ASEAN sendiri dengan mendorong kekuatan-kekuatan tertentu (oposisi) mengutarakan suaranya, dan di lain pihak, hal itu menjengkelkan pemerintah masing-masing yang kemudian akan mempersulit situasi dalam negeri.

Adanya pengertian tentang hal ini — setelah jangka waktu yang lama — akan membantu pemerintah negara-negara ASEAN mencapai hasil yang menguntungkan dalam usaha pembangunan mereka. Bantuan negara-negara Barat dalam hal ini dapat penting sekali. Beberapa negara ASEAN memerlukan bantuan, tetapi dalam masa yang akan datang perdagangan dan penanaman modal harus memainkan peranan yang lebih besar.

Mengenai bantuan itu, harus diakui bahwa pemerintah negara-negara Barat sebaiknya tidak terlalu menekankan proyek-proyek kebutuhan dasar manusia karena proyek-proyek itu lebih mudah dibiayai oleh sumber-sumber domestik. Selanjutnya mengenai penanaman modal, harus ditemukan rumus baru untuk menampung sasaran-sasaran nasional pemerintah setempat, terutama pembagian keuntungan secara merata, dalam orientasi keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional.

### III. DIMENSI-DIMENSI EKSTERN

Bagi ASEAN dewasa ini, Vietnam merupakan ancaman langsung, karena akibat dari keterlibatan militer Vietnam di Kamboja berpengaruh langsung terhadap situasi dalam negeri Muangthai. Vietnam kiranya tidak akan melakukan suatu serbuan terbuka ke Muangthai, tetapi ancaman terhadap Muangthai dapat terwujud dalam tekanan-tekanan di sepanjang perbatasan Muangthai akibat serangan mengejar dan menghancurkan tentara-tentara Pol Pot atau dukungan Vietnam untuk kelompok-kelompok pemberontak di Muangthai.

Kemungkinan suatu serbuan ke dalam wilayah Muangthai tidak dapat diabaikan dalam jangka waktu yang lebih lama karena tetap belum jelas apakah ambisi Vietnam tidak akan lebih besar daripada hegemoninya atas Indocina, dan meluaskan lingkungan pengaruhnya ke seluruh daratan Asia Tenggara sebagaimana dinyatakan secara resmi oleh partai Lao Dong. Banyak peninjau berpendapat bahwa dalam waktu yang dekat Vietnam tidak dapat melaksanakan rencana seperti itu karena Vietnam telah menghadapi kesulitan-kesulitan besar didalam negerinya. Pada saat ini, Vietnam sedang mengalami kemunduran yang drastis dalam pembangunan ekonominya dan kesulitan untuk menyerap dan mengintegrasikan Vietnam bagian selatan ke dalam suatu kesatuan nasional. Beban-beban keterlibatan militer Vietnam di Kamboja menjadi semakin besar dengan berlalunya waktu, dan karena itu suatu petualangan lebih lanjut ke Muangthai dianggap tidak mungkin dilakukan. Selain panjangnya garis logistik yang harus diamankan untuk menjamin berhasilnya suatu operasi, tidak ada dukungan dari dalam Muangthai sendiri, sebagian besar karena Partai Komunis Muangthai berorientasi ke RRC. Kelompok-kelompok yang pro-Vietnam di dalam Muangthai tetap tidak berarti dan prospek mereka bukan ancaman.

Vietnam dapat mempengaruhi stabilitas Muangthai, jika dalam aksi mengejar dan membinasakan pasukan-pasukannya bentrok dengan tentara Muangthai dan mengalahkan tentara Muangthai di sepanjang perbatasan atau menduduki bagian-bagian tertentu dari wilayah Muangthai, misalnya 13 propinsi yang selalu dipersoalkan antara Muangthai, Kamboja, dan Vietnam. Situasi seperti ini dapat meningkatkan tekanan-tekanan politik pada Pemerintah Bangkok dengan alasan bahwa mereka tidak dapat menguasai situasi.

Ketidakstabilan mungkin timbul dan situasi dalam negeri Muangthai akan menjadi lebih kompleks lagi.

Vietnam juga dapat mempengaruhi stabilitas Muangthai dengan cara meningkatkan mengalirnya pengungsi-pengungsi darat dari Kamboja dan Laos ke dalam Muangthai. Muangthai pada saat ini telah menanggung bebas yang berat dengan adanya sejumlah besar pengungsi darat, yang diperkirakan telah mencapai 600.000 orang.

Ancaman yang datangnya dari Vietnam secara tidak langsung didukung oleh Uni Soviet melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan pada bulan Nopember 1978, yang meliputi logistik, data-data intelijens, bantuan politik dan ekonomi, maupun peningkatan kehadiran militer Uni Soviet di Asia Tenggara dengan memperoleh fasilitas yang diperlukan di Danang dan Cam Ranh.

Ancaman Vietnam itu lebih besar karena cenderung menjadi bagian dari konflik Cina — Soviet. RRC dan Uni Soviet akan terus mencoba untuk meningkatkan lingkungan pengaruhnya di Asia Tenggara melalui "wakilnya".

Keterlibatan RRC dalam konflik Indocina mempunyai dua dampak yang berlawanan terhadap perkembangan kawasan itu. Pertama, negara itu sudah menunjukkan kesediaannya untuk menggunakan tekanan-tekanan fisik terhadap Vietnam, dan dengan cara ini mengurangi beberapa tekanan yang telah ditimbulkan oleh Vietnam terhadap ASEAN. Kedua, RRC dapat memperbesar konflik Cina — Vietnam ke tingkat yang memaksa Uni Soviet, AS dan ASEAN semakin melibatkan diri di dalamnya, maupun meluaskan daerah konflik ke kawasan Asia Tenggara pada umumnya.

Akan tetapi ancaman langsung terhadap ASEAN adalah Vietnam, karena ancaman Soviet yang membayang di belakangnya adalah lebih besar. Di lain pihak, RRC, meskipun mempunyai kepentingan yang sama seperti ASEAN dan bisa memainkan peranan dalam mempertahankan perimbangan kekuatan di Asia Tenggara, masih dianggap sebagai suatu ancaman potensial terhadap ASEAN walaupun pada dasarnya ancaman itu lebih jauh.

Kesatuan kepentingan antara ASEAN dan RRC, sikap yang lebih moderat dalam kebijaksanaan dalam negeri dan pandangan luar negeri



RRC, kecenderungan para pemimpin politik di RRC untuk lebih menekankan hubungan antar-pemerintah daripada hubungan antar-partai, maupun dipahaminya perlunya dukungan terhadap usaha-usaha negara-negara ASEAN untuk memecahkan masalah orang-orang Cina perantauan, semuanya itu mempunyai pengaruh atas sikap Indonesia berkenaan dengan hubungan diplomatiknya dengan RRC. Telah diperdebatkan bahwa ASEAN akan dapat mengambil prakarsa diplomatis untuk mempengaruhi situasi di Indocina hanya setelah Indonesia memulihkan hubungannya dengan RRC. Bersamaan dengan itu, ASEAN harus meningkatkan hubungannya dengan Hanoi. Stabilitas di Asia Tenggara dapat dijamin jika ASEAN mengadakan hubungan yang seimbang dengan RRC dan Vietnam.

Prakarsa diplomatik ASEAN terhadap Vietnam hendaknya diusahakan untuk mencapai dua sasaran, yakni:

- a. meyakinkan Vietnam bahwa kalau ingin berkembang secara ekonomis, dia tidak dapat semata-mata bergantung pada Uni Soviet dan COMECON, dan untuk memperoleh bantuan dari masyarakat internasional dia harus menggunakan cara-cara damai dan sikap kerja sama yang sungguh-sungguh terhadap ASEAN;
- b. menemukan suatu penyelesaian politik atas masalah Kamboja karena secara militer Vietnam tidak dapat memperoleh penyelesaiannya dalam satu sampai dua tahun mendatang. Terlepas dari beban ekonomi Vietnam, keterlibatan militer Vietnam yang berlarut-larut di Kamboja akan memberikan alasan yang sah kepada RRC untuk meneruskan dan meningkatkan tekanan-tekanannya terhadap Indocina dan Asia Tenggara pada umumnya. Selain itu, petualangan seperti itu akan memperburuk hubungan Vietnam dengan ASEAN, memunahkan bangsa Khmer, dan akhirnya sama sekali mengucilkan Vietnam dari masyarakat internasional. Sikap masyarakat internasional dalam PBB saat ini harus merupakan pelajaran bagi Vietnam.

Suatu penyelesaian politik di Kamboja secara ideal akan menuntut penarikan pasukan Vietnam, suatu referendum oleh rakyat Khmer di bawah pengawasan PBB, dan pembentukan suatu pemerintah yang netral.

Tampaknya hanya ada dua alternatif yang dapat disetujui oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa itu, termasuk Vietnam, yakni:

- a. jika dalam waktu dekat ini Vietnam dapat menghancurkan kekuatan Pol Pot, kemungkinan akan ada penyelesaian politik di Kamboja, dalam arti suatu Kamboja di bawah kekuasaan Vietnam dengan suatu rejim yang pro-Vietnam, yang tidak perlu dipimpin oleh Heng Samrin;
- b. akan tetapi jika dalam periode satu tahun mendatang Vietnam tidak dapat melenyapkan kekuatan Pol Pot, dia mungkin harus berkompromi dan harus menyetujui suatu pemerintahan yang netral di Kamboja, sebagaimana ditetapkan dalam resolusi PBB. Kedua alternatif dapat mencakup penarikan pasukan-pasukan Vietnam, dan dengan demikian akan mengurangi tekanan-tekanan terhadap Muangthai.

Prakarsa diplomatik ASEAN juga harus ditujukan pada RRC dan Uni Soviet, terutama untuk mengikutsertakan mereka dalam mendapatkan suatu penyelesaian politik yang secepatnya di Kamboja. Sesuatu yang sangat mendesak saat ini adalah meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Khmer yang sangat memerlukan makanan dan pengobatan sebagai akibat dari serbuan Vietnam dan keadaan yang keras di bawah pemerintahan Pol Pot sebelumnya. Peranan AS dan Jepang penting sekali artinya. Suatu sikap yang luwes dari pihak AS terhadap Vietnam dapat mempengaruhi Hanoi untuk mengambil sikap kompromi sebelum ia (Vietnam) dipaksa untuk melakukannya oleh kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan.

Selain prakarsa diplomatik, ASEAN hendaknya juga mempersiapkan suatu tanggapan militer sebagai jalan terakhir. Kemampuan militer negara-negara ASEAN secara berangsur-angsur harus ditingkatkan sampai pada tingkat yang diperlukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam bidang ini kiranya akan diperkuat walaupun tidak akan menjurus menjadi suatu pakta militer. Semua negara ASEAN menyadari bahwa suatu pakta militer bukan jawaban yang tepat terhadap ancaman yang langsung mereka hadapi, yakni yang berasal dari dalam negeri. Agaknya mereka akan terus meningkatkan kerja sama berdasarkan hubungan *bilateral*, yang juga dianggap cukup untuk menghadapi an-



caman dari luar dalam jangka waktu yang dekat. Jika Muangthai menghadapi ancaman yang nyata di sepanjang perbatasannya, maka empat negara ASEAN lainnya secara lepas satu sama lain dapat memberikan bantuan yang diperlukan, misalnya suplai bahan kebutuhan strategis seperti minyak dan makanan.

Peningkatan kemampuan militer negara-negara ASEAN akan dilakukan secara bertahap, agar tidak menimbulkan beban yang besar atas perkembangan ekonomi dan sosial. Jadi, dalam jangka pendek dan menengah mereka hanya akan meningkatkan kemampuan militernya untuk menghadapi meningkatnya subversi dan infiltrasi. Sedangkan dalam jangka waktu yang lebih lama, yakni 5 sampai 10 tahun, kemampuan militer itu dapat ditingkatkan untuk menghadapi ancaman-ancaman potensial yang konvensional.

Mengingat hal ini, AS dapat membantu negara-negara ASEAN dengan menjual peralatan militer secara terjamin dan teratur, serupa dengan penjualan-penjualan kepada Muangthai baru-baru ini.

Usaha-usaha ASEAN untuk terus membangun perekonomian dan meningkatkan kerja sama ekonomi juga merupakan suatu jawaban yang perlu, di samping usaha-usaha diplomasi — politik dan keamanan — militer yang telah dibahas di atas. Kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi tampaknya telah kehilangan momentum sebagai akibat peristiwa-peristiwa di Indocina baru-baru ini yang berkaitan langsung dengan keamanan ASEAN.

Harus dicatat bahwa suatu kerja sama ekonomi yang kuat dan luas dasarnya dapat menjamin kelangsungan hidup ASEAN dalam jangka waktu yang lama. Suatu perluasan struktur kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dapat memperkuat kerja sama ekonomi ASEAN melalui peningkatan hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara industri di kawasan Asia-Pasifik yang merupakan partner dagang utama dan sumber modal serta teknologi mereka.

Untuk mendukung usaha-usaha ASEAN sebagaimana telah dibahas di atas, ASEAN mencoba untuk mempertahankan suatu lingkungan dengan kehadiran yang seimbang dari empat kekuatan besar — AS, Uni Soviet, RRC dan Jepang — di Asia Tenggara. Kehadiran yang seimbang seperti ini akan mempertinggi stabilitas di



kawasan Asia Tenggara. Untuk mencapai sasaran ini, suatu struktur hubungan yang istimewa perlu diadakan dengan masing-masing dari kekuatan-kekuatan besar itu.

### Amerika Serikat

1. AS tampaknya telah mengubah kecenderungan untuk menjauhkan diri dari kawasan Asia-Pasifik menyusul kegagalannya di Vietnam. Namun demikian, dalam masa yang dekat tidak dapat diharapkan bahwa AS akan meningkatkan kehadirannya dari tingkat minimal sekarang ini. Negara-negara ASEAN perlu mengadakan hubungan yang lebih erat dengan Kongres AS. Pendapat umum di AS telah memberikan perhatian lagi pada Asia Tenggara, tetapi harus diperkuat lagi untuk mendukung suatu kehadiran AS yang terus menerus di kawasan ini.
2. Setidak-tidaknya, AS harus mempertahankan kehadiran militernya di Asia Tenggara (Pangkalan Clark dan Subic), dan juga kehadirannya di Samudera Hindia.
3. Dalam mendukung keamanan militer negara-negara ASEAN, AS harus mengatur penjualan-penjualan perlengkapan militer yang terjamin dan teratur.
4. Untuk mendukung usaha-usaha ASEAN guna memperoleh suatu penyelesaian politik di Kamboja dan memecahkan masalah pengungsi, AS dapat:
  - a. menggunakan pengaruhnya baik terhadap Uni Soviet maupun RRC untuk mencegah mereka memperluas lebih lanjut konflik Cina-Soviet ke negara-negara Asia Tenggara lainnya;
  - b. mengurangi ketergantungan Vietnam pada Uni Soviet dengan mengambil sikap yang lebih luwes terhadap Hanoi;
  - c. membantu perekonomian ASEAN, dalam bentuk penanaman modal ODA dan swasta serta membuka jalan yang lebih luas bagi hasil-hasil produksi ASEAN di pasaran AS.
5. Mengadakan konsultasi secara intensif dengan ASEAN baik sebagai suatu kelompok maupun dengan masing-masing negara ASEAN.

### Jepang

1. Jepang dapat membantu ASEAN terutama dalam bidang ekonomi, baik melalui penanaman modal dan teknologi maupun

perdagangan. Jepang saat ini dan dalam masa mendatang tetap merupakan partner ekonomi ASEAN yang terbesar.

2. Jepang secara berangsur-angsur akan meningkatkan peranan politiknya. Jepang dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam Dialog Utara-Selatan dan mendukung diplomasi ASEAN ke arah suatu penyelesaian damai di Indocina. Mengingat hal ini, Jepang harus meningkatkan konsultasi dengan negara-negara ASEAN.
3. Berkenaan dengan kemungkinan peranan Jepang dalam bidang militer, Jepang harus berkonsultasi dan berdiskusi secara terbuka dengan negara-negara ASEAN. Keterbukaan Jepang penting artinya untuk menghindari salah tafsir atau bahkan sikap menentang dari negara-negara di kawasan ASEAN. Pada akhirnya, Jepang harus menempuh arah itu, akan tetapi prosesnya hendaknya berjalan secara berangsur-angsur, mula-mula untuk mempertahankan tanah air dan perairannya sendiri, namun kemudian untuk mengamankan jalur laut yang vital bagi Jepang. ASEAN tidak perlu menentang perkembangan seperti itu jika Jepang merencanakannya secara berangsur-angsur, dalam rangka pakta pertahanannya dengan AS, dan melalui konsultasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN.
4. Peranan Jepang dalam bidang kebudayaan perlu ditingkatkan. Walaupun akhir-akhir ini Jepang telah meningkatkan kegiatannya dalam bidang ini, itu belum sebanding dengan peranannya dalam bidang ekonomi.

## RRC

1. RRC dapat menjadi faktor pertimbangan bagi Vietnam dan Uni Soviet di Asia Tenggara.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap RRC, RRC harus membuktikan bahwa ia merupakan partner yang dapat dipercaya, yakni lebih mengutamakan hubungan antar-pemerintah dari pada hubungan antar-partai. RRC juga harus mengambil suatu kebijaksanaan yang jelas terhadap orang-orang Cina perantauan di Asia Tenggara. Selain itu RRC harus menahan diri untuk tidak mengobarkan konflik di Indocina lebih lanjut.
3. RRC dapat menjadi pasar alternatif bagi barang-barang produksi ASEAN.

1. Untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha multilateral guna mempertahankan stabilitas di Asia Tenggara, RRC harus menunjukkan bahwa ia mau menganut aturan-aturan permainan masyarakat internasional.

### Uni Soviet

1. Uni Soviet dapat memberikan sumbangannya bagi stabilitas Asia Tenggara dengan menahan Vietnam agar tidak melakukan serangan terhadap Muangthai. Uni Soviet harus menciptakan suatu suasana di mana Vietnam dapat hidup berdampingan dengan ASEAN.
2. Kehadiran Uni Soviet di Asia Tenggara adalah suatu kenyataan. Akan tetapi Uni Soviet masih harus membuktikan dirinya sebagai partner yang dapat dipercaya. Hanya akhir-akhir ini Uni Soviet mengubah sikapnya terhadap ASEAN, dan hal ini mungkin hanya suatu taktik belaka.
3. Adalah juga penting sekali bahwa Uni Soviet menunjukkan pengekanan dirinya berkenaan dengan konflik Cina-Soviet, karena meluasnya konflik Cina-Soviet di Asia Tenggara sangat tidak menyenangkan ASEAN. Mengingat hal ini, ASEAN selamanya bersikap netral.

### IV. KESIMPULAN

Negara-negara ASEAN sangat menghargai suatu suasana yang stabil dan damai di Asia Tenggara agar mereka dapat membangun negaranya, sebagai tantangan utama yang dihadapi negara-negara ASEAN.

Pembahasan dalam bagian II melukiskan tantangan-tantangan dari dalam yang dihadapi pemerintah negara-negara ASEAN, dan bagaimana tantangan-tantangan itu dapat secara langsung mengancam keamanan negara-negara itu. Memperbaiki akibat-akibat sampingan dari pembangunan ekonomi meliputi banyak aspek, dan bukan merupakan tugas yang mudah dalam suatu lingkungan, di mana kesatuan negara dan bangsa dipertaruhkan. Tugas yang harus dilakukan untuk membangun lembaga-lembaga politik meliputi suatu proses dan tidak dapat diselesaikan dalam semalam, tetapi merupakan suatu unsur yang menentukan untuk menjamin kesinambungan dan mempertahankan stabilitas negara. Lebih penting lagi, hal itu menghilangkan ketidakpastian sekitar masalah penggantian pimpinan



nasional di negara-negara ASEAN. Meskipun prospeknya tidak seburuk pandangan banyak peninjau dari luar kawasan itu, tantangan-tantangan di masa depan tetap besar. Semuanya itu menjadi lebih sulit lagi jika lingkungan ekstern tidak memberikan dukungan atas usaha-usaha yang dilakukan pemerintah masing-masing.

Mengingat hal ini, maka diperlukan suatu perimbangan kehadiran empat kekuatan besar di Asia Tenggara. Suatu dominasi suatu kekuatan kiranya akan mengundang kekuatan lainnya meningkatkan kekuatannya untuk mengimbangnya, dan seringkali menggunakan cara yang tidak sah.

Kehadiran AS di kawasan ini dipandang kecil sekali, namun kehadiran AS di Asia Tenggara pada masa setelah Vietnam pada dasarnya lebih masuk akal daripada sebelumnya. Kalau dulu hubungan "superpower Client" merupakan mode, maka kini hubungan AS dengan negara-negara ASEAN pada dasarnya mencerminkan semangat konsultasi antara negara-negara yang sederajat.

Kehadiran Jepang dalam bidang ekonomi, meskipun masih terdapat ketidakpuasan, pada umumnya diterima baik dan didukung oleh negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN juga mendukung peranan politik Jepang di kawasan Asia-Pasifik, tetapi tampaknya Jepang membutuhkan beberapa waktu lamanya untuk merumuskan garis-garis besar yang lebih konkrit dalam memainkan peranan ini. Selain itu, peranan Jepang dalam bidang militer dalam masa mendatang mungkin tidak dapat dihindari, dan karenanya Jepang harus berkonsultasi dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik tentang hal-hal yang harus dilakukan Jepang.

Peranan RRC di kawasan ini yang dapat diterima oleh ASEAN sebagian besar bergantung pada sikap dan tindak-tanduk pemimpin-pemimpin di Beijing sekarang ini, yang terungkap dalam kebijaksanaan dalam dan luar negeri RRC, terutama posisinya mengenai hubungan antar-partai dan masalah Cina perantaraan di Asia Tenggara.

Peranan Uni Soviet di Asia Tenggara dipandang oleh negara-negara ASEAN sebagai mendua (plin-plan), dan akan diikuti dengan seksama. Yang terpenting bagi negara-negara ASEAN ialah kebijaksanaan Uni Soviet dalam menyelesaikan konflik Indocina.

# LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA

Asnani USMAN\*

Sejak bulan Maret 1980 yang lalu tampak suatu kesibukan diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Di satu pihak terjadi kunjungan Menlu RRC Huang Hua dan Menlu Vietnam Nguyen Co Thach ke negara-negara ASEAN. Di lain pihak terjadi kunjungan diplomatik di antara negara-negara ASEAN, terutama kunjungan PM Muangthai Prem Tinsulonanda terhadap rekan-rekannya.

Topik utama yang dibicarakan adalah penyelesaian masalah Kamboja, di samping masalah-masalah bilateral lainnya di antara mereka. Masing-masing pihak berusaha saling mengadakan pendekatan dalam mencari penyelesaian politik masalah Kamboja yang dapat diterima oleh semua pihak. Tetapi tampaknya hal ini bukan saja menemui rintangan karena sikap-sikap negara yang berbeda dan tetap pada pendiriannya masing-masing, melainkan juga karena Vietnam telah mengadakan tindakan penyerbuan ke wilayah Muangthai. Tindakan ini telah menimbulkan reaksi keras dari negara-negara ASEAN yang dikemukakan dalam Konperensi Menlu ASEAN di Kuala Lumpur.

Sehubungan dengan perkembangan itu kiranya perlu ditinjau lebih jauh sikap-sikap negara yang ada serta apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kemungkinan penyelesaiannya.

## PERKEMBANGAN SITUASI

Pada bulan Nopember 1979 yang lalu, baik dunia internasional maupun ASEAN khususnya, menumpahkan perhatian mereka

---

\* Staf CSIS



terhadap penyerbuan pasukan Vietnam ke Kamboja dan membanjirnya pengungsi di perbatasan Kamboja-Muangthai (lihat Peta Indocina). Resolusi yang diprakarsai oleh ASEAN mengenai masalah Kamboja telah disetujui oleh PBB tanggal 14 Nopember 1979. Resolusi ini menuntut kepada Vietnam agar menarik mundur pasukannya dari Kamboja dan membiarkan Kamboja membentuk pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari luar. Resolusi inilah yang menjadi titik tolak bagi ASEAN untuk penyelesaian masalah Kamboja.

Demikianlah perkembangan yang terjadi dan setelah itu perhatian terhadap masalah Kamboja agak menurun. Tampaknya perhatian dunia beralih kepada peristiwa lain, yaitu invasi Uni Soviet ke Afghanistan dan meningkatnya ketegangan di Teluk Persia sehubungan dengan krisis Amerika Serikat-Iran. Namun ASEAN tetap berusaha mencari penyelesaian masalah Kamboja. Desember 1979 ASEAN sepakat untuk mengirimkan Menlu Malaysia Rithauddeen sebagai wakil ASEAN untuk berdialog dengan Vietnam, tetapi tawaran itu ditolak oleh Vietnam. Dalam pertemuan Menlu ASEAN-MEE tanggal 6 Maret 1980, ASEAN berhasil mencapai suatu pernyataan politik bersama dengan MEE mengenai masalah Kamboja yang menginginkan agar penyelesaian masalah Kamboja sesuai dengan resolusi PBB. Pernyataan ini mendapat kecaman keras, baik dari Heng Samrin maupun dari Hanoi.

## PRINSIP KUANTAN

Kesibukan kunjungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara dimulai dengan kunjungan Menlu RRC Huang Hua ke Manila (11-14 Maret 1980), Kuala Lumpur (14-17 Maret 1980), dan Singapura (17-18 Maret 1980). Seminggu setelah kunjungan ini, Presiden Suharto mengadakan pertemuan dengan PM Malaysia Datuk Hussein Onn di Kuantan tanggal 26-27 Maret 1980.

Dalam pertemuan ini, selain masalah bilateral juga dibicarakan hasil pembicaraan Menlu Huang Hua di Kuala Lumpur, termasuk mengenai masalah Kamboja. Seperti diketahui Indonesia tidak menerima kunjungan Menlu Huang Hua.

Dalam pembicaraan di Kuantan ini, kedua pemimpin tersebut setuju bahwa suatu pemecahan politik masalah Kamboja harus dicapai.



## INDOCINA



Diambil dari Malcolm Salmon, Ed., *The Vietnam-Kampuchea-China Conflicts: Motivations, Background, Significance* (Universitas Nasional Australia, 1979)

Peperangan yang berlarut-larut akan memperlemah Vietnam dan sebagai akibatnya Vietnam akan makin "dekat" dengan Uni Soviet. Vietnam perlu "dijauhkan" dari Uni Soviet dan bebas dari RRC dan menjadi independen. Selanjutnya dikemukakan bahwa makin dituntutnya penarikan mundur pasukan Vietnam, hanya akan makin memperkuat tekad Vietnam untuk tetap di Kamboja. Oleh karena itu kepada Vietnam harus ditawarkan suatu pemecahan alternatif yang dapat diterima. Indonesia mempertimbangkan suatu usul kompromi berupa suatu pemerintahan koalisi di Phnom Penh serta penarikan sebagian pasukan Vietnam dari wilayah itu.<sup>1</sup>

Demikianlah akhirnya pertemuan tersebut menghasilkan suatu formula yang disebut "Prinsip Kuantan" yang mengemukakan bahwa untuk menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, Vietnam harus netral, bebas dari pengaruh baik Uni Soviet maupun RRC.

Dalam kunjungan PM Hussein Onn ke Singapura dan kunjungan PM Prem Tinsulonanda ke Malaysia, prinsip ini dibahas, tetapi tampaknya timbul perbedaan pendapat dan sikap mengenai hal ini. Prinsip ini dianggap telah menyimpang dari kesepakatan semula yang bertitik tolak pada resolusi PBB.

## KESIBUKAN DIPLOMATIK

Kunjungan PM Muangthai Prem Tinsulonanda yang sangat diharapkan oleh rekan-rekannya telah diadakan pada bulan April 1980. Kunjungan ini dilakukan sebelum Muangthai menerima kunjungan Menlu Huang Hua dan Menlu Nguyen Co Thach, di negaranya.

Sebelum kunjungan PM Prem dilakukan telah timbul isu-isu dan spekulasi tertentu yang telah menimbulkan kekhawatiran negara-negara ASEAN sehubungan dengan pernyataan bekas PM Kukrit Pramoj dalam wawancaranya dengan harian Bangkok *Siam Rath* yang mengemukakan bahwa Muangthai mungkin harus mengakui rezim Heng Samrin di Phnom Penh apabila hal itu tidak dapat dihindari lagi. Kemudian menjelang keberangkatannya PM Prem Tinsulonanda ke Kuala Lumpur, Bangkok membenarkan laporan bahwa hal itu akan

<sup>1</sup> Richard Nations, "Prem Takes Peace Hopes One Step Further", *Far Eastern Economic Review (FEER)*, 9 Mei 1980; Susumu, "Major Changes in the Wind" *FEER*, 16 Mei 1980

dibicarakan langsung dengan Hanoi. Kemungkinan diadakannya pembicaraan antara Bangkok dan Hanoi telah dikemukakan untuk pertama kalinya oleh PM Pham Van Dong pada waktu kunjungannya ke New Delhi awal April yang lalu. Jika kemungkinan ini benar, maka hal ini merupakan suatu perubahan (pergeseran) yang penting dari posisi semula.<sup>1</sup>

Indonesia pun dengan rasa kuatir mengawasi setiap tanda perubahan kebijaksanaan yang akan ditempuh Muangthai untuk mengatasi jalan buntu diplomatik. Sebelumnya Kriangsak selalu mengatakan bahwa tiada jalur suplai, tetapi pernyataan ini hampir-hampir tidak diperhatikan oleh Indonesia, dan Indonesia bahkan merasa bahwa Muangthai sudah bergerak makin dekat dengan RRC dalam menentang Vietnam. Selain itu Indonesia sangat mengharapkan suatu perubahan kebijaksanaan Kriangsak yang menolak usaha-usaha dan Amerika Serikat untuk mendukung Sihanouk.<sup>2</sup>

Semua kekuatiran tersebut menjadi jelas setelah kunjungan PM Prem ke Malaysia dan Singapura selama tiga hari (18-20 April 1980). PM Prem menegaskan bahwa dia tidak pernah berkata bahwa Muangthai bersedia mengakui Heng Samrin.. Akhirnya baik Muangthai maupun Malaysia dan Singapura setuju bahwa setiap pemecahan politik masalah Kamboja harus berdasarkan resolusi PBB.

Dalam kunjungannya ke Indonesia (25-26 April 1980) PM Prem memberikan jaminan kepada Indonesia bahwa Muangthai tidak akan mengijinkan RRC mengirimkan suplai bantuan untuk Khmer Merah melalui wilayahnya. Sedangkan kemungkinan peranan Pangeran Sihanouk dalam pemecahan politik masalah Kamboja akan dipertimbangkan kembali. Indonesia pun memberi jaminan akan mendukung keputusan Muangthai dalam hubungannya dengan Vietnam, paling tidak untuk waktu sekarang ini. Indonesia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk mencapai suatu persetujuan dengan Vietnam di belakang Muangthai.<sup>3</sup>

Dalam menanggapi Prinsip Kuantan, Muangthai menyetujui suatu Kamboja yang netral, tetapi tidak setuju bahwa resolusi PBB dikompromikan sehingga hanya menyerukan penarikan mundur sebagian

1 *Asiaweek*, 2 Mei 1980

2 Richard Nations, *loc. cit.*

3 *Ibid.*



pasukan Vietnam. Akhirnya Indonesia menyetujui untuk tetap memelihara pola hubungan diplomatik mereka sampai hasil kunjungan Menlu Co Thach ke negara-negara ASEAN dapat dinilai.

Dalam kunjungan PM Prem ke Manila yang baru diadakan pada tanggal 15-16 Mei 1980, Presiden Marcos memberi dorongan kepada Muangthai supaya tidak bersikap lunak terhadap Vietnam.

Dari hasil kunjungan PM Prem ke rekan-rekannya ini dapat dilihat tercapainya saling pengertian dan sikap yang lebih jelas, setelah sebelumnya timbul isu-isu yang menimbulkan kekuatiran RRC mengenai kemungkinan berubahnya sikap ASEAN sehingga tidak mengakui lagi Pemerintah Demokrasi Khmer Merah yang dibantunya. Dalam kunjungannya selama tiga hari (7-9 Mei 1980) ke Muangthai Menlu Huang Hua rupanya cukup puas dengan keputusan Muangthai untuk tetap berpegang pada resolusi PBB yang menuntut penarikan mundur seluruh pasukan Vietnam sebagai suatu persyaratan untuk penyelesaian masalah Kamboja. Namun Muangthai bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Hanoi sebelum penarikan mundur pasukan Vietnam secara total. Mengenai masalah suplai RRC untuk Khmer Merah lewat wilayah Muangthai, rupanya tidak diadakan pembicaraan langsung, hanya disampaikan pesan kepada Huang Hua bahwa wilayah Muangthai tidak dapat digunakan untuk suplai senjata bagi pasukan Pol Pot.<sup>1</sup>

Demikianlah langkah-langkah pertama yang diambil ASEAN untuk menghadapi Vietnam dalam usaha mencari penyelesaian politik masalah Kamboja yang dapat diterima. Tetapi rupanya kunjungan Menlu Nguyen Co Thach baik ke Muangthai maupun ke Malaysia dan Indonesia tidak mencapai hasil yang memuaskan. Kedua pihak tidak berhasil mengatasi perbedaan pendapat mereka dan masing-masing tetap pada pendiriannya. Penyerbuan Vietnam memasuki wilayah Muangthai (kedua desa Koke Sung dan Baan Non Mark Moon sempat diduduki) untuk mencegah repatriasi pengungsi ke Kamboja pada tanggal 23 Juni 1980 makin mempersulit usaha penyelesaian masalah Kamboja.

---

1 Richard Nations, "Revolving Door Diplomacy", *FEER*, 16 Mei 1980

## KONPERENSI MENLU ASEAN DI KUALA LUMPUR

Masalah penyerbuan Vietnam ke wilayah Muangthai menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan ke-13 para Menlu ASEAN di Kuala Lumpur yang diadakan pada tanggal 25 Juni 1980. Pertemuan ini menghasilkan suatu "Komunike Bersama" yang pada hakekatnya merupakan tanggapan yang tegas terhadap sikap dan tindakan Vietnam. Para Menlu ASEAN bersatu mengecam tindakan militer yang melintasi perbatasan Muangthai.

Sebelumnya komunike ASEAN lebih lunak, hanya menyebut "pasukan asing" dan menggunakan kata-kata seperti "strongly regret" (sangat menyesalkan) dan "strongly deplored" (sangat menyayangkan). Tetapi sekarang ASEAN menggunakan istilah "agresi" (agression) dan "mengutuk" (condemn) serta jelas-jelas menyebut nama Vietnam.<sup>1</sup>

Dalam pertemuan ini juga terjadi perbincangan mengenai dialog dengan Vietnam. Menurut Muangthai dan Singapura, dialog dengan Vietnam dalam waktu dekat ini tidak ada gunanya, sedangkan Indonesia, Malaysia dan Filipina berpendapat bahwa dialog masih berguna. Akhirnya dihasilkan suatu sepakat kata bahwa ASEAN tidak akan mengadakan dialog kecuali atas inisiatif Vietnam.

Pada Konperensi ini hadir juga kelima Menlu dari Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Selandia Baru dan Australia untuk mengadakan dialog dengan para Menlu ASEAN. Mereka mendukung pernyataan para Menlu ASEAN yang mengutuk agresi Vietnam ke wilayah Muangthai.

## JALAN, BUNTU USAHA PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA

Harapan akan adanya usul-usul konstruktif Vietnam dalam pembicaraannya dengan Malaysia, Muangthai dan Indonesia ternyata sia-sia dan keadaan bahkan makin "tegang" dan rawan dengan adanya penyerbuan Vietnam.

---

<sup>1</sup> *Sinar Harapan*, 11-7-1980; *Tempo*, 12-7-1980, hal. 15



Vietnam tetap pada pendiriannya, tidak akan menarik mundur pasukannya selama merasa masih ada ancaman atau bahaya dari RRC. Selanjutnya Vietnam mengemukakan bahwa keadaan Kamboja sudah "tidak bisa dibalik" (irreversible) dan setiap pembicaraan mengenai masalah Kamboja harus menyertakan Pemerintah Kamboja yang sekarang ini. Vietnam menginginkan agar ASEAN mengakui kenyataan ini. Terlebih jauh Vietnam menginginkan adanya kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian regional sebelum penyelesaian masalah Kamboja. Vietnam telah menolak formula Kuantan yang diajukan ASEAN, sebab formula ini sama sekali tidak menyebutkan Amerika Serikat, yang menurut Vietnam telah mendukung Khmer Serei dan memainkan "kartu" Cina. Vietnam merasa kemerdekaannya diragukan formula tersebut, sebab negara ini berpendapat bahwa dirinya tidak berada di bawah pengaruh negara manapun.

Di lain pihak negara-negara ASEAN, yang hampir mengalami perbedaan pendapat di antara mereka dalam mencari jalan penyelesaian masalah Kamboja, akhirnya kembali kepada kesepakatan semula, sesuai dengan resolusi PBB. Sikap ini menjadi makin tegas dan jelas dalam Komunike Bersama ASEAN akibat tindakan militer Vietnam ke wilayah Muangthai. Bagi ASEAN penyelesaian krisis Kamboja harus dicapai sebelum masalah kerja sama, stabilitas dan perdamaian Asia Tenggara dibicarakan. Demikianlah tidak dicapai hasil yang dapat menyelesaikan konflik Kamboja.

## LATAR BELAKANG PERBEDAAN SIKAP NEGARA-NEGARA

Kesibukan diplomatik sehubungan dengan penyelesaian masalah Kamboja itu sangat erat kaitannya dengan latar belakang sikap negara-negara yang telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka dan sekaligus menimbulkan "kemacetan".

Sebenarnya latar belakang sikap negara-negara, baik negara-negara ASEAN maupun Vietnam, berdasarkan pada kepentingan keamanan masing-masing, demikian pula sikap RRC.

Di antara negara-negara ASEAN telah timbul sedikit perbedaan pandangan mengenai ancaman bahaya bagi mereka, yaitu antara Muangthai dan Indonesia. Dalam hal ini Malaysia cenderung mempunyai sikap yang sama dengan Indonesia dan Singapura dengan



Muangthai. Indonesia melihat Vietnam dalam kaitannya dengan sikap politiknya terhadap RRC. Indonesia menganggap Vietnam perlu sebagai wilayah penyanggah terhadap pengaruh RRC dan oleh karena itu tidak menginginkan Vietnam menjadi terlalu lemah akibat perkembangan di Kamboja, sehingga tidak dapat mengimbangi RRC dalam jangka panjang. Dengan membiarkan Vietnam berpengaruh di Kamboja ("pre-eminence in Kampuchea") Indonesia dapat mencegah ancaman tersebut.<sup>1</sup>

Sebaliknya Muangthai lebih melihat Vietnam sebagai ancaman terbesar dan langsung terhadap negaranya, karena letaknya yang berbatasan. Oleh karena itu Muangthai menginginkan Kamboja sebagai wilayah penyanggah antara dirinya dan Vietnam.<sup>2</sup>

Dalam konflik Kamboja ini, Muangthai mempunyai posisi yang paling sulit. Boleh dikatakan bahwa Muangthai harus menjaga hubungan baik dengan tiga pihak, di samping menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya. Dengan sesama negara ASEAN Muangthai harus melakukan penyesuaian pandangan dan sikap terhadap Vietnam, karena Vietnam sampai sekarang tidak mau mengakui ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari keengganan Vietnam untuk mengadakan dialog dengan Menlu Malaysia Ahmad Rithauddeen sebagai wakil ASEAN. Vietnam berharap bahwa pertemuan bilateral dengan negara-negara ASEAN akan memudahkan usahanya untuk mencapai kata sepakat mengenai Kamboja yang menguntungkan posisinya. Hal ini disadari oleh ASEAN. ASEAN tidak menolak pendekatan Vietnam secara bilateral, tetapi sementara itu pertemuan-pertemuan bilateral di antara negara-negara ASEAN sendiri tetap diadakan dalam rangka mencari suatu keserasian dan kesepakatan dalam menghadapi Vietnam.

Selain itu, Muangthai harus menunjukkan suatu sikap yang tidak menimbulkan prasangka dan memancing tuduhan, baik dari Vietnam maupun dari RRC. Di satu pihak Vietnam menuduh Muangthai membantu Khmer Merah dan menyediakan wilayahnya bagi suplai RRC untuk Khmer Merah. Menurut Vietnam Muangthai telah menjadi "kartu" di tangan Cina, karena membantu Cina dalam memperkuat kedudukan Pol Pot secara fisik dan bukan hanya lewat diplomasi. Ban-

---

1 Richard Nations, *loc. cit.*, hal. 12; Richard Nations, "The Looming Split in the Five", *FEER*, 20 Juni 1980, hal. 12

2 *Ibid.*

tuan kepada Pol Pot merupakan ancaman karena akan memperpanjang peperangan di Kamboja dan dapat menggagalkan usaha Vietnam menciptakan solidaritas Indocina. Tetapi di lain pihak Muangthai harus menghadapi prasangka RRC yang kuatir bahwa Muangthai akan mencapai persetujuan dengan Vietnam yang mengancam posisinya. Kesulitan inilah yang dihadapi Muangthai. Oleh karena itu Muangthai harus dapat menunjukkan suatu sikap yang netral yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak.

Latar belakang sikap RRC dan Vietnam terhadap Muangthai ini sangat erat kaitannya dengan "permusuhan" yang terjadi di antara mereka. Bagi Vietnam ancaman RRC sudah menjadi semacam kepercayaan, karena Vietnam dan RRC sudah menjadi "musuh bebuyutan" sejak 4000 tahun yang lalu. Alasan utama invasi Vietnam ke Kamboja adalah menjamin keamanannya terhadap ancaman Cina. Vietnam menganggap pengaruh Cina di Kamboja sebagai awal dari usahanya untuk menguasai Indocina. Tindakan invasi Vietnam ini didukung pula oleh Uni Soviet yang juga tidak menginginkan kemungkinan meluasnya pengaruh Cina. Hal ini ditentang Cina karena Cina merasa terancam oleh pengepungan Uni Soviet lewat Vietnam. Hal inipun dilatarbelakangi oleh "pertentangan" RRC-Uni Soviet. Adanya permusuhan dan pertentangan di antara mereka inilah yang menimbulkan perasaan terancam yang pada gilirannya menjadi motivasi pendekatan mereka terhadap negara-negara ASEAN.

Kekuatiran Cina akan perubahan sikap ASEAN terhadap Vietnam dengan mengakui regim Heng Samrin merupakan latar belakang kegiatan kunjungan Menlu Huang Hua ke negara-negara ASEAN. RRC berusaha untuk "mengajak" ASEAN memandang Uni Soviet sebagai suatu ancaman terhadap keamanan dan stabilitas Asia Tenggara, terutama dalam masalah Kamboja. Paling tidak RRC menginginkan agar ASEAN tidak menganggap dirinya sebagai bahaya.

Sebaliknya Vietnam kuatir bahwa ASEAN secara langsung dan tidak langsung ditarik ke dalam strategi Cina terhadap Vietnam. Hal ini sehubungan dengan sikap Muangthai yang dianggapnya sebagai "kartu" Cina. Vietnam, yang melihat ASEAN bertekad untuk mempertahankan solidaritas di antara negara-negara anggotanya, merasa kuatir bahwa ASEAN akan mengakomodasi sikap dan kebijaksanaan Muangthai tersebut. Atas dasar ini maka suatu ofensif diplomasi ke ASEAN mempunyai arti yang penting bagi Vietnam.



Vietnam ingin menyatakan kepada negara-negara ASEAN, khususnya Muangthai, bahwa dalam jangka panjang ancaman terhadap Asia Tenggara bukanlah datang dari Vietnam (Indocina), tetapi dari Cina. Oleh karena itu Vietnam tidak akan menarik mundur pasukannya dari Kamboja selama masih merasa ada ancaman dari Cina.

Tetapi mempertahankan pasukannya di Kamboja merupakan beban yang sangat berat bagi Vietnam, terutama dalam bidang ekonomi. Sebaliknya menarik mundur pasukannya dari Kamboja baginya merupakan suatu resiko yang besar, karena akan memudahkan Khmer Merah mengalahkan regim Heng Samrin yang didukungnya. Apalagi dengan makin kuatnya kembali Khmer Merah seperti terungkap dalam berita-berita terakhir. Atas dasar ini pula Vietnam berusaha mengadakan dialog dengan masing-masing negara ASEAN untuk mendapatkan pengakuan mereka terhadap rezim Kamboja sekarang ini.

## PROSPEK PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA

Dari uraian di atas dapat dilihat betapa sulitnya menemukan suatu kesepakatan mengenai suatu persoalan yang menyangkut latar belakang kepentingan yang berbeda dari negara ke negara. Untuk mencapai suatu kesepakatan diperlukan suatu pergeseran sikap yang menghasilkan usul-usul baru sebagai kompromi yang dapat diterima semua pihak.

Penyerbuan Vietnam ke Muangthai telah membangkitkan ketidakpercayaan di pihak ASEAN karena secara demikian Vietnam telah melanggar janjinya untuk tidak melanggar kedaulatan Muangthai. Peristiwa ini telah menimbulkan reaksi keras dan sikap yang makin tegas dari ASEAN seperti tercermin dalam komunike ber-samanya yang menyerukan penarikan mundur pasukan Vietnam.

Sikap keras Vietnam sulit dihadapi atau dilawan dengan sikap keras negara-negara lain, sebab ini hanya akan mengundang konflik terbuka yang akan mengancam keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Peristiwa penyerbuan Vietnam ke wilayah Muangthai disusul dengan pengiriman 3 divisi baru RRC ke perbatasannya dengan Vietnam. Walaupun tidak terjadi "serangan hukuman" baru, tindakan ini dapat dilihat sebagai suatu "peringatan" dari RRC untuk Vietnam bahwa RRC tidak akan tinggal diam jika terjadi penyerbuan serius ke



Muangthai. Bukan tidak mungkin bahwa apabila konflik ini makin meningkat berbagai negara akan mengenakan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Vietnam. Semuanya ini akan makin mendekatkan Vietnam ke Uni Soviet dan berarti suatu kesempatan bagi Uni Soviet untuk makin melibatkan dirinya dan menanamkan pengaruhnya di Kamboja khususnya dan Indocina umumnya. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa Uni Soviet sangat menginginkan pangkalan-pangkalan di Cam Ranh, Dan Nang dan bahkan Kompong Som di Kamboja.

Semua kemungkinan, baik "pecahnya konflik terbuka" maupun "penyelesaian secara damai", banyak ditentukan oleh kemauan politik dan sikap masing-masing pihak, sikap keras yang akan meningkatkan konflik di satu pihak dan sikap yang lebih lunak dan memungkinkan kompromi di lain pihak.

Suatu usul Kamboja netral dengan suatu pemerintah koalisi dan ditarik mundurnya pasukan Vietnam ditolak Vietnam. Vietnam bahkan telah bertindak lebih jauh dengan merencanakan pemilihan umum di Kamboja. Pengakuan India terhadap rezim Heng Samrin, dikuatirkan akan disusul pengakuan oleh negara-negara lain. Seperti diketahui, dalam 9 bulan, 21 negara telah mengakui rezim ini.<sup>1</sup> Kemungkinan (alternatif) Pangeran Sihanouk sebagai calon kepala pemerintah sebuah Kamboja yang netralpun sulit dilaksanakan.

Melihat situasi yang demikian rumit ini, kita dapat membayangkan bahwa situasi di Kamboja akan berlarut-larut jika tidak dicapai suatu penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Sebenarnya formula Kuantan dapat dipertimbangkan untuk menjadi titik tolak baru bagi penyelesaian masalah Kamboja, walaupun mungkin diperlukan penyesuaian sikap dan pendekatan-pendekatan yang lebih lanjut dari berbagai pihak. Pendekatan-pendekatan ini tidak saja harus dilakukan di antara negara-negara ASEAN sehubungan dengan persepsi ancaman yang berbeda di antara mereka, tetapi juga antara Vietnam dan ASEAN dan antara negara-negara besar Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC.

Bagi negara-negara ASEAN, posisi Muangthai yang sulit dan terancam langsung oleh perkembangan di Indocina harus selalu

1 Nayan Chanda, "The Making of A Bloc", *FEER*, 30 Mei 1980, hal. 18

diperhitungkan dalam mencari alternatif baru. Begitu pula posisi RRC yang tidak akan tinggal diam selama merasa terancam oleh pengepungan Uni Soviet, terutama karena Kamboja berada di bawah Vietnam yang menjadi satelit Uni Soviet. Demikian pula Vietnam yang perlu diyakinkan bahwa tidak ada ancaman dari Cina.

Untuk mencapai hal itu, di antara langkah-langkah yang harus ditempuh ialah "melepaskan" Vietnam dari rangkulan Uni Soviet. Dalam hal ini turut sertanya Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa Barat dalam bantuan ekonomi bagi Vietnam yang makin parah perekonomiannya akan mengurangi ketergantungannya pada Uni Soviet. Lebih jauh Amerika Serikat dapat mengambil prakarsa untuk menormalisasi hubungannya dengan Vietnam. Vietnam mungkin masih bisa diharapkan untuk melepaskan dirinya dari pengaruh Uni Soviet, karena Vietnam adalah suatu negara komunis yang nasionalis.

Selanjutnya ASEAN dapat memainkan peranan dengan menjaga keseimbangan hubungan dengan RRC maupun dengan Vietnam khususnya dan Indocina umumnya. Vietnam sangat mengharapkan agar ASEAN turut serta mengadakan pendekatan terhadap RRC agar menghentikan ancamannya terhadap dirinya. Demikian pernyataan Menlu Nguyen Co Thach dalam suatu pertemuan pers di Jakarta baru-baru ini.<sup>1</sup>

Dari uraian di atas adalah jelas bahwa alternatif yang mungkin diterima ASEAN adalah terbentuknya suatu pemerintahan di Kamboja yang mempunyai hubungan khusus dengan Vietnam, bebasnya Vietnam baik dari pengaruh Uni Soviet maupun RRC, dan ditariknya sebagian besar pasukan Vietnam.

Dengan demikian penyelesaian krisis Kamboja selain membutuhkan waktu, juga menuntut kemauan politik yang kuat, saling mempercayai dan sikap waspada dari negara-negara ASEAN. Kini ASEAN telah sepakat untuk tidak berdialog dengan Vietnam, kecuali atas inisiatif Vietnam. Vietnam merupakan "kunci" sejauh dialog dan penyelesaian damai hanya mungkin kalau negara ini benar-benar menginginkan perdamaian yang didengung-dengungkannya.

1 Merdeka, 26 Juni 1980



# **DIPLOMASI DAN KEPENTINGAN NASIONAL: INDIA DAN KRISIS INDOCINA**

Sutomo ROESNADI

## **PENDAHULUAN**

Sikap India yang telah melancarkan pengakuan terhadap Pemerintah Heng Samrin dari Kampuchea yang didukung oleh Vietnam telah menimbulkan amarah di kalangan negara-negara ASEAN. Sungguhnya kejadian itu sudah dapat diduga sebelumnya, yaitu pada waktu kampanye pemilu Ny. Indira Gandhi permulaan tahun ini, di mana ia menjanjikan pengakuan terhadap rezim Heng Samrin jika partainya menang kembali. Namun biasanya orang tidak memperdulikan hal yang kecil tetapi penting ini, karena kadang-kadang memang ada janji dalam kampanye pemilu yang tidak ditepati, kalau seandainya partai tersebut menang.

Pendirian India di bawah Pemerintah Indira Gandhi setelah berkuasa kembali itu ternyata memang tidak berubah, dan seakan-akan menunjukkan adanya kecenderungan berpihak kepada negara-negara yang mendapat dukungan Uni Soviet. Hal mana terlihat pada sikap India terhadap masalah Afghanistan dan Vietnam/Kamboja. Sehingga tidak mengherankan jika Presiden Marcos dari Pilipina mengecam India sebagai negara yang berada di pihak blok Soviet.

Ketika India menandatangani perjanjian persahabatan dengan Uni Soviet pada bulan Agustus 1971, juga secara kebetulan berada di bawah pemerintahan Indira Gandhi, maka reaksi dunia nonkomunis, terutama Pakistan sangat keras. India dikecam sebagai negara besar yang rela menyediakan dirinya untuk dijadikan satelit Uni Soviet. Namun demikian, jika dipertimbangkan lebih dalam, apa sejauh itulah tingkah laku India dalam politik internasional, sehingga ia rela menjual



nama dan kehormatan bangsa dan negaranya, hanya demi untuk mendapatkan imbalan bantuan atau perlindungan Uni Soviet? Apakah terdapat motif-motif lain yang merupakan motif jangka panjang bagi India sehingga ia berbuat demikian?

Sebagai salah satu negara besar (major power) di dunia, dan pernah mempunyai nama cukup harum di dunia Asia-Afrika karena kepemimpinannya dalam gerakan non-alignment, maka rasanya sangat mustahil India mau diperlakukan begitu saja oleh Uni Soviet. Sebaliknya, setiap negara di dunia, baik besar maupun kecil, kalau sudah sampai pada permasalahan kepentingan nasional, maka ia tidak ayal lagi akan menyisihkan kepentingan-kepentingan lainnya dan ia akan terus mempertahankan sikapnya, tanpa akan memperdulikan sikap negara-negara lain yang bersahabat atau tidak bersahabat.

Bagaimanapun juga diplomasi internasional adalah bagaikan hubungan dua orang pelaku sebagai pembeli dan penjual. Sesuatu negara yang bertindak sebagai pembeli akan mencoba berusaha untuk memperoleh barang atau jasa yang dibelinya dengan harga serendah mungkin, tapi dengan kualitas setinggi mungkin. Sebaliknya negara yang bertindak sebagai penjual akan mencoba menjual barangnya setinggi mungkin dan sebanyak mungkin kepada siapa saja yang mau membelinya barang-barang yang ditawarkan tersebut, sehingga ia akan memperoleh imbalan yang lebih besar, kalau tidak dapat dikatakan wajar.

## INDIA DAN ASIA TENGGARA: DUA TETANGGA YANG SALING BERJAUHAN

Secara geografis India yang berada di wilayah Asia Selatan seharusnya bertetangga lebih baik dengan negara-negara Asia Tenggara dan sebaliknya. Tetapi rasanya negara-negara Asia Tenggara, terutama ASEAN lebih dekat dengan negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat daripada dengan India. Hal yang sama berlaku bagi India, di mana ia merasa lebih dekat dengan negara-negara besar, terutama yang termasuk kelompok Lima Besar daripada dengan negara-negara kecil dan sedang di Asia Tenggara. Memang hal ini adalah sebagai akibat kolonialisme di kedua wilayah tersebut, yang masing-masing berkiblat ke kawasan yang jauh dari Asia Selatan dan Asia Tenggara tadi.

Dalam periode awal tahun limapuluhan memang India memperlihatkan kemesraannya terhadap negara-negara Asia Tenggara, terutama terhadap Indonesia, di mana memang bantuan dan dukungan sangat besar terhadap perjuangan kita masa itu. Sangat logislah bahwa setelah pengakuan kedaulatan, maka lawatan luar negeri pertama dari Presiden Soekarno adalah ke India. Demikian pula sebaliknya PM Jawaharlal Nehru adalah pemimpin India pertama yang menginjakkan kakinya di bumi Indonesia pada awal tahun limapuluhan tersebut.

Pada tingkat diplomasi internasional nama India semakin meningkat, berhubung sikapnya yang tidak berpihak dalam perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Pada waktu sengketa Korea dan Indocina, maka India memainkan peranan penting karena selalu diikutsertakan dalam komisi-komisi perdamaianya. Dalam sengketa antara Blok Barat dan Blok Timur, India tidak segan-segan mendukung pendirian Uni Soviet jika hal itu dirasa benar, tetapi juga tidak ragu-ragu untuk berfihak kepada Amerika Serikat, jika ternyata dirasakan adil. Pemimpin India ketika itu (Jawaharlal Nehru) ingin agar India menjadi wilayah damai (area of peace) dari gejolak politik dunia yang dilanda perang dingin.

Tetapi pamor India setelah tahun 1960 menjadi pudar, yang diawali dengan perbedaan pandangan antara Soekarno dan Nehru mengenai belum atau sudah selesainya masa kolonialisme di dunia. Perbedaan pandangan antara India dengan negara-negara Nonblok lainnya, terutama Indonesia, berkesinambungan dalam Konperensi Nonblok I di Beograd tahun 1961, disusul dengan Peristiwa Asian Games IV 1962, perang perbatasan India-RRC 1962, Konfrontasi Malaysia-Indonesia. Lebih banyaknya dukungan India terhadap Uni Soviet dalam persengketaan Uni Soviet — RRC telah menyebabkan India mulai terisolasi dari percaturan politik Asia Tenggara.

Setelah munculnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia, kedua negara berusaha untuk memulai lembaran baru dalam hubungan bilateralnya, tetapi ternyata tahun-tahun berikutnya tidak memperlihatkan kemajuan yang berarti. Sebagai negara besar utama di kawasan Asia Selatan, maka India merasa tersinggung ketika ASEAN dibentuk dan India sama sekali tidak diundang, apalagi diajak ikut serta. Malahan justru negara-negara kecil yang dianggap (oleh India) sebagai satelit India, seperti Birma dan Srilangkalah yang mendapat



perhatian dari negara-negara anggota persiapan pembentukan ASEAN ketika itu.

Namun demikian, India tidak merasa putus asa, dan pada bulan Juni 1969, PM Indira Gandhi mengadakan kunjungan pertamanya sebagai Kepala Pemerintahan ke Indonesia. Tetapi ternyata lebih dari 11 tahun kemudian, maka belum pernah ada kunjungan balasan dari pemimpin Indonesia ke India, malahan negara-negara Bangladesh dan Srilangkalah yang mendapat kehormatan menerima kunjungan Kepala Negara Indonesia akhir-akhir ini.

Masalah-masalah regional di Asia Tenggara pada awal tahun 1970-an cukup banyak mengisolasi India pula, misalnya Konferensi Kamboja tahun 1970 di Jakarta; ternyata Indiapun tidak diundang baik sebagai peninjau maupun sebagai peserta. Suara-suara pendapat umum di India ketika itu menyatakan bahwa sebagai negara yang banyak berkecimpung di dalam masalah-masalah Indocina sejak tahun 1954, maka seyogyanyalah India didengar pendapatnya.

Perjanjian persahabatan India-Uni Soviet bulan Agustus 1971 yang berlaku untuk masa 20 tahun, ditambah dengan berita-berita adanya pangkalan angkatan laut Uni Soviet di pelabuhan Vishakavatnam, India Tenggara, telah lebih menimbulkan banyak kecurigaan terhadap India. Kecurigaan memuncak dengan pecahnya perang India-Pakistan pada akhir tahun 1971, yaitu hanya empat bulan setelah penandatanganan perjanjian persahabatan India — Uni Soviet dilakukannya.

### KEPENTINGAN NASIONAL: PRIORITAS UTAMA

Bahwa kepentingan nasional berada di atas segala-galanya terbukti dengan perilaku India dalam diplomasi internasional. Ketika perang India-RRC tahun 1962 pecah dan tidak ada satupun negara Nonblok yang menyodorkan bantuan moral apalagi material kepada India sebagai salah satu negara Nonblok utama ketika itu, maka Indiapun tanpa segan-segan menerima bantuan militer Amerika Serikat.

Demikian pula halnya pada waktu India mulai ditinggalkan oleh Amerika Serikat karena yang disebut terakhir ini akan mulai mendekatannya dengan RRC, maka posisi India semakin terjepit, karena di perbatasan Barat dan Timur terletak Pakistan, serta di perbatasan



Utara terletak RRC di mana kedua negara tetangga terdekat tersebut bermusuhan dengan India.

Bukan hanya dari segi militer saja India harus melihat penempatan posisi negaranya dalam konteks diplomasi internasional, tetapi juga dari segala aspek yang menyangkut ekonomi, sosial, perdagangan, industri dan teknologi. Sebagai negara yang bertetangga dekat, kalau tidak dikatakan hampir berbatasan dengan Uni Soviet, maka banyak kepentingan yang langsung atau tidak langsung dapat menguntungkan atau merugikan India. Karena sebegitu jauh memang tidak terdapat sengketa antara India dan Uni Soviet, maka segi kemanfaatan keuntungannya adalah yang akan lebih banyak diperoleh India.

Dari segi ekonomi dan perdagangan serta teknologi, bertetangga baik dengan Uni Soviet akan banyak memberi keuntungan material. Proyek-proyek industri raksasa seperti pabrik baja Bokaro, reaktor tenaga nuklir, perakitan pesawat supersonic MIG 21 versi baru dan lain sebagainya adalah berkat kerjasama yang erat antara India dan Uni Soviet. Volume perdagangan India — Uni Soviet memberikan neraca perdagangan yang menguntungkan bagi India, dan Uni Soviet merupakan negara tujuan ekspor yang ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang. Apa saja yang tidak diekspor oleh India ke Uni Soviet, dari hasil kerajinan rakyat, makanan dan buah-buahan dalam kaleng, pakaian jadi baik untuk musim panas dan musim dingin, sampai kepada hasil-hasil industri manufakturing dan yang lebih sopistikasi.

Keterjepitan posisi India dalam bidang pertahanan dan keamanan telah memaksa India untuk memperkuat dirinya dalam bidang tersebut. India berusaha sekuat tenaga untuk berdikari dalam bidang pertahanan-keamanan, dan akhir-akhir ini dibuktikan pula bahwa ia telah lebih dari mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga ia mampu menjual persenjataan dari berbagai jenis ke negara-negara berkembang lainnya. Walaupun demikian dalam persenjataan berat, misalnya pesawat-pesawat supersonic dan sebagainya, masih harus mengandalkan pada bantuan luar negeri, terutama dari Uni Soviet.

Memuncaknya ketegangan-ketegangan di kawasan Timur Tengah, Teluk Persia, Samudera Hindia, serta Indocina akhir-akhir ini telah lebih meningkatkan kewaspadaan India untuk memperbanyak persenjataannya lagi seperti terbukti dengan direalisasikan pembelian per-

senjata mutakhir dari Uni Soviet sejumlah US\$ 1.7 milyar. Hal ini akibat logis pula dari sikap musuh bebuyutan India, yaitu Pakistan, di mana yang disebut terakhir ini terdapat adanya indikasi memperkuat pula bidang pertahanannya karena situasi Afghanistan. Sehingga selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir ini pola hubungan dua negara tetangga ini, selalu berkisar pada prinsip bahwa jika Pakistan memperkuat diri maka Indiapun harus memperkuat diri pula. Demikian pula halnya pola perang dingin tahun limapuluhan tetap berlaku, yaitu jika Amerika Serikat memperkuat posisi Pakistan, maka tidak ada alasan mengapa Uni Soviet tidak memperkuat India.

### KEPENTINGAN REGIONAL ASEAN DAN KEPENTINGAN NASIONAL INDIA

Suatu hubungan mesra sebagai pendekatan timbal-balik yang baik antara dua atau lebih banyak negara tidaklah terjadi dengan sendirinya dan hanya muncul dalam suatu ketika. Keadaan ini merupakan suatu proses yang cukup panjang, dan memerlukan pemupukan dan pemeliharaan hubungan yang terus menerus. Sehingga tidaklah sematamata terjadi bahwa suatu negara A dalam suatu periode tertentu membutuhkan bantuan atau jasa negara B, maka barulah negara A menjalin hubungan erat dengan negara B tersebut. Dalam hubungan ini maka kejadian paralel kurang lebih terjadi sekitar hubungan antara negara-negara ASEAN dengan India.

Setelah kemelut Indocina mulai muncul di permukaan arena politik Asia Tenggara, maka justru ASEAN lebih banyak berkonsultasi dan mendekati negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Selandia Baru. Keadaan ini tidak dapat dipersalahkan karena antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara Barat tersebut memang telah terjalin hubungan yang dapat dikatakan cukup mantap dalam berbagai segi, hubungan ekonomi, politik, industri, teknologi, dan bantuan militer serta ekonomi.

Memang rupanya tidak terpikir untuk mengadakan dialog dengan India sebagai negara terdekat dari ASEAN, dan yang disebut terdahulu juga sebuah negara yang mempunyai cukup pengalaman dalam ikut menyelesaikan masalah Indocina sekitar tahun enampuluhan. Namun demikian berbeda pula pada jaman pemerintahan mendiang Nehru di mana keadaan politik dalam negeri India adalah relatif lebih stabil dan



Nehru memiliki kapabilitas luar biasa dalam turut serta memecahkan persoalan-persoalan internasional. Kendati begitu tidaklah seluruhnya benar jika kita hanya membuat asumsi bahwa karena keadaan situasi politik domestik pada waktu pemerintahan transisi Morarji Desai dan Charan Singh kemudian beralih ke Indira Gandhi lagi kurang stabil maka India tidak mampu diajak turut serta dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah regional atau internasional.

Tetapi pada waktu akhir-akhir ini pihak ASEAN rupanya mengusahakan untuk juga melakukan dialog dengan India, dan alangkah kecewanya pihak ASEAN karena India hanya mengirimkan seorang Wakil Menteri Luar Negerinya saja, dengan alasan bahwa Menteri Luar Negerinya sedang sakit. Dengan tanpa melihat apakah alasan sakit atau tidaknya Menteri Luar Negeri India itu, dan tanpa berpihak kepada siapa yang salah atau siapa yang benar, maka proporsi hubungan antar negara harus kita kembalikan dulu pada kedudukannya yang wajar pula. Sebuah negara yang sebesar India dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan yang kaya, di mana sebagian besar negara-negara Asia Tenggara ikut memiliki dan mengembangkannya, sudah tentu mempunyai rasa harga diri dan kebangsaannya. Pihak India juga akan bertanya-tanya mengapa baru sekarang India didekati oleh ASEAN, sehingga akan tercermin seakan-akan pola hubungan internasional seperti dijelaskan terdahulu, bahwa jika dibutuhkan oleh ASEAN maka baru membina hubungan dengan India. Walaupun demikian sikap yang diperlihatkan oleh India adalah wajar, dan yang menjadi persoalan bagi ASEAN ialah bagaimana menggalang per-caturan diplomasi dengan India yang lebih mantap sehingga India dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan regional ASEAN.

Sistem monitoring dalam perkembangan diplomasi internasional merupakan hal yang peka dan ruwet, tetapi mutlak perlu diikuti secara cermat, dengan mempergunakan segala macam alat dan mekanisme dari yang konvensional sampai kepada yang inkonvensional dan sopistikasi, disertai/diperengkapi pula dengan para analis yang berkemampuan tinggi. Ketika pada permulaan tahun ini Indira Gandhi dalam kampanye pemilunya bertekad untuk mengakui rezim Heng Samrin, dan ternyata comittmentnya tersebut dilanjutkan setelah Indira Gandhi berkuasa kembali, maka seharusnya negara-negara ASEAN mengadakan koordinasi strategi diplomasi terhadap India.



Apakah itu berupa kerja sama antara Kepala-kepala Perwakilan Negara ASEAN di New Delhi untuk mengamati dan menganalisa bersama perilaku India terhadap rezim Heng Samrin setelah Indira Gandhi berkuasa kembali, ataukah laporan independen dari masing-masing kepala perwakilan negara-negara ASEAN, dan mungkin baru dalam taraf penggodogannya di Sekretariat Jenderal ASEAN dilakukan secara bersama-sama. Sehingga nantinya pihak ASEAN dalam menghadapi baik Vietnam dan Kampuchea sendiri, maupun India ada landasan-landasan yang kuat untuk mengajukan pendekatan dan argumentasi dalam manuver diplomasinya. Dengan demikian tindakan secara sepihak dari negara-negara ASEAN akan dapat dihindarkan apabila koordinasi kerjasama tadi dapat diwujudkan.

Dalam koordinasi kerjasama regional melalui ASEAN inilah terdapat beberapa *critical points*, di mana beberapa keputusan yang seharusnya dapat diambil dalam waktu cepat ternyata menjadi lambat, atau di mana seharusnya terdapat koordinasi kerja sama dalam menghadapi suatu masalah regional atau internasional, ternyata suara yang dikeluarkan oleh masing-masing negara ASEAN mempunyai kadar yang berbeda-beda. Ketimpangan dalam koordinasi kerjasama itu dapat saja terjadi karena unsur-unsur kelalaian atau kurang cermatnya memonitor dan kemudian menganalisa suatu peristiwa internasional, atau dapat saja terjadi karena memang ada unsur-unsur kesengajaan dari pihak luar yang tidak menginginkan kerja sama ASEAN menjadi suatu benteng kerjasama negara-negara nonkomunis yang tangguh di belahan dunia ini.

Kendatipun demikian kita harus akui bahwa dibandingkan dengan periode sebelum ASEAN berdiri, yaitu tiga belas tahun yang lalu, maka kini komunikasi antara kelima negara anggota ASEAN sudah dirasakan lebih mantap dan kuat, walaupun pada pihak lain harus pula kita akui secara jujur bahwa rasa solidaritas yang mantap masih harus tetap dibangkitkan. Misalnya pada waktu permulaan penyerbuan Vietnam ke Kampuchea tahun yang lalu, Thailand merasa dirinya terancam, bukan pertama-tama berkonsultasi dengan negara-negara ASEAN tetapi berkunjung dahulu ke Tokyo dan Washington untuk memperoleh bantuan persenjataan. Sehingga di sini dipertanyakan bahwa di manakah sebetulnya terletak solidaritas ASEAN agar kepentingan regional ASEAN dapat betul-betul terjamin.

## MASALAH DAN PROSPEK

Apa yang telah didiskusikan di muka adalah suatu pencerminan masa lampau di mana akhirnya kita sampai pada posisi berpijak dewasa ini, sehingga rangkaian peristiwa itu penting untuk kita terus ikuti untuk dapat menentukan langkah-langkah kita berikutnya di masa-masa yang akan datang.

Bagaimanapun baiknya hubungan kita dengan negara-negara sahabat yang berada jauh di Eropa atau Amerika, namun pada suatu saat kita di Asia Tenggara akan membutuhkan bantuan dan solidaritas dari negara-negara tetangga kita yang terdekat. Hubungan internasional memang tidak selamanya ada dalam keadaan statis, tetapi sebaliknya selalu ada dalam posisi dinamis dan dengan berbagai kadar yang berbobot atau ringan. Sehubungan dengan ini pula maka ucapan Lord Palmerston yang terkenal, yaitu bahwa tidak ada sahabat atau musuh yang kekal, tetapi yang ada hanya kepentingan nasional yang abadi, tetap merupakan pegangan klasik bagi para negarawan dunia umumnya.

Mengingat hal-hal tersebut di atas itulah, hubungan ASEAN-India tidaklah berhenti demikian saja karena mendapat gangguan yang disebabkan hanya semata-mata India mengakui rezim Heng Samrin. Tetapi hendaknya ditinjau lebih dalam lagi apa kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan dari diplomasi ASEAN terhadap India di masa lampau, dan upaya-upaya apa untuk memperbaikinya hubungan tersebut di masa-masa mendatang. Sebaliknya dengan lebih menekuni upaya-upaya itu kita dari negara-negara anggota ASEAN mungkin akan dapat menembus selubung diplomasi internasional India yang kadang-kadang masih belum cukup dimengerti oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

Sikap yang kurang flexible dari ASEAN yang seakan-akan berpegang erat pada prinsip: Pol Pot Yes dan Heng Samrin No, hendaknya dengan kepala yang dingin diusahakan untuk mencari pemikiran atau alternatif lain. Misalnya mungkin saja terjadi bahwa memang rezim Pol Pot walaupun dengan dukungan RRC tidak sanggup untuk berkuasa kembali di Kampuchea, tetapi sebaliknya Heng Samrinlah yang bertahan untuk tahun-tahun mendatang, dengan atau tanpa dukungan Vietnam. Dalam situasi yang demikian tersebut tindakan-tindakan apa

yang harus dilakukan oleh ASEAN baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Sikap India bagi ASEAN merupakan hal yang seakan-akan *fait accompli*, sedangkan sebaliknya jika ASEAN hanya melontarkan kecaman-kecaman dan kekecewaan terhadap India, apakah itu sudah dapat memecahkan persoalan dasar mengenai Kampuchea?

Dalam diplomasi internasional justru sikap kepala dingin dan tidak lekas terjebak oleh perasaan-perasaan emosional yang akhirnya akan membawa kita pada pikiran dan tindakan yang lebih rasional. Karena itu sekarang telah menjadi kenyataan bahwa India mengakui rezim Heng Samrin, maka langkah berikutnya ialah bagaimana memanfaatkan kedudukan India untuk kepentingan regional ASEAN, tidak hanya mengenai masalah Kampuchea, tetapi juga mengenai masalah Afghanistan, Teluk Persia, Timur Tengah, maupun Samudera Hindia.

Pada dewasa ini yang paling penting yang harus mendapat perhatian seketika ialah bagaimana agar Thailand tidak akan merupakan sasaran berikutnya dari nafsu agresi Vietnam. Dan dalam konteks ini peranan apa yang bisa dilakukan oleh India dan dapat dimanfaatkan oleh ASEAN.

Demikian kiranya berbagai alternatif tindakan dari yang paling lunak sampai yang sedang dan radikal harus selalu dipersiapkan jauh-jauh dalam menerobos gelanggang diplomasi internasional yang semakin lama semakin multikompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih cermat, hati-hati, teliti sehingga hasil maksimum dapat kita capai. Untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki diperlukan pengerahan tenaga yang memiliki kemampuan tinggi, sehingga ia tidak hanya sekedar mengandalkan pada diplomasi konvensional dan tradisional saja (dalam diplomasi), tetapi harus dicari inovasi-inovasi baru dan yang inkonvensional, sehingga dapat melancarkan pemecahan-pemecahan masalah internasional yang sulit itu.



# PERSETUJUAN PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NIUGINI

R.S. ROOSMAN

Dengan diberinya kemerdekaan dari tangan Australia pada tanggal 16 September 1975, Papua New Guinea atau Papua Niugini — disingkat PNG — memasuki fase baru dalam diplomasi politik dengan Indonesia. Dengan mewarisi masalah-masalah — terutama gerakan OPM di Irian Jaya yang suka mempergunakan perbatasan sebagai suaka, dan dengan mengalirnya pelarian dari Irian Jaya semenjak tahun 1963 — mau tak mau maka PNG terlibat dalam masalah internasional yang rawan dengan tetangganya, ialah persoalan perbatasan.

Semula para pemimpin PNG — terpengaruh oleh suara-suara kalangan-kalangan tertentu di PNG yang menunjukkan simpatinya terhadap "nasib saudara-saudara serumpun mereka di sebelah sana perbatasan", "seakan-akan tak tahu bagaimana harus menentukan sikap mereka". Mula-mula mereka lebih condong memihak kalangan-kalangan tersebut. Nyatalah api yang menimbulkan sentimen anti Indonesia di PNG sering membara karena dikipasi oleh golongan pelarian yang telah lama bermukim di PNG. Demikian pula oleh kalangan akademis dengan didalangi oleh sementara dosen soshal pada University of Papua New Guinea (UPNG) yang didatangkan dari Australia, New Zealand dan negara-negara Barat lainnya dan ternyata berhaluan kekiri-kirian.

Terutama disebabkan oleh peristiwa-peristiwa politik akhir-akhir ini yang terjadi di sekitar wilayah ASEAN, maka Indonesia — dalam kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap tetangga-tetangganya — lebih condong memberikan prioritas kepada ASEAN daripada PNG,

"pintu belakangnya". Sementara penjagaan "pintu belakang" ini tak dilalaikan pula dengan menempatkan kurang lebih dua puluh lima ribu tentara di Irian Jaya.

Gerakan OPM mengusik Pemerintah Indonesia dalam usaha mengkonsolidasi pemerintahannya dan pembangunannya di Irian Jaya. Gerakan OPM dianggap pemberontakan melawan negara, maka terlarang di Indonesia. Namun hingga akhir tahun 1978 gembong-gembongnya masih diperkenankan keluar-masuk PNG, malahan berembuk dengan para pemimpin Pemerintah PNG perihal "kemungkinan-kemungkinan berdamai dengan Pemerintah Indonesia". Bagi Indonesia hal serupa ini sukar dapat diterima, apalagi setelah Pemerintah PNG mengetahui benar-benar, bagaimana pendirian Indonesia itu.

Melihat sikap para pemimpin PNG yang tak menentu, dan demi "stabilitas politik" di daerah perbatasan itulah, maka Indonesia berusaha untuk minta perumusan yang lebih tegas dari pihak PNG mengenai soal perbatasan. Jika seandainya sentimen anti-Indonesia di PNG sampai merembes ke kalangan tokoh-tokoh pemerintahan, maka keadaan semacam ini akan merupakan ujian kepada toleransi pihak Indonesia, karena mungkin akan dianggap "membahayakan stabilitas politik" di daerah itu. Yang rupa-rupanya dimaksudkan oleh Indonesia dengan "stabilitas politik" adalah adanya satu negara PNG yang kuat, bersatu, dan pro-Indonesia. Maka gerakan separatis, seperti "Papua Besena" yang dipimpin oleh Miss Josephine Abaijah — yang mau melepaskan Papua dari PNG — senantiasa dicurigai oleh kaum berpolitik di Jakarta, karena dikuatirkan akan melemahkan kesatuan ini. Menilik ucapan-ucapan pemimpin "Papua Besena" (artinya: "Papua, inilah tanahku") ini pernah diutarakannya, bahwa "lebih baik PNG berorientasi kepada Indonesia daripada kepada Australia — suatu negara Barat yang teramat majunya". Disarankannya pula supaya "PNG bergabung saja dengan Indonesia", tetapi tak pernah pikirannya ini dianggap serius, baik oleh umum di PNG maupun oleh pihak Indonesia sendiri, karena pertimbangan politik. Pernah Jakarta risaukan pula persoalan Bougainville — di mana terdapat tambang tembaga yang menghasilkan 30% dari anggaran belanja nasional PNG — yang dahulunya hendak melepaskan diri juga dari kesatuan PNG, tetapi dengan cepat dan bijaksana dapat diselesaikan oleh bekas PM Somare.

Maka bisa dimengerti mengapa usaha pertama yang diutamakan untuk meletakkan dasar hubungan baik antara kedua negara itu berupa menyelesaikan persoalan tentang persetujuan perbatasan (border agreement). Para pemimpin PNG akhirnya menyadari, bahwa kepentingan nasional harus didahulukan, sebagaimana pernah diucapkan oleh seorang tokoh Pemerintah PNG: "Buat apa kepentingan rakyat kita yang berjumlah tiga juta itu harus dikorbankan, karena sekelompok kecil pelarian saja?" (Diperkirakan ada 5.000 orang pelarian di PNG).

Bagi PNG yang angkatan bersenjatanya hanya terdiri dari paling banyak 3.000 — 5.000 tentara Pacific Islands Regiment saja, pertahanannya masih sangat tergantung dari bantuan dari luar, maka — sadar akan kemampuannya sendiri — politik yang lebih realistis kemudian mereka tempuh dalam hubungan mereka dengan Indonesia.

PNG telah menyatakan "universalisme" sebagai filsafat negaranya yang oleh Sir Maori Kiki — bekas Menteri Luar Negeri dan Perdagangan PNG — diucapkan di hadapan Majelis Umum PBB pada tanggal 17 September 1976 sebagai berikut:

"Universalisme berarti mengambil jalan tengah tanpa membelok ke kiri ataupun ke kanan mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ideologi politik, kepercayaan ataupun sistem pemerintahan yang berlainan. Kami memandangnya sebagai kebijaksanaan yang seimbang, maka secara demikian PNG tidak akan mempunyai musuh."

Apakah filsafat "universalisme" dalam dunia sekarang ini di mana negara-negara suka blok-blok, dan terang tampak ada kecondongan untuk membentuk pengelompokan-pengelompokan regional — akhirnya dapat dipertahankan oleh negara kecil seperti PNG, inilah yang menjadi pertanyaan.

Namun dalam politik luar negerinya PNG berhati-hati, buktinya dengan tegas menolak diadakannya Kedutaan Rusia dan RRC di ibukota Port Moresby, berhubungan "PNG tak mampu menyediakan tempat beserta fasilitasnya". Segala gerak-gerik Rusia di daerah Pasifik Selatan selalu diamat-amati oleh Australia, Inggris, Selandia Baru dan Amerika yang kesemuanya mempunyai kepentingannya masing-masing, dan memegang peranan penting di kawasan Pasifik Selatan.

Sejak semula PNG berorientasi ke daerah Pasifik Selatan, dan bekas Perdana Menteri Somare sendiri memberi identitas kepada negerinya sebagai negara Pasifik; secara diplomatik ia sering



menyebutkan negaranya sebagai "jembatan antara Pasifik Selatan dan Asia". Dalam pengelompokan regional, serentak menjadi merdeka maka PNG masuk menjadi anggota South Pacific Forum (SPF), ialah persatuan kerja sama regional yang terdiri dari negara-negara mini di Pasifik Selatan. Dalam SPF ini PNG muncul sebagai anggota yang paling banyak penduduknya (tiga juta), lagi pula dalam banyak bidang yang paling maju. Selalu dipersoalkan oleh kalangan berpölitik di Port Moresby, apakah tidak sebaiknya PNG masuk ASEAN juga. Ada pertimbangan, bahwa sebagai anggota penuh PNG bisa memegang peranan utama dalam SPF dengan mendapat tempat terhormat dan suaranya didengar, sedangkan kalau PNG masuk ASEAN, di mana ia mendapat kedudukan sebagai observer saja, halnya akan berlainan.

Aliansi PNG dalam SPF ini terutama bersifat idealistis, dan dalam perumusannya merupakan kerja sama dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam prakteknya, secara ekonomis PNG tidak mendapat keuntungan dari keanggotaannya di SPF. Hubungan ekonomi yang terbanyak ialah dengan Asia, terutama Jepang. Pengimporan barang keperluan sehari-hari yang sudah jadi berlangsung ke PNG dari negara-negara Asia, ialah dari RRC (via Hongkong), Taiwan, Korea, Jepang, Pilipina, Malaysia, Thailand dan Singapura. Hubungan perdagangan langsung dengan Indonesia rupanya belum berjalan, biasanya barang-barang buatan Indonesia sampai ke PNG lewat Singapura. Dibandingkan dengan impor dari Australia yang memborong 40% dari semua impor ke PNG, impor dari negara-negara Asia tersebut boleh dikatakan kecil.

Dalam bidang sosial-budaya ada sedikit pertukaran delegasi-delegasi pemerintahan, mahasiswa, olahraga dan kesenian antara PNG dengan anggota-anggota SPF lainnya. Yang penting dalam pengelompokan regional ini ialah membentuk perasaan bersatu dan senasib dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya untuk menyatupadukan suaranya terhadap masalah-masalah yang menyinggung kepentingan bersama, misalnya dengan serentak menentang percobaan-percobaan nuklir oleh Perancis di Kepulauan Polynesia Perancis, mempercepat proses dekolonisasi untuk daerah Kaledoni Perancis dan New Hebrides, dan melindungi kepentingan perikanan negara-negara Pasifik Selatan dengan menentukan 200 mil perbatasan perairan mereka masing-masing.

Adapun mengenai hubungan Indonesia dengan PNG, sebelum kemerdekaan PNG telah diadakan pendekatan pada tingkat pemerintah dengan mengirimkan rombongan Parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Isnaeni. Itulah pertama kali suatu delegasi Indonesia bertemu dengan Michael Somare dan pemimpin-pemimpin PNG lainnya. Setelah PNG menerima kemerdekaannya dalam tahun 1975, saling berkunjung oleh pejabat-pejabat tinggi, termasuk perdana menteri, menteri-menteri dan pejabat-pejabat lainnya, seolah-olah menjadi rutin. Pada akhir tahun 1979 datang pula rombongan Kadin (Kamar Dagang Indonesia) dari Jayapura ke Port Moresby. Banyak pejabat PNG telah diundang melawat ke Jakarta untuk meninjau, atau mendapat kursus dalam berbagai bidang. Oleh pihak Indonesia telah banyak diikhtiarkan untuk memupuk goodwill di kalangan pemerintah maupun rakyat PNG, misalnya dengan mengirimkan rombongan-rombongan kesenian dan olahraga. Undangan-undangan serta penjamuan semua tamu-tamu ini dan pengiriman rombongan-rombongan menelan biaya banyak sekali bagi Indonesia, dan sudah selayaknyalah kita ingin melihat hasil pengeluaran uang negara yang begitu banyak itu berupa imbalan dari pihak sana. Namun dari pihak PNG belum tampak ada usaha timbal-balik semacam itu.

Adalah menarik sekali mengikuti perbincangan mengenai "Rencana Persetujuan Perbatasan" yang diadakan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan PNG Mr. Ebia Olewale, dengan mengambil beberapa bagian dari pernyataan mereka bersama (Joint Ministerial Statement) yang dikeluarkan selama kunjungan Prof. Mochtar ke Port Moresby, dari tanggal 11-14 Desember 1978:

"Kedua menteri menunjuk kepada pernyataan menteri bersama yang dibuat pada bulan Mei, dan menyatakan kesungguhan hati mereka agar perjanjian kerja sama yang mereka buat itu dilaksanakan dalam suatu bentuk yang praktis dan konkrit. Untuk keperluan ini maka kedua menteri setuju bahwa sekarang tibalah waktunya untuk memajukan perdagangan langsung antara kedua negara, dan mencatat bahwa sebagai langkah pertama hendaknya perdagangan dimajukan antara Irian Jaya dengan propinsi-propinsi PNG yang sebelah-menyebelah dengan Irian Jaya. Secara resmi Menteri Luar Negeri Indonesia menawarkan bermacam-macam bantuan teknis kepada Pemerintah PNG yang mungkin dapat berguna bagi PNG, seperti Keluarga Berencana, perikanan dan peternakan."

Sekedar komentar perlu diberi sebagai berikut: Kesulitan dengan perdagangan langsung antara Irian Jaya dengan propinsi-propinsi barat PNG ialah menyangkut berbagai persoalan. Pertama, Irian Jaya dan



PNG memproduksi barang-barang yang sama, dan kedua-duanya mendasarkan ekonominya pada ekspor ke luar daerah/negeri. Tak ada barang yang dihasilkan di Irian Jaya, yang tak bisa didapatkan di daerah PNG, kecuali minyak tanah (petroleum) yang sampai sekarang belum diketemukan di daerah PNG. Mungkin Irian Jaya hanya bisa menyaingi PNG dengan mencatat harga-harganya yang lebih rendah. Kedua, soal pengangkutan lewat darai — yang di kedua belah perbatasan hampir tidak ada jalannya antara PNG dan Irian Jaya, semua pengangkutan harus lewat laut ataupun udara. Ketiga, mungkin dari pihak PNG perdagangan lebih mudah terlaksana daripada dari pihak Irian Jaya — yang sebagai propinsi selalu memerlukan "clearance" dari pusat Jakarta yang jauh jaraknya dan makan banyak waktu. Kesulitan ini mengenai persoalan administrasi dan birokrasi semata-mata. Kesukaran yang terakhir ialah mengenai soal kesanggupan dan kerelaan para komandan ketentaraan dan badan keamanan di Irian Jaya untuk meredakan sedikit ketegangan yang terdapat di Irian Jaya berhubungan dengan kesiapsiagaan dan penjagaan yang amat ketatnya, karena di mana-mana dicurigai aktivitas OPM. Dalam suasana yang demikian ini amat sukar melaksanakan perdagangan bebas (free trade).

Dalam soal bantuan dalam bidang perikanan dan peternakan Indonesia masih bisa mengulurkan tangannya, tetapi dalam family planning Indonesia sendiri belum berhasil menekan peledakan kependudukannya yang masih  $2\frac{1}{2}\%$  setahun tambahannya dengan segala usaha Keluarga Berencananya, sedang PNG mempunyai wilayah seluas Perancis — yang umumnya subur dan banyak belum digarap, lagi penduduknya hanya berjumlah 3 juta orang.

Selanjutnya teks "Joint Ministerial Statement" mengungkapkan:

"Kedua menteri memperhatikan keadaan sekarang ini mengenai penentuan perbatasan antara kedua negara sehubungan dengan tanah, laut dan dasar laut (seabed). Mereka memperhatikan pula pandangan kedua pemerintah mereka, bahwa perbatasan ini telah ditetapkan dengan persetujuan pada tahun-tahun 1971 dan 1973 yang diselesaikan oleh Indonesia dan Australia.

Kedua menteri memperhatikan, bahwa perlu diadakan suatu persetujuan terakhir mengenai sebagian perbatasan laut dan dasar laut di sebelah utara Pulau Irian (New Guinea) yang pada dasarnya telah disetujui dalam persetujuan tahun 1971. Telah disetujui pula, bahwa para pejabat akan bertemu dalam bulan-bulan yang datang ini untuk melaksanakan hal ini.

Kedua menteri memperhatikan pula, bahwa soal-soal administratif tertentu mengenai perbatasan telah menjadi pokok persetujuan yang telah berlaku pada tahun 1974 yang dibuat oleh Indonesia di satu pihak dan Australia di pihak lain atas nama pemerintahnya dan atas nama Pemerintah PNG. Kedua menteri menyatakan pandangannya bahwa persetujuan ini bersifat sementara sekedar untuk menghadapi keadaan waktu itu. Sekarang persetujuan ini



harus ditinjau kembali, seperti dituntut ketentuan-ketentuannya, dengan maksud untuk menggantinya dengan persetujuan baru yang akan dirundingkan dalam hubungannya dengan pengalaman-pengalaman sejak tahun 1974, serta untuk memenuhi keperluan-keperluan situasi sekarang ini.

Mr. Olewale menerangkan kepada Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa usul-usul tertentu sedang diolah untuk mempergunakan Sungai Fly selaku sarana pengangkutan untuk melayani proyek pertambangan Ok Tedi. Walaupun belum diambil keputusan terakhir mengenai proyek ini, teranglah sudah, bahwa jikalau proyek ini diteruskan — pemakaian sungai ini sebagai sarana sungai (waterway) akan merupakan hal yang sangat penting. Telah disetujui, bahwa pemerintah kedua negara akan saling minta nasihat dan bekerja sama mengenai tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencegah pencemaran (pollution) sungai ini dan mempermudah pelayaran sepanjang sungai.

Diperhatikan pula bahwa perlu diadakan survei untuk penentuan perbatasan secara fisik. Ahli-ahli perpetaan harus berunding untuk menentukan cara-cara yang terbaik untuk menentukan hal ini.

Dalam garis besarnya Mr. Olewale memberikan kepada rekannya dari Indonesia suatu gambaran daripada tindakan-tindakan yang telah diambil oleh PNG untuk menetapkan 200 mil daerah perikanannya beserta kebijaksanaan PNG mengenai pengelolaan sumber-sumber daya hayati (living resources) dalam zonanya. Prof. Mochtar Kusumaatmadja menerangkan, bahwa Indonesia di kelak kemudian hari akan mempunyai daerah 200 milnya sendiri. Kedua menteri mencatat bahwa pada sebaiknya kedua pemerintah bekerja sama dalam pelestarian dan pengelolaan sumber-sumber daya perikanan dalam daerah kekuasaan hukum (jurisdiction) mereka masing-masing, terutama mengenai persediaan (stock) ikan cakalang (tuna) yang mungkin mengikuti pola berpindah-pindah (migratory pattern) melintasi zone-zone yang sebelah-menyebelah.

Mr. Olewale memberi gambaran kepada rekannya dari Indonesia mengenai perkembangan-perkembangan yang telah berlangsung ke arah pembentukan suatu South Pacific Regional Fisheries Agency. Prof. Mochtar Kusumaatmadja menaruh perhatian atas informasi ini.

Mr. Olewale mengatakan, bahwa PNG mungkin akan melanjutkan penerapan rezim sistem kepulauan (archipelagic regime) pada tahun 1979. Dikatakannya bahwa berbuat demikian PNG akan berusaha membuat ketentuan yang memadai (adequate provision) mengenai hak-hak lalu lintas (transit rights) bagi kapal-kapal serta pesawat-pesawat terbang asing, sesuai dengan garis-garis yang telah disarankan dalam teks yang dibuat pada Konperensi Hukum Laut. Kedua menteri menunjukkan kepuasannya, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai negara-negara kepulauan ternyata telah diterima sepenuhnya pada konperensi tersebut. Prof. Mochtar Kusumaatmadja berkata, bahwa Indonesia akan bersenang hati memberikan kepada PNG hasil-hasil pengalamannya memajukan pengertian perairan kepulauan (archipelagic waters), suatu pengertian yang diajukan oleh Indonesia pada tahun 1960."

Bagian teks yang berikutnya ini mengenai persoalan daerah perbatasan yang begitu rawan itu, terutama mengenai pelintasan perbatasan serta penggunaan perbatasan untuk suaka oleh oknum-oknum yang anti-Indonesia (yang terutama dimaksudkan di sini ialah OPM). Sementara itu, kepentingan penduduk setempat — yang sudah bergenerasi-generasi menjadi penghuni daerah perbatasan itu diprioritaskan, untuk saling berkunjung sanak-saudaranya ataupun mencari penghidupan sehari-hari, secara berladang ataupun berburu binatang hutan. Konon kabarnya oleh petugas setempat mereka

diberikan kartu nama, supaya mudah dikontrol oleh patroli-patroli perbatasan.

"Sebelum mengakhiri pertukaran pikiran mereka mengenai perkara-perkara bilateral (bilateral matters), kedua menteri mengatakan dengan kepuasan yang besar, bahwa adanya perbatasan bersama dan persoalan orang-orang yang melintasi perbatasan tidak akan lagi dibiarkan menjadi sumber gesekan antara kedua negara."

**Kemudian:**

"Mr. Olewale mengulangi, bahwa Pemerintah PNG berniat menjaga jangan sampai wilayahnya dipergunakan sebagai tempat suaka oleh unsur-unsur yang memusuhi Indonesia. Kedua menteri setuju, bahwa dalam merencanakan peraturan-peraturan baru mengenai perbatasan, prioritas pertama haruslah kesejahteraan penduduk tradisional yang hidup di daerah itu."

Selanjutnya pihak Indonesia memberikan penjelasan mengenai pengelompokan regional ASEAN yang rupanya diutamakan oleh Indonesia:

"Dengan mengalihkan pembicaraannya kepada isu-insu regional, Prof. Mochtar Kusumaatmadja memberikan keterangan yang terperinci mengenai tujuan-tujuan dan cara-cara bagaimana ASEAN itu bekerja. Dikatakannya bahwa akan diakui negara-negara ASEAN secara ekonomis tergolong salah satu daerah yang berkembang paling cepat di dunia. Dia menyatakan keyakinannya bahwa perhimpunan ini akan bekerja secara efektif untuk memenuhi keperluan kawasan dan penduduknya. Dikatakannya pula bahwa ASEAN merupakan salah satu dasar (cornerstone) politik luar negeri Indonesia."

Pihak PNG menyambutnya dengan keterangan tentang pengelompokannya dengan SPF dan SPEC (South Pacific Bureau for Economic Co-operation):

"Mr. Olewale menjawab dengan memberikan suatu ikhtisar mengenai keterlibatan (involvement) PNG dalam soal-soal Pasifik, dan perkembangan Forum (South Pacific Forum) serta South Pacific Economic Community (SPEC = Masyarakat Ekonomi Pasifik Selatan) sebagai tujuan-tujuan utama (focal points) daripada solidaritas (solidarity) yang sedang berkembang di kawasan Pasifik Selatan. Dia menyebutkan harapan PNG, bahwa proses dekolonisasi akan berjalan terus di seluruh kawasan Pasifik. Kedua menteri menyatakan saling pengertian mereka — selaku tetangga yang dekat — mengenai peranan yang dimainkan mereka di daerah masing-masing."

Akhirnya Prof. Mochtar mengungkapkan tentang perkembangan-perkembangan di Asia Tenggara belakangan ini, di mana dipergunakannya istilah-istilah "Balance and Stability":

"Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Mr. Olewale menaruh perhatian — menjelaskan pandangan Indonesia tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi di Asia Tenggara baru-baru ini, dan implikasi-implikasinya bagi keseimbangan dan stabilitas dalam daerah yang lebih luas lagi, yang diharapkan oleh kedua negara dapat dipertahankan."

Perkembangan selanjutnya dapatlah kita lihat dalam suatu "Press Release No. M 92/97, tertanggal 18 Oktober 1979" yang dikeluarkan



oleh "Department of Foreign Affairs and Trade, Central Government Offices, Waigani" — yakni Departemen Luar Negeri PNG di Port Moresby — yang berjudul "Joint Statement by Delegation Leaders at the Third Round of Talks between Indonesia and Papua New Guinea on the Review of the Treaty on their Common Border" yang dimuat di sini dengan seluruhnya:

"Naskah persetujuan baru antara Indonesia dan PNG mengenai administrasi perbatasan bersama mereka diparaf oleh para pemimpin delegasi di Port Moresby hari ini. Perundingan yang ketiga kalinya ini dilangsungkan dalam suasana persahabatan dan kerja sama seperti halnya dengan kedua perundingan yang sebelumnya itu di Jakarta dan Port Moresby pada tahun ini juga. Perundingan menghasilkan suatu rancangan persetujuan (draft agreement) yang sekarang dengan lebih wajar (more properly) mengungkapkan meningkatnya pengertian dan persaudaraan yang terdapat antara PNG dan Indonesia, dan keinginan kedua negara untuk bekerja sama dalam pemerintahan dan pembangunan daerah perbatasan untuk kepentingan penduduk yang tinggal di daerah situ. Persetujuan ini diharapkan akan ditandatangani tahun ini juga, dan akan mulai berlaku setelah diratifikasi, sesuai dengan syarat-syarat konstitusional negara masing-masing. Beberapa di antara pokok-pokok utama yang tercakup dalam persetujuan ini adalah:

- Pelestarian (preservation) hak-hak adat oleh penduduk daerah perbatasan untuk melintasi perbatasan guna maksud-maksud tradisional;
- Kerja sama untuk mengembangkan daerah perbatasan dengan titik beratnya diletakkanlah terutama pada pengembangan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya dengan mengingat, bahwa daerah perbatasan adalah jauh letaknya dari pusat-pusat utama (main centres) kedua negara dan memerlukan perhatian yang istimewa;
- Memperbaiki (up grade) pengawasan Karantina dan kesehatan di perbatasan, selama ada pembangunan guna mencegah jangan sampai persoalan-persoalan di wilayahnya masing-masing dipindahkan ke bagian daerah perbatasan pihak yang lain;
- Mendirikan perhubungan lintas perbatasan yang lebih baik, termasuk perhubungan udara yang lebih baik;
- Memperbaiki prosedur-prosedur hubungan (liaison procedures) untuk menangani administrasi perbatasan secara rutin;
- Pelayaran bebas di Sungai Fly dan pemakaian sungai-sungai perbatasan lainnya untuk perkembangan nasional negara masing-masing, termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas pelayaran;
- Membentuk Komisi Perbatasan Bersama untuk menjamin implimentasi persetujuan secara efektif.

Perundingan dilangsungkan juga mengenai rancangan persetujuan (draft agreement) untuk perbatasan laut dan dasar laut (seabed) di daerah sebelah utara Pulau New Guinea (Irian). Diharapkan bahwa persetujuan ini akan diselesaikan di waktu yang dekat."

Pada bulan Juni 1979 persaudaraan antara kedua bangsa diresmikan dengan kedatangan Presiden Soeharto di Port Moresby. Mengingat di ibukota PNG ada kelompok-kelompok yang kurang suka kepada Indonesia, maka persiapan keamanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah PNG tidak tanggung-tanggung. Sebuah mobil kebal peluru



diterbangkan dari Australia dengan ongkos 1 juta Kina (K sama dengan Rp. 1 milyar), 4 buah helikopter beterbangan di atas dan sekitar Jackson airport sewaktu rombongan Presiden mendarat, dan pada setiap 50 meter di sepanjang jalan yang dilalui rombongan ditempatkan seorang prajurit PNG.

Hal penting yang sementara itu dapat kita lihat ialah pembangunan di daerah perbatasan masing-masing. Sejak beberapa tahun berselang PNG telah mulai dengan pembangunan daerah perbatasannya dengan membuka proyek-proyek pertanian, antara lain persawahan padi di sebelah utara. Untuk tahun 1979 telah didrop uang K 900.000 (= Rp. 900 juta) untuk pembangunan pertanian di sepanjang perbatasannya, sedangkan untuk tahun 1980 telah disediakan uang K 1,45 juta. Sampai di mana usaha Indonesia yang paralel telah dilakukan, hal ini masih belum diketahui. Menurut keterangan seorang tokoh DPRD di Jayapura yang diucapkannya kepada saya pada bulan Nopember 1979, pembangunan sebuah jalan di sepanjang perbatasan dipertimbangkan, tetapi karena penghuninya amat sedikit — diperkirakan hanya berjumlah 10 ribu orang yang hidupnya tersebar dalam kelompok-kelompok kecil, maka efektifnya rencana ini disangsikan, dan idenya dibatalkan.

Selama ini yang telah dikerjakan oleh pemerintah daerah Irian Jaya sejak beberapa lama ialah latihan Pelopor Pembangunan dengan melatih putera-putera daerah, yang berasal dari daerah perbatasan, beberapa kepandaian bercocok tanam dan mengirimkan mereka kembali ke desanya masing-masing dengan membekali mereka beberapa alat pertanian. Tetapi usaha ini masih dilakukan secara kecil-kecilan. Setahu saya, usaha ekonomi lainnya yang sedang dilakukan di daerah perbatasan Irian Jaya ialah yang sedang dilakukan di daerah perbatasan Irian Jaya ialah usaha produksi dan pemasaran karet di daerah dekat Mindiptana, Kabupaten Merauke. Pohon-pohon karet yang ditanam oleh Belanda sebelum Perang Dunia II dan selanjutnya tumbuh dengan leluasa dan tidak terganggu, sekarang matang untuk disadap. Persoalannya dahulu ialah pemasarannya. Sekarang soal ini serta pengangkutannya telah dapat diselesaikan dan putera daerah — kebanyakan dari suku Muyu yang berdiam di daerah perkebunan getah itu — dapat menikmati hasilnya.

Di hari-hari mendatang ini yang akan sangat berpengaruh kepada perkembangan di perbatasan adalah pertambangan Ok Tedi yang terletak di wilayah PNG. Lokasinya di Star Mountains yang merupakan kelanjutan daripada gugusan pegunungan yang membujur barat-timur di tengah-tengah Irian Jaya, maka Ok Tedi — serupa

dengan Tembagapura (Ertsberg) di Irian Jaya merupakan gumpalan raksasa yang mengandung bijih-bijih emas dan tembaga. Penyelidikannya telah selesai, hanya tinggal menanti produksi saja. Bilamana mesin perusahaan pertambangan Ok Tedi sudah mulai berputar, pasti akan menyedot banyak pegawai, kaum teknik dan buruh dari mana-mana, terutama dari PNG sendiri. Karena letaknya dekat perbatasan, maka pasti akan menarik tenaga pekerja dari daerah Irian Jaya pula. Apalagi bagi penghuni pedalaman sekitar Ok Tedi ini adalah satu-satunya cara untuk mencari uang dan menambah penghasilan. Tetapi juga dari lain daerah Irian Jaya — di mana pencarian hidup menjadi semakin sulit bagi putra daerah — orang akan mencoba untuk datang ke Ok Tedi dengan melintasi perbatasan. Apalagi dalam fase pertama pembangunan di mana perusahaan pertambangan raksasa ini akan memerlukan banyak tenaga kasar. Daerah sekitar Ok Tedi akan terbawa dari jaman purbakala ke abad 20 dalam ekonomi uang (money economy) yang akan mempunyai rupa-rupa akibat (repercussions) pada kehidupan penduduk setempat. Kesemuanya ini akan mengakibatkan terjadinya suatu "economic and social disequilibrium" (ketidakseimbangan ekonomi dan sosial) antara daerah perbatasan sebelah PNG dan sebelah Indonesia.

Ok Tedi hanya merupakan salah satu proyek pembangunan perbatasan. Secara keseluruhan Pemerintah PNG rupanya dengan tidak tanggung-tanggung hendak membangun perbatasannya. Menurut "Post-Courier", surat kabar yang terpenting di PNG tertanggal 6 Desember 1979 pada halaman 10 disebutkan, bahwa "Pemerintah PNG mempunyai rencana membelanjakan hampir K 4,5 juta untuk 4 tahun yang mendatang ini (1980—1984) untuk membangun fasilitas-fasilitas dan jasa-jasa (services) di daerahnya yang berbatasan dengan Irian Jaya". Untuk 1980 dialokasikan K 1,45 juta: K 796.000 untuk proyek-proyek di West Sepik Province, dan K 614.000 di Western Province. Kedua propinsi ini sebelah-menyebelah dengan Irian Jaya. K 40.000 dialokasikan kepada Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan yang mengkoordinasi programnya.

Menurut surat kabar tersebut "Rencana 1980 akan meliputi pembuatan jalan, perumahan di luar kota, dana-dana patroli, pengangkutan, perhubungan, prasarana karet dan perikanan, perahu untuk Sungai Sepik, sumur-sumur air dan suplai medis". NPEP (National Public Expenditure Plan, ialah Badan Pemerintah untuk pembelanjaan Uang Negara) — demikianlah "Post-Courier" selanjutnya, menyatakan "Strategi dasar yang telah diterima untuk program pembangunan daerah perbatasan ialah pertama membangun



praminimum untuk pemerintah dan pembangunan ekonomi, dan kemudian memberikan bantuan yang luas kepada kegiatan-kegiatan agro-ekonomi dan pencegahan penyakit-penyakit", kemudian, "salah satu dari tujuan rencana itu ialah menjamin agar supaya pembangunan di kedua sisi perbatasan berimbang guna memperkecil risiko arus pengungsi yang besar dan kegiatan pembangkangan. Rencana ini akan berkisar pada keamanan, kesehatan dan karantina dalam keadaan daerah perbatasan yang terbuka".

Perlu dicatat di sini, bahwa kelak arus manusia yang datang dari mana-mana dari Irian Jaya — yang ingin mencari pekerjaan di sebelah PNG, tidak mungkin dapat dibendung dengan pos-pos penjagaan dan peraturan-peraturan saja, dan Indonesia akan menghadapi tugas yang maha sukar untuk mencegah jangan sampai hal yang demikian itu terjadi, jikalau "perkembangan di kedua belah pihak perbatasan tidak berlangsung secara seimbang".

Betapa luasnya proyek-proyek pembangunan — yang akan dilangsungkan oleh PNG di daerah perbatasannya ini, terungkaplah dalam surat kabar "Post-Courier" tersebut sebagai berikut:

"Rencana ini menyebutkan, bahwa salah satu dari tujuan-tujuan program pembangunan ialah mempersiapkan penduduk untuk kemungkinan pengembangan sumber-sumber daya utama, seperti kayu di Vanim, tembaga di Tifalmin, Busilmin, Frieda dan Ok Tedi.

Paling tidak tiga tahun kerja — pada tingkat 1980 yang telah disarankan — akan diperlukan untuk mencapai terlaksananya pemerintahan dengan kapasitas untuk memerintah dan mengembangkan daerah perbatasan secara efektif."

Mungkinkah pembangunan daerah perbatasan PNG ini merupakan jawaban PNG terhadap usaha Repelita yang sekarang sudah masuk tahap ketiganya? Ataukah usaha PNG ini merupakan tantangan bagi pihak Indonesia untuk juga ikut membangun daerah perbatasannya yang sampai sekarang kurang diperhatikan?

Menilik proporsi pembangunan oleh PNG — dibandingkan dengan kenyataan sekarang di perbatasan sebelah Indonesia — dalam tiga tahun yang mendatang ini, kita akan melihat "economic and social disequilibrium" antara daerah perbatasan PNG dan Indonesia semakin membesar — suatu hal yang akan kurang menguntungkan bagi Indonesia, jikalau Indonesia sendiri tidak berusaha untuk mengatasi "disequilibrium" ini dengan usaha-usaha yang sebanding.

Malahan ada kemungkinan besar, bahwa akhirnya akibat perkembangan ekonomi-sosial yang sepihak, stabilitas politik di daerah perbatasan ini menjadi terganggu pula.



# HUBUNGAN PERDAGANGAN JEPANG-ASEAN: BEBERAPA MASA- LAH DAN PROSPEK\*

J. PANGLAYKIM

Dalam artikelnya yang berjudul "Impact of Trade Policies on the World Economy" di *The World Economy 1977*, Harald B. Malmgren yakin bahwa dalam peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi dunia serta pengaruh mereka terhadap neraca pembayaran, masalah yang utama adalah bagaimana setiap ekonomi dapat meningkatkan volume perdagangan internasionalnya.

Mengenai negara-negara yang digolongkan sebagai peminjam dana dunia — negara-negara yang sedang membangun dan negara-negara tanpa sumber minyak — peningkatan perdagangan internasional negara-negara tersebut harus disesuaikan dengan besarnya kemampuan mereka untuk membayar kembali hutang-hutang sesuai dengan daftar yang ditetapkan oleh negara-negara yang mensuplai dana tersebut. Rasio pelunasan hutang (debt service ratio) biasanya menunjukkan besarnya kepercayaan (credibility) negara peminjam di mata negara yang memberi pinjaman.

Dalam hal negara-negara industri yang sedang mengalami inflasi, peningkatan pengangguran, dan penurunan kebutuhan serta produksi di bawah kapasitas, perdagangan haruslah dilihat sebagai lokomotif yang menarik perekonomian ke taraf kegiatan yang lebih tinggi. Walaupun perluasan perdagangan dunia adalah serealistik yang diperlukan, dunia pada dasarnya dihadapkan dengan "Kekuatan-kekuatan (forces)" yang merintangi serta memperlambat usaha-usaha

---

\* Terjemahan kertas kerja yang disampaikan pada Konperensi Jepang-Indonesia VI, Tokyo, 3-5 Oktober 1978, oleh Ronald NANGOI

untuk memperluas perdagangan internasional yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi dunia dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Mereka terdiri atas:

- Masalah hutang negara-negara sedang membangun
- Adanya pasaran "Euro-dollar" yang melibatkan US\$ 400 milyar dan mempengaruhi stabilitas nilai tukar asing yang akan berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional
- Adanya "floating rate" yang sering memerlukan penyesuaian-penyesuaian
- Masalah inflasi yang masih mempengaruhi negara-negara berkembang dan maju
- Masalah peningkatan pengangguran serta kemunduran kapasitas produksi dalam negeri
- Perubahan-perubahan struktural dalam perekonomian nasional
- Peraturan-peraturan yang bercirikan nasionalisme ekonomi serta campur tangan pemerintah, seperti "Orderly Marketing Agreements (OMAS)", "organized free trade", proteksionisme, dan sebagainya.

Dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara yang memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional, telah diakui bersama bahwa terdapat suatu ketergantungan di dunia internasional dan usaha-usaha tersebut dilakukan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat kerja sama. Tetapi kewajiban-kewajiban (commitments) untuk merumuskan kebijaksanaan dan pernyataan seperti itu yang dilakukan oleh para pemimpin negara-negara industri pada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, cenderung bersifat terbatas, karena para pemimpin tersebut masih terikat dengan kewajiban-kewajiban akan kepentingan nasional.

Dari kebanyakan hambatan yang merintangi perluasan perdagangan dunia, kenaikan tingkat proteksionisme paling banyak ditekankan.

## PROTEKSIONISME DALAM SEGALA BENTUK DAN RAGAM

Sejak perumusan kebijaksanaan yang biasanya diprakarsai oleh para politisi dan kelompok desak (pressure groups) lainnya, per-

dagangan internasional dipandang sebagai "economic war game" oleh beberapa politisi dan kelompok lainnya di negara-negara industri. Mereka menganggap negara-negara yang berhasil meningkatkan surplus sebagai para pemenang. Mereka mengatakan bahwa "political expenses" dalam kebijaksanaan dalam negeri lebih tinggi daripada keuntungan ekonomi. Dan oleh karena aspek-aspek seperti peningkatan pengangguran, mereka tidak ragu-ragu merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengarah kepada proteksionisme. Menurut banyak peninjau perdagangan internasional, kecenderungan ke arah proteksionisme ini adalah berbahaya.

Salah satu masalah pokok dari kecenderungan proteksionisme yang secara langsung mempengaruhi perdagangan internasional adalah tindakan-tindakan pembatasan yang sekarang ini sedang diterapkan pada barang-barang impor. Tanda bahaya lain adalah usaha-usaha untuk mengadakan "Orderly Marketing Agreements" yang cenderung membatasi perdagangan internasional ke dalam persetujuan-persetujuan bilateral seperti halnya dengan bermacam-macam komoditi, termasuk barang-barang tekstil. Ini akan menyebabkan erosi komitmen politis terhadap perdagangan bebas dan merupakan akhir perdagangan bebas yang sudah menjadi salah satu mekanisme penting dalam pembangunan negara-negara seperti Jepang, Jerman Barat, Korea Selatan, Taiwan dan negara-negara berkembang lainnya.

Cara di mana para politisi dan kelompok desa ini bekerja di negara-negara industri sekarang menjadi lebih "sophisticated", sehingga bisa disimpulkan bahwa langkah-langkah ke arah proteksionisme akan mempunyai bentuk yang lebih konkrit.

Pada dewasa ini dua negara industri yang mengalami surplus adalah Jerman Barat dan Jepang. Tetapi jika kita meninjau kritik-kritik yang ditujukan kepada mereka, Jepanglah yang harus menanggung kesukaran. Khususnya kritik-kritik AS terhadap Jepang bersifat terbuka, pedas, terus terang dan kadang-kadang kasar, serta realistis (menurut pandangan AS), maka keberhasilan Jepang di bidang ekonomi bukanlah tanpa masalah.

Mengenai perumusan kebijaksanaan perdagangan luar negeri antara Jepang dan AS, Jepang telah didesak untuk menyetujui harapan serta permintaan pejabat-pejabat AS, karena jika tidak, tindakan-tindakan proteksionis terhadap Jepang tidak bisa dihindari. Presiden



Carter bersama pemerintahnya secara resmi menentang proteksionisme, tetapi dalam bentuk dan ragam yang begitu "sophisticated", pada dasarnya, muncul semacam proteksionisme.

Dengan adanya tingkat proteksionisme dan kepentingan nasional yang tinggi dalam perdagangan internasional, Jepang saat ini harus menghadapi dunia yang tidak begitu simpatik akibat keberhasilan ekonominya yang didasarkan pada kegiatan ekspor. Tetapi bagi Jepang, ini bukanlah suatu hal yang baru. Sebaliknya, sebagai negara yang membutuhkan bahan mentah bagi industrinya dan pasaran bagi hasil-hasil produksinya, Jepang telah terbiasa menghadapi masalah-masalah tersebut.

Mekanisme yang telah diciptakan Jepang memiliki "struktur kekuatan segi lima (five-sided power structure), yaitu:

- "Petunjuk administratif" pemerintah serta bantuan kepada badan Jepang di perusahaan-perusahaan dagang dan umum dalam perdagangan internasional
- Jaringan perdagangan internasional yang tersebar di seluruh dunia seperti yang dimiliki perusahaan-perusahaan dagang umum tersebut
- Terbukanya pasar-pasar modal dan uang internasional, misalnya, pasaran "Euro-dollar" yang melibatkan sekitar US\$ 400 milyar yang berada dalam jangkauan mereka
- Teknologi yang dimiliki dan bisa juga diperoleh perusahaan-perusahaan dagang umum ini melalui hak patent, ijin, dan sebagainya
- Ahli dan manajemen sejenis (homogenous management) berdasarkan kesetiaan terhadap pimpinan dan negara

Maka struktur kekuatan bersegi lima ini merupakan suatu kekuatan yang diperhitungkan dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya, surplus yang dikembangkan Jepang, dan dalam ukuran yang besar, sesuai dengan peranan perusahaan-perusahaan dagang umum dan struktur ekonomi/industri Jepang.<sup>1</sup>

---

1 Pertumbuhan industri Jepang dan kapasitas produksi tidak dapat diserap oleh pasaran dalam negeri, melainkan harus diekspor.

Kami percaya bahwa dengan pengalaman dan struktur kekuasaan bersegi lima dari perusahaan-perusahaan dagang umum, Jepang akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam perdagangan internasional di tahun-tahun mendatang. Walaupun demikian, kepercayaan yang positif akan kekuatan perusahaan-perusahaan dagang umum Jepang ini tidak dibagi seluruhnya. Ada juga orang-orang yang percaya bahwa kekuatan perusahaan-perusahaan dagang umum ini mulai berkurang.

## JEPANG: SASARAN PROTEKSIONISME

Tingkat pertumbuhan perdagangan internasional yang mencapai 14,5% dalam tahun 1976 diperkirakan saat ini tidak melebihi 6%. Pertumbuhan 6% ini berada jauh di bawah tingkat yang dicapai dalam tahun 1960-an.

### 1. Defisit-Surplus

Defisit perdagangan AS dengan MEE dalam tahun 1977 diperkirakan US\$ 5 milyar, tetapi dengan Jepang sekitar US\$ 13,3 milyar (lihat Tabel 1) dibandingkan dengan US\$ 7,6 milyar dalam tahun 1975 dan US\$ 11,5 milyar dalam tahun 1976. Dalam tahun 1971, defisit perdagangan AS dengan Jepang berada antara US\$ 2 milyar dan US\$ 3 milyar, dan Presiden Nixon mempunyai cukup alasan untuk mengadakan tindakan-tindakan proteksi yang dikenal di Jepang sebagai "Nixon Shokku". Masalahnya sekarang adalah apakah dengan defisit perdagangan tahun 1977 yang berjumlah US\$ 13,5 milyar sejarah akan berulang kembali dan apakah pernyataan-pernyataan belakangan ini yang dikemukakan oleh Blumenthal bisa dianggap sebagai petunjuk terhadap kemungkinan "Carter Shokku". Defisit perdagangan dengan Jepang ini diadakan sebaik surplus AS dengan negara-negara berkembang (lihat lagi Tabel 1).

Kesanggupan Jepang untuk bertahan dengan "Nixon Shokku" dalam perdagangan internasionalnya, dan untuk meningkatkan pada saat bersamaan surplus pada neraca perdagangannya menunjukkan kekuatan serta struktur ekspor dari ekonomi dan bisnisnya. Surplus atau keberhasilan Jepang tidak selalu diterima dengan hati terbuka oleh negara-negara yang telah "terpukul" olehnya, seperti Amerika Serikat dan MEE. Walaupun demikian, surplus yang telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bisnis negara-negara yang "terpukul" ini akan mengalami kemunduran.

Tabel 1

**EKSPOR DAN IMPOR HASIL PRODUKSI INDUSTRI AMERIKA SERIKAT**  
(dalam milyar US\$)

	1975	1976	Januari-Juni 1977 (Rata-rata tiap tahun)
<b>Volume ekspor total</b>	<b>74,2</b>	<b>80,0</b>	<b>84,5</b>
1. Negara-negara industri	42,8	48,3	51,0
Kanada	18,4	20,3	22,7
Eropa Barat	18,9	20,4	22,1
Jepang	3,4	3,7	3,8
2. Negara-negara komunis	1,2	1,2	1,0
3. Negara-negara sedang membangun	30,2	30,5	32,6
<b>Volume impor total</b>	<b>53,6</b>	<b>67,3</b>	<b>76,7</b>
1. Negara-negara industri	42,3	51,5	59,1
Kanada	13,1	16,6	19,6
Eropa Barat	17,7	19,1	21,8
Jepang	11,0	15,2	17,1
2. Negara-negara komunis	0,5	0,6	0,6
3. Negara-negara sedang membangun	10,8	15,2	17,0
<b>Neraca Perdagangan</b>	<b>20,6</b>	<b>12,7</b>	<b>7,9</b>
1. Negara-negara industri	0,5	-3,2	-8,1
Kanada	5,3	3,7	3,1
Eropa Barat	1,2	1,3	0,3
Jepang	-7,6	-11,5	-13,3
2. Negara-negara komunis	0,7	0,6	0,4
3. Negara-negara sedang membangun	19,4	15,3	15,6

Sumber: Morgan Guaranty, dari *FEER* tertanggal 11 Nopember 1977, James Strodes, "The Giant Hits Back"

Gagasan Jepang akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah diubah menjadi pertumbuhan yang lebih lambat, tetapi mekanisme yang telah ia ciptakan selama beberapa dasawarsa tidak bisa diubah sehari saja. Mereka yang telah menanam modal dalam menciptakan mekanisme baru masih harus mencari cara serta ikhtiar bagaimana untuk tidak mengurangi kemampuan-kemampuan produksi mereka, karena jika tidak, ini berarti suatu kehilangan yang besar buat mereka.



Ini merupakan kemampuan produksi yang tinggi dan efisien, yang ditunjang oleh energi berlimpah dan suatu mekanisme seperti yang dimiliki perusahaan-perusahaan dagang besar dengan jaringan internasional mereka, serta ekonomi yang ditujukan sekuat tenaga ke arah perkembangan ekspor. Jika badan-badan multinasional Barat mempunyai kekuatan segi tiga (manajemen, modal dan teknologi), badan-badan multinasional Jepang memiliki, seperti yang dikemukakan sebelumnya, struktur kekuatan bersegi lima (bantuan pemerintah, manajemen, modal, teknologi, dan jaringan internasional yang efektif), maka akan sulit bagi negara Barat yang maju untuk bersaing dengan Jepang tanpa menjalankan semacam proteksionisme.

## **2. Kambing Hitam?**

Keberhasilan Jepang melalui badan-badan multinasionalnya yang mempunyai dua aspek kekuatan lebih daripada yang dimiliki badan-badan multinasional Barat, akan menjadi sasaran politis negara-negara maju dan menjadikan Jepang kambing hitam mereka.

Pertemuan tingkat tinggi di London dalam bulan Mei 1979, yang dihadiri pemimpin-pemimpin Jerman Barat, AS, Inggris, Perancis, Kanada, Italia dan Jepang, telah mencapai suatu mufakat yang menolak sama sekali sistem proteksionisme. Walaupun demikian, pernyataan-pernyataan politis yang dibuat para pemimpin kekuatan-kekuatan ekonomi ini tampaknya tidak ditunjang oleh perkembangan-perkembangan di dalam dunia internasional yang menunjukkan suatu kecenderungan ke arah proteksionisme, di mana sekarang terdapat sistem "perdagangan bebas yang terorganisasi (organized free trade)", yang lebih dikenal sebagai OMAS (Orderly Marketing Agreements).

Europa Barat yang menjuarai konsep perdagangan bebas saat ini telah mulai meninggalkan konsep tersebut dengan mencari suatu rationale yang menuju kepada proteksionisme. Para pemimpin negara maju Barat sekarang ini memiliki suatu konsep baru yang membagi "spheres of economic influence" mereka dalam beberapa blok, termasuk Afrika, dengan OMAS sebagai basis. Asia Tenggara dan Amerika Latin masing-masing akan berada di bawah pengaruh ekonomi Amerika Serikat dan Jepang.

Pembagian dalam "spheres of economic influence" ini pasti tidak akan diterima Jepang, karena konsep pengaruh ekonominya melibatkan seluruh dunia dan tidak hanya Asia Tenggara. Konsep dasar ini merupakan salah satu tujuan nasional yang ditunjang penuh tidak hanya oleh diplomasi bisnis Jepang, tetapi juga oleh badan-badan multinasionalnya dengan jaringan internasional yang amat efektif dan bermacam-macam bentuk kerjasama dengan bank-bank mereka. Jaringan internasional tersebut meliputi perdagangan, usaha-usaha patungan, lembaga-lembaga keuangan dan jasa-jasa lain seperti asuransi, konsultansi, restoran dan hotel. Mereka datang dengan kekuatan penuh, hampir semua bentuk mekanisme memiliki bagian akan kegiatan serta keuntungan mereka. Maka tidak mengherankan bahwa bisnis Jepang telah memasuki semua pasaran tradisional Eropa dengan hasil-hasil industri serta jasa, sehingga praktis di seluruh negara, hasil-hasil industri Jepang telah menjadi saingan hebat hasil-hasil industri lokal. Ini telah menyebabkan bermacam-macam reaksi dari kekuatan dalam negeri (internal forces) yang menekan pemerintah setempat, organisasi-organisasi perdagangan, serikat-serikat kerja setempat sebagai aksi yang menentang persaingan luar biasa ini, yang pada gilirannya, menyebabkan ditutupnya badan-badan serta pabrik-pabrik dan masalah-masalah pengangguran di negara-negara industri.

Meningkatnya pengangguran dan inflasi adalah dua masalah yang belum terpecahkan. Sebagai contoh, industri baja di Amerika Serikat memberhentikan tidak kurang dari 20.000 pekerjanya sebagai akibat masuknya Jepang ke pasaran baja AS (walaupun Jepang dan beberapa pemimpin di AS berpendapat bahwa ini harus berkaitan dengan teknologi "kuno" di industri baja AS di mana beberapa pabrik telah berumur 70 tahun) dan Zenith Radio Corporation harus membubarkan sekitar 5.000 pekerjanya karena perusahaan ini harus mengalihkan jalur produksinya ke Taiwan. Masuknya impor yang menyebabkan peningkatan pengangguran, bersamaan dengan surplus pada neraca perdagangan Jepang dan defisit pada neraca perdagangan negara-negara pengimpor, telah mengakibatkan lalu lintas pembayaran internasional (international payments traffic) semakin rumit.

Beberapa edaran di Jepang yakin bahwa untuk mendapatkan manfaat dari masa perdagangan bebas dan mengambil untung sebanyak mungkin darinya, mereka seharusnya menggunakan kesempatan itu atau dalam istilah politisnya mempergunakan sikap oportunis dan



tidak mendasarkannya pada sikap intelektual mereka (intellectual commitment). Ini harus dilihat dari sudut pandangan akan konsep perluasan "spheres of economic influence" yang tersebar di seluruh dunia, yang merupakan dasar "kelangsungan hidup (survival)" ekonomi dan bisnis Jepang.

### 3. Jepang Sebagai Sasaran

Dalam pernyataan-pernyataan dan reaksi-reaksi mengenai hubungan perdagangan Jepang dengan negara-negara industri, terdapat suatu petunjuk bahwa Jepang telah menjadi sasaran atau kambing hitam dalam mencari suatu rasional yang mengarah kepada "organized free trade", "orderly liberalism", "orderly marketing agreements", dan sebagainya, yang pada dasarnya merupakan sistem kuota dan pembatasan. Ini melulu hanyalah sesuatu yang menurut nutup sikap proteksionis mereka.

Di waktu-waktu mendatang, Jepang akan menghadapi tekanan berat dari perdagangan internasional, terutama dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, untuk menerima OMAS dan mengurangi surplus perdagangannya dengan membeli lebih banyak dari negara-negara yang mengalami defisit perdagangan dengannya. Walaupun demikian, Jepang selama ini tidak mengindahkannya,<sup>1</sup> maka negara-negara industri yang terpukul olehnya harus mengadakan tindakan-tindakan proteksionisme. Dari negara-negara Eropa Barat hanya Jerman Barat belum mengajukan keluhan-keluhan, karena ia tampaknya berhasil menghadapi bisnis Jepang. Ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat sekarang ini tidak cukup mampu bersaing dalam perdagangan internasional secara berhasil dan mulai memanfaatkan kekuatan pemerintah mereka untuk melindungi serta membantu dalam mencegah badan-badan multinasional Jepang memukuhnya lebih jauh. Bagi Amerika Serikat sebagai pusat pengelolaan ilmiah dan administrasi, ini sungguh-sungguh ironis.

Jika negara-negara maju Barat berhasil mendesak Jepang menerima OMAS dalam berbagai bentuknya, negara-negara berkembang yang telah berhasil dengan program-program industrialisasinya, seperti Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan, akan mengalami nasib sama. Mereka harus menghadapi juga bermacam-macam bentuk proteksionisme yang akan bertindak sebagai perintang (deterrents) bagi

1 Oleh karena struktur ekonomi mereka yang menitik beratkan pada ekspor



perkembangan ekonomi mereka. Tetapi negara-negara Barat yang masih berkeyakinan bahwa mereka paling unggul dalam banyak hal, seharusnya menyadari bahwa riwayat mereka telah berakhir, karena menyangkut usaha-usaha mereka menyelesaikan masalah-masalah pengangguran dan inflasi. Negara-negara tersebut telah kehilangan kepercayaan bahwa kedua masalah ini bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi internasional yang terbuka. Maka mereka sekarang ini harus menjalankan proteksionisme.

## SIKAP EROPA BARAT DAN AMERIKA SERIKAT

### 1. Eropa Barat

Dengan mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan mereka, negara-negara Eropa Barat kelihatannya mempunyai sikap yang kurang agresip daripada Amerika Serikat. Malcolm Subhan setidaknya telah menguraikan sikap negara Eropa Barat tersebut dalam artikelnya yang berjudul "Europe Puts on Armour" di majalah *FEER* terbitan 11 Nopember 1977. Sebagaimana dirumuskan oleh Perancis, Eropa Barat menginginkan "organized free trade" yang tidak berbeda dengan pengorganisasian perdagangan bebas melalui proses pembicaraan-pembicaraan multilateral yang berdasarkan perundingan sektor demi sektor. Pada dasarnya hal ini sama dengan OMAS di industri-industri baja dan televisi yang diperkenalkan Amerika Serikat. Walaupun demikian perlu dicatat di sini bahwa tidak semua negara bersikap sama seperti yang diuraikan oleh penulis artikel ini, karena Jerman Barat yang tampaknya berhasil menghadapi Jepang mungkin mempunyai sikap yang lebih fleksibel dalam perundingan-perundingannya. Negara-negara Eropa Barat telah menentukan sikap bagaimana mengatur perdagangan mereka dengan Jepang dan akan menciptakan "tembok-tembok" dengan menggunakan metode perundingan sektor demi sektor. Dalam hal ini, mereka telah menjadikan MEE sebagai "benteng" yang harus mereka lindungi dengan mengadakan "orderly marketing agreements".

### 2. Amerika Serikat

Dalam artikelnya yang berjudul "U.S. on the Warpath", Bruce Nussbaum telah menguraikan sikap Amerika Serikat dalam

menghadapi defisit perdagangan yang besar dengan Jepang. Orang-orang Amerika sangat agresif dalam usaha-usaha mereka mengurangi defisit tersebut dan perasaan-perasaan anti Jepang dewasa ini mulai didengungkan di Washington. Gerakan para pekerja dan "lobby" para industrialis dan politisi mempunyai sikap yang cukup terbuka terhadap masalah defisit tersebut. Undang-undang "anti-dumping" di Amerika Serikat dan kewajiban anti-dumping di Eropa Barat secara nyata ditujukan kepada Jepang. Presiden Carter masih berusaha mencegah Amerika Serikat menjalankan sistem proteksionisme, walaupun tekanan para politisi, industrialis, pekerja, dan sebagainya dewasa ini amat dirasakan. Makanya tidak mengherankan bahwa Jepang saat ini harus menghadapi "shokku" lain, yang dimulai dari AS.

Walaupun demikian, Amerika Serikat menyadari bahwa selain tekanan-tekanan ke arah proteksionisme, pertumbuhan ekonomi dan kekuatan bersaing Amerika Serikat akan dibebani oleh kompleks-kompleks industri raksasa yang sudah tua dan kuno. Para industrialis yang mempunyai kekuatan "lobbying" di Washington akan bersikap lebih agresif terhadap Jepang. Hal ini sangat dimungkinkan, karena mereka berpendapat bahwa Jepang membutuhkan pasaran AS bagi hasil-hasil produksinya, sehingga dari pandangan-pandangan politis dan bisnis, industrialis-industrialis tersebut menganggap bahwa mereka mempunyai pengaruh untuk "memaksa Jepang takluk terhadap "kehendak" Amerika Serikat. Sikap ini jelas terlihat pada masa pemerintahan Nixon, walaupun Pemerintah Carter mempunyai sikap lebih simpatik. Keadaan serta tekanan dalam negeri mungkin akan memaksa pembuat kebijaksanaan Carter mengadakan tindakan tindakan yang lebih drastis. Pernyataan-pernyataan yang dibuat para pemimpin serta pejabat AS telah menunjukkan bahwa mereka sedang dalam proses penentuan sikap yang lebih agresif sementara kesalahan-kesalahan yang dibuat Pemerintah Fukuda telah meningkatkan perkembangan ketegangan hubungan AS-Jepang.

Selain latar belakang studi tentang kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi Jepang dalam perdagangan internasional beberapa waktu sekarang ini, ada baiknya kita sekarang meninjau prospek perdagangan dan hubungan perdagangan antara Jepang dan Asia Tenggara pada umumnya dan antara Jepang dan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai dan Pilipina) pada khususnya.

PARTNER-PARTNER DAGANG JEPANG

Pertama-tama, mari kita lihat dari Tabel 2 dan 2A, hubungan perdagangan Jepang dengan dunia. Di sektor impor dan ekspor, AS adalah partner dagang Jepang yang terpenting selama tahun 1975-1977. Ekspor Jepang ke Amerika Serikat meningkat dari 20,0% dalam tahun 1975 menjadi 23,3% dalam tahun 1976 dan 24,5% dalam tahun 1977, sedangkan impor dari AS merosot masing-masing dari 20,1% menjadi 18,2% dan 17,5%. Dalam hal impor, bahan mentah, Arab Saudi adalah partner dagang utamanya dalam tahun 1977, yaitu sekitar 12,1% dari jumlah impor total. Berikutnya adalah Australia sebesar 7,5%, yang disusuli oleh Indonesia dengan 7,1%. Indonesia termasuk di antara lima negara pengeksport bahan mentah terbesar ke Jepang, dan dalam tahun 1977 bergeser dari tempat kelima menjadi keempat.

Tabel 2

NEGARA DAN WILAYAH PENGEKSPOR JEPANG DALAM TAHUN 1977 (Top 20) (1)							
Country, Region	Export Value (\$ 1 Million)	Compared with Previous Year (%)			Component Ratio of Total Exports (%)		
		1975	1976	1977	1975	1976	1977
1. U.S.A.	19,716,908	87.1	140.7	125.7	20.0	23.3	24.5
2. Republic of Korea	4,079,602	84.6	125.7	144.4	4.0	4.2	5.1
3. F.R. Germany	2,781,723	110.9	135.0	124.0	3.0	3.3	3.5
4. Taiwan	2,552,676	90.7	125.1	112.0	3.3	3.4	3.2
5. Liberia	2,486,792	110.3	108.7	88.5	4.6	4.2	3.1
6. Saudi Arabia	2,342,255	199.5	139.8	124.0	2.4	2.8	2.9
7. Australia	2,329,601	87.0	132.8	100.9	3.1	3.4	2.9
8. Hong Kong	2,320,245	101.3	133.5	126.1	2.5	2.7	2.9
9. U.K.	1,949,954	96.3	94.4	139.3	2.6	2.1	2.4
10. China	1,938,643	113.8	73.6	116.6	4.1	2.5	2.4
11. U.S.S.R.	1,933,877	148.4	138.5	85.9	2.9	3.3	2.4
12. Iran	1,926,416	182.9	92.0	112.9	3.3	2.5	2.4
13. Indonesia	1,797,462	127.5	88.6	109.7	3.3	2.4	2.2
14. Singapore	1,719,219	109.8	100.5	112.3	2.7	2.3	2.1
15. Canada	1,707,814	72.5	134.9	110.0	2.1	2.3	2.1
16. Thailand	1,359,762	100.8	111.6	127.1	1.7	1.6	1.7
17. Panama	1,328,465	109.4	117.1	101.8	2.0	1.9	1.7
18. Netherlands	1,305,326	68.9	149.6	120.1	1.3	1.6	1.6
19. Philippines	1,099,946	112.6	108.6	98.7	1.8	1.7	1.4
20. Greece	1,095,097	67.8	220.7	147.4	0.6	1.1	1.4
Total Exports	80,494,793	100.4	120.5	119.7	100.0	100.0	100.0



Tabel 2A

NEGARA DAN WILAYAH PENGIMPOR JEPANG DALAM TAHUN 1977  
(Top 20) (2)

Country, Region	Import Value (\$ 1 Million)	Compared with Previous Year (%)			Component Ratio of Total Imports (%)		
		1975	1976	1977	1975	1976	1977
1. U.S.A.	12,396,082	91.5	101.7	105.0	20.1	18.2	17.5
2. Saudi Arabia	8,505,480	117.1	127.5	108.7	10.6	12.1	12.1
3. Australia	5,287,578	103.3	129.0	98.6	7.2	8.3	7.5
4. Indonesia	4,996,556	75.0	119.3	122.1	5.9	6.3	7.1
5. Iran	4,242,932	104.4	89.4	95.4	8.6	6.9	6.0
6. Canada	2,880,844	93.4	108.7	106.1	4.3	4.2	4.1
7. United Arab Emirates	2,748,153	83.8	139.1	111.3	3.1	3.8	3.9
8. Kuwait	2,487,553	94.4	100.1	123.6	3.5	3.1	3.5
9. Rep. of Korea	2,113,399	83.4	146.5	110.3	2.3	3.0	3.0
10. Malaysia	1,560,641	70.6	197.0	114.6	1.2	2.1	2.4
11. China	1,547,344	117.3	89.5	112.9	2.6	2.1	2.2
12. F.R. Germany	1,496,193	78.3	107.8	121.8	2.0	1.9	2.1
13. U.S.S.R.	1,421,875	82.5	99.8	121.8	2.0	1.8	2.1
14. Brunei	1,419,692	115.4	118.8	117.0	1.8	1.9	2.0
15. Taiwan	1,268,666	80.5	146.6	108.3	1.4	1.8	1.6
16. U.K.	959,348	92.3	90.6	113.8	1.4	1.3	1.4
17. Brazil	946,796	134.4	92.7	115.7	1.5	1.3	1.3
18. Philippines	897,37	01.5	70.7	113.1	1.9	1.2	1.3
19. South African Republic	895,858	13.7	86.7	119.1	1.5	1.2	1.3
20. Omar.	882,964	137.6	131.3	129.3	0.9	1.1	1.2
Total Imports	70,808,654	93.2	111.4	109.3	100.0	100.0	100.0

Sumber: White Paper on Japanese Trade, 1978

## Trend Impor dan Ekspor Jepang

Tabel 3 dan 3A menunjukkan arah ekspor hasil-hasil produksi Jepang, ekspor hasil produksi kimia pokok yang paling tinggi terjadi dalam tahun 1976, yang meningkat dari 83,2% dalam tahun 1975 menjadi 84,1%. Pola umum ini akan terlihat, jika kita mengamati pola perdagangan antara Jepang dan Asia Tenggara dan antara Jepang dan ASEAN. Trend impor Jepang menitik beratkan pada bahan-bahan mentah, bahan makanan dan minyak. Dalam tahun 1976, impor bahan bakar mineralnya adalah sebesar 43,7% jumlah impor seluruhnya, yang diikuti bahan-bahan mentah dengan 20,3%.

Tabel 3

TREND EKSPOR MENURUT JENIS PRODUKSI (Unit: \$ million, %)							
Item		Export amount		Increase rate		Composite ratio	
Products	Year	1975	1976	1975	1976	1975	1976
Total Amount		55,752.8	67,225.5	0.4	20.5	100.0	100.0
Foodstuffs		760.1	886.8	▲10.2	16.7	1.4	1.3
Crude fuel		628.7	560.9	▲19.4	▲10.8	1.1	0.8
Heavy chemical products		46,410.0	56,553.4	1.7	21.9	83.2	84.1
Machinery		30,003.7	39,626.5	7.6	32.1	53.8	58.9
General machinery		6,729.0	7,766.3	13.1	15.4	12.1	11.6
Electrical machinery		6,920.6	10,805.2	3.0	56.1	12.4	16.1
Transportation machinery		14,528.3	18,545.0	7.9	27.6	26.1	27.6
Automobiles (excluding parts)		6,190.4	8,897.6	18.4	43.7	11.1	13.2
Ships		5,998.2	7,048.6	7.1	17.5	10.8	10.5
Metals		12,517.5	13,169.5	▲ 8.6	5.2	22.5	19.6
Iron and steel		10,176.5	10,484.7	▲ 5.4	▲ 3.0	18.3	15.6
Chemical products		3,888.8	3,757.4	▲ 4.2	▲ 3.4	7.0	5.6
Light industrial products		7,220.4	8,527.8	▲ 3.2	18.1	13.0	12.7
Textiles		3,718.7	4,216.4	▲ 8.5	13.4	6.7	6.3
Non-metalic mineral products		729.6	910.9	5.8	24.8	1.3	1.4

Sumber: White Paper on International Trade, MITI, 1977

Tabel 3A

TREND IMPOR MENURUT JENIS PRODUKSI (Unit: \$ million, %)							
Item		Import amount		Increase rate		Composite ratio	
Products	Year	1975	1976	1975	1976	1975	1976
Total amount		57,863.1	64,799.0	△ 6.8	11.4	100.0	100.0
Foodstuffs		8,814.9	9,375.8	8.5	6.4	15.2	14.5
Raw materials		11,659.8	13,185.1	△18.9	13.1	20.2	20.3
Textile raw materials		1,524.5	1,795.5	△18.1	17.8	2.6	2.8
Metal raw materials		4,416.6	4,578.7	△17.1	3.7	7.6	7.1
Lumber		2,620.6	3,531.9	△28.8	34.8	4.5	5.5
Mineral fuel		25,640.9	28,287.3	3.0	10.3	44.3	43.7
Coal		3,454.4	3,560.3	20.6	3.1	6.0	5.5
Crude oil and rough oil		19,643.8	21,184.9	3.9	7.8	33.9	32.7
Petroleum products		1,351.3	2,101.5	△40.3	55.5	2.3	3.2
Processed products		11,520.7	13,391.0	△20.8	16.2	19.9	20.7
Heavy chemical industrial products		8,007.1	9,214.8	△20.6	15.1	13.8	14.2
Machinery		4,286.0	4,608.2	△9.7	7.5	7.4	7.1
Chemical products		2,057.3	2,661.5	△22.9	29.4	3.6	4.1
Metals		1,663.9	1,945.1	△37.6	16.9	2.9	3.0
Light industrial products		3,513.5	4,176.2	△21.2	18.9	6.1	6.4
Textiles		1,310.4	1,699.2	△28.4	29.7	2.3	2.6

Tabel 4

## PARTNER DAGANG UTAMA JEPANG MENURUT NEGARA DAN WILAYAH (15 NEGARA PERTAMA)

(A) Exports

(Unit: \$ million)

1976			1970		
Country/ Region	Amount	Composite ratio (%)	Country/ Region	Amount	Composite ratio (%)
U.S.A.	15,689.6	23.3	U.S.A.	5,939.8	30.7
Republic of Korea	2,824.5	4.2	Korea	818.2	4.2
Liberia	2,809.5	4.2	Taiwan	700.4	3.6
Australia	2,308.7	3.4	Hong Kong	700.3	3.6
Taiwan	2,279.7	3.4	Australia	589.0	3.0
U.S.S.R.	2,251.9	3.3	Liberia	587.6	3.0
F.R. Germany	2,242.8	3.3	China	568.9	2.9
Saudi Arabia	1,888.9	2.8	Canada	563.3	2.9
Hong Kong	1,840.5	2.7	F.R. Germany	550.2	2.8
Iran	1,706.6	2.5	U.K.	479.9	2.5
China	1,662.6	2.5	Philippines	453.7	2.3
Indonesia	1,638.7	2.4	Thailand	449.2	2.3
Canada	1,552.2	2.3	Singapore	423.0	2.2
Singapore	1,531.4	2.3	Okinawa	369.0	1.9
U.K.	1,399.6	2.1	U.S.S.R.	340.9	1.8

(B) Imports

(Unit: \$ million)

1976			1970		
Country/ Region	Amount	Composite ratio (%)	Country/ Region	Amount	Composite ratio (%)
U.S.A.	11,809.3	18.2	U.S.A.	5,559.6	29.4
Saudi Arabia	7,824.0	12.1	Australia	1,507.7	8.0
Australia	5,360.9	8.3	Iran	995.3	5.3
Iran	4,448.1	6.9	Canada	928.6	4.9
Indonesia	4,090.7	6.3	Indonesia	636.6	3.4
Canada	12,715.4	4.2	F.R. Germany	617.0	3.3
United Arab Emirates	2,468.1	3.8	Philippines	33.5	2.8
Kuwait	2,013.2	3.1	U.S.S.R.	481.0	2.5
Republic of Korea	1,916.8	3.0	Saudi Arabia	435.1	2.3
China	1,370.9	2.1	Malaysia	418.9	2.2
Malaysia	1,362.2	2.1	U.K.	395.2	2.1
F.R. Germany	1,228.3	1.9	India	390.1	2.1
Brunei	1,213.5	1.9	Republic of South Africa	313.8	1.7
Taiwan	1,189.8	1.8	Kuwait	308.3	1.6
U.S.S.R.	1,167.4	1.8	Zambia	294.7	1.6

Sumber: White Paper on International Trade, MITI, 1977



### Perubahan Partner-partner Dagang

Tabel 4 menunjukkan perubahan pada ke-15 partner dagang Jepang selama masa enam tahun dari tahun 1970 sampai tahun 1976. Jika dalam tahun 1970 ekspor dan impor Jepang ke dan dari Amerika Serikat sebesar 30,7% jumlah ekspor totalnya dan 29,4% jumlah impor totalnya, yang masing-masing sebesar 23,3% dan 18,2% dalam tahun 1976. Impor dari Arab Saudi meningkat dari 8,0% dalam tahun 1970 menjadi 12,1% dalam tahun 1976. Jadi dilihat dari kedua sektor, Arab Saudi, Iran dan RRC saat ini sedang meningkatkan prospek pemasaran bagi Jepang.

### JEPANG DAN ASIA TENGGARA

Jika kita memperhitungkan negara-negara Asia Tenggara yang dikemukakan dalam "Japan's White Paper on International Trade for 1977", blok negara-negara yang tercakup adalah Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Muangthai, Singapura, Malaysia, Brunei, Pilipina, Indonesia dan Kamboja (Lihat Tabel 5).

### Ekspor Jepang ke Asia Tenggara

Dari Grafik I terlihat bahwa ekspor Jepang ke Asia Tenggara menunjukkan suatu kecenderungan untuk menurun. Dalam tahun 1978 ekspor negara ini ke Asia Tenggara masih sekitar 27,8% dari jumlah ekspornya, tetapi dalam tahun 1976 menurun menjadi 20,9% dan 21,3% dalam tahun 1977.

Walaupun demikian, nilai dollar mereka meningkat dari US\$ 29,3 milyar dalam tahun 1967 menjadi US\$ 140,5 milyar dalam tahun 1976 dan US\$ 171,3 milyar dalam tahun 1977.

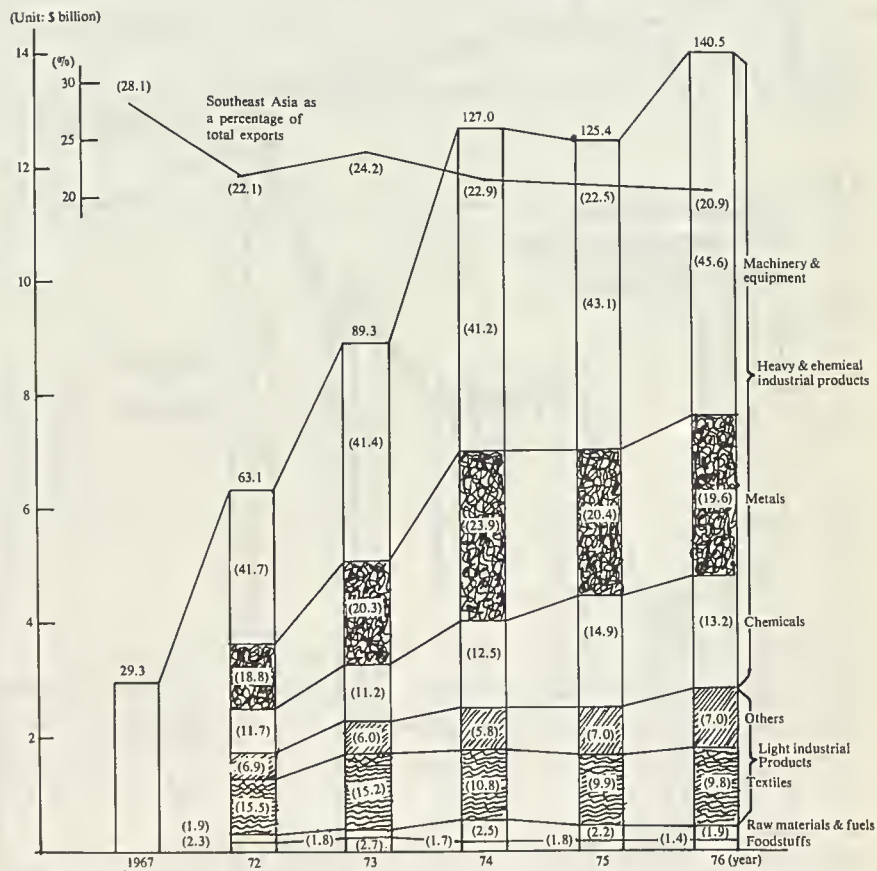
Bagi komponen-komponen ekspor yang berbeda, mesin-mesin dan peralatan terus meningkat. Hal ini mungkin berhubungan erat dengan kenaikan investasi langsung yang kontinu dengan badan-badan multinasional Jepang di wilayah Asia Tenggara. Jika pada suatu waktu barang-barang tekstil menjadi salah satu komoditi ekspor utama Jepang, ini akan menurun dari 15,5% dalam tahun 1976 menempati kedudukan terkemuka dibandingkan dengan 18,8% dalam tahun 1972..

Tabel 5

PERDAGANGAN DENGAN NEOARA-NEGARA ASIA TENGGARA (2)  
(Unit: \$ 1,000)

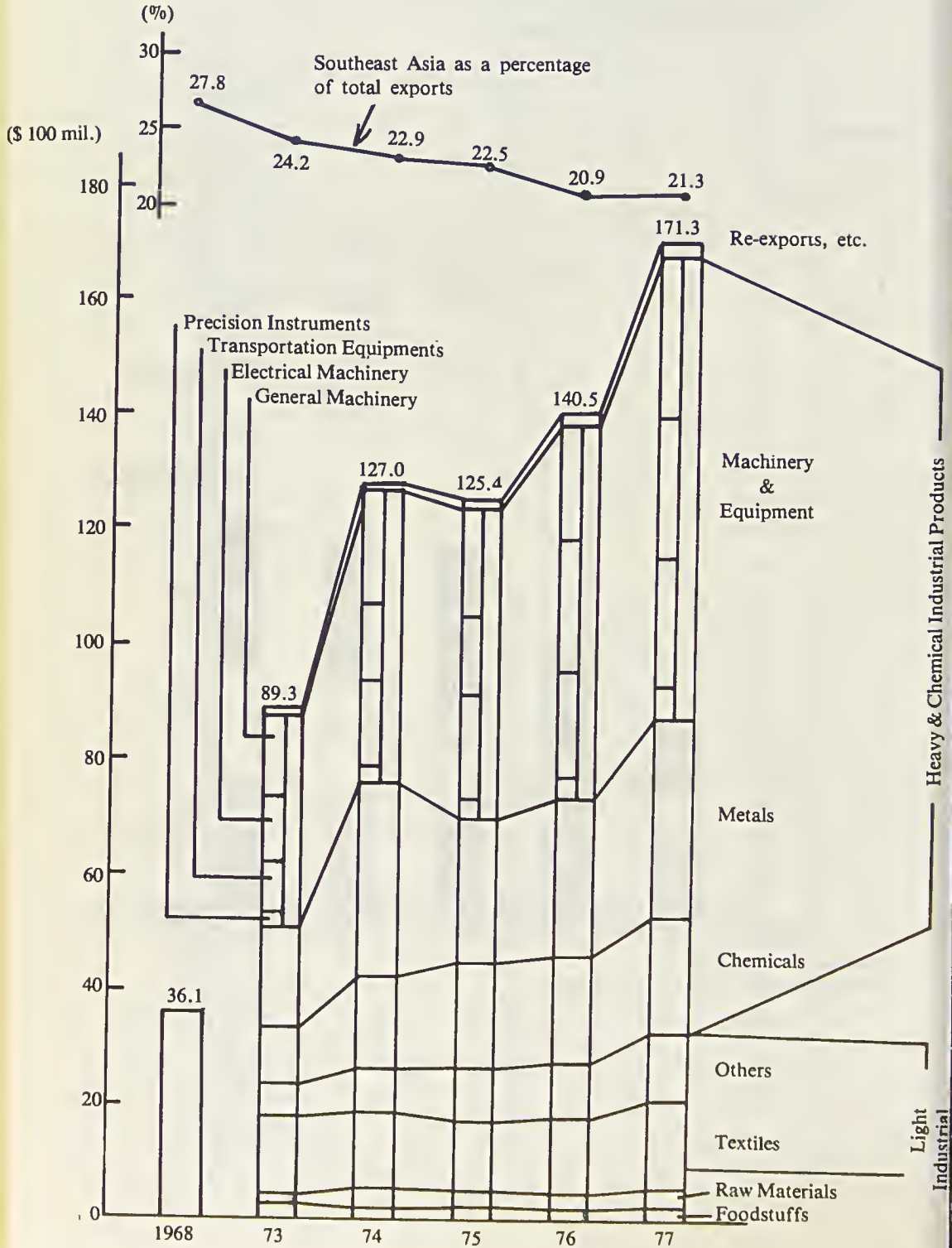
Commodity	Year	Unit of	1975			1976		1977		Compared with previous year (%)
			Quantity	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	
Total Exports	—	—	—	—	12,343,287	—	14,047,252	—	17,125,580	121.9
Foodstuffs	—	—	—	—	183,945	—	194,836	—	221,609	113.7
Fish & Shellfish	MT	1 100,004	—	—	70,673	81,991	91,946	78,687	98,256	106.9
Raw Materials & Fuels	—	—	—	—	253,027	—	247,177	—	297,556	120.4
Crude Materials, Inedible	—	—	—	—	106,122	—	134,733	—	184,789	119.4
Mineral Fuels	—	—	—	—	129,035	—	72,382	—	92,783	128.2
Petroleum & Its Products	—	—	—	—	107,551	—	52,775	—	71,237	135.0
Light Industrial Products	—	—	—	—	2,044,158	—	2,350,346	—	2,745,657	116.8
Textiles	—	—	—	—	1,241,731	—	1,379,834	—	1,155,745	112.6
Textile Raw Materials	MT	176,235	—	—	209,582	192,727	242,178	238,733	291,089	120.6
Yarn	MT	104,932	—	—	243,049	89,220	258,998	96,188	315,290	121.7
Fabrics	—	—	—	—	634,814	—	715,504	—	782,425	109.4
Secondary Textile Products	—	—	—	—	134,306	—	163,153	—	163,942	100.5
Nonmetallic Mineral Products	—	—	—	—	184,534	—	197,151	—	248,234	125.9
Cement	KMT	2,158	—	—	67,522	2,312	61,584	2,297	65,109	105.7
Other Light Industrial Products	—	—	—	—	617,854	—	773,361	—	943,678	122.0
Leather, Leather Products & Fur Skins	MT	23,269	—	—	100,511	33,884	128,895	26,700	145,559	112.9
Rubber Products	MT	48,553	—	—	99,713	49,077	98,274	56,814	116,428	118.5
Paper & Paper Products	MT	389,799	—	—	191,485	464,711	280,559	441,661	247,534	107.3
Paper & Paper Boards	MT	378,345	—	—	171,401	449,783	204,170	423,726	214,087	104.9
Heavy & Chemical Products	—	—	—	—	9,848,815	—	11,045,135	—	10,644,590	123.5
Chemicals	—	—	—	—	1,885,809	—	1,864,599	—	2,098,583	112.5
Organic Compounds	MT	950,215	—	—	577,559	1,140,427	665,534	1,372,865	752,353	113.0
Inorganic Compounds	MT	802,636	—	—	144,602	1,146,112	169,813	1,169,866	182,924	107.7
Dyes & Coatings	MT	41,065	—	—	111,207	48,548	127,788	52,503	143,735	112.5
Chemical Fertilizers	MT	1,321,207	—	—	314,984	769,249	65,410	607,701	47,266	72.3
Plastic Materials & Artificial Resins	MT	735,350	—	—	544,247	694,094	587,850	836,194	688,380	116.8
Metals	—	—	—	—	2,583,700	—	2,782,394	—	3,392,167	121.9
Iron & Steel	MT	6,200,240	—	—	1,923,253	7,432,118	2,031,640	8,363,157	2,446,379	120.4
Nonferrous Metals	MT	165,706	—	—	240,503	232,126	350,673	307,428	446,614	133.1
Metal Products	—	—	—	—	419,964	—	400,081	—	479,174	119.8
Machinery & Equipment	—	—	—	—	5,399,305	—	6,398,141	—	8,153,840	127.4
General Machinery	—	—	—	—	1,912,455	—	2,201,797	—	2,892,493	131.4
Electrical Machinery	—	—	—	—	1,356,516	—	1,937,957	—	2,450,966	126.5
Transportation Equipment	—	—	—	—	1,824,975	—	1,853,625	—	2,242,211	120.9
Precision Instruments	—	—	—	—	305,358	—	404,751	—	570,150	140.9
Re-exports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	—	—	193,342	—	209,658	—	216,168	103.1
Total Imports	—	—	—	—	10,506,286	—	13,410,854	—	15,076,347	112.4
Foodstuffs	—	—	—	—	2,144,425	—	2,315,100	—	2,444,051	105.6
Meat	MT	18,526	—	—	47,865	36,518	102,983	32,325	89,195	84.6
Fish & Shellfish	MT	341,895	—	—	756,167	307,602	1,088,094	436,640	1,271,174	116.8
Fresh & Frozen	MT	320,219	—	—	674,103	371,904	980,908	400,681	1,155,011	117.7
Crustaceans	MT	152,947	—	—	420,646	175,476	649,974	166,292	665,944	102.5
Fruits & Vegetables	—	—	—	—	289,643	—	389,684	—	459,425	117.9
Fruits	—	—	—	—	184,232	—	193,121	—	215,386	111.5
Vegetables	—	—	—	—	70,641	—	143,759	—	163,310	113.6
Sugar	MT	1,662,902	—	—	771,803	1,772,987	392,854	1,919,809	282,328	71.9
Molasses (Excl. Fomkuffs)	MT	1,021,430	—	—	720,705	996,470	349,546	1,134,743	232,698	66.6
Coffee, Cocoa & Tea	MT	640,787	—	—	49,858	775,734	41,699	183,972	48,176	115.5
Foodstuffs	MT	59,434	—	—	50,282	80,113	92,155	76,356	141,296	155.5
Maize	MT	1,018,496	—	—	147,912	1,337,123	166,911	826,686	98,697	90.1
Raw Materials	MT	729,642	—	—	117,120	949,629	124,056	467,458	52,389	42.2
Textile Materials	MT	—	—	—	2,285,519	—	3,171,023	—	3,368,559	106.2
Raw Cotton	MT	113,466	—	—	114,269	120,989	109,906	85,911	133,504	121.5
Textile Materials	MT	76,088	—	—	62,143	52,778	45,087	55,649	42,217	91.6
Mineral Materials	MT	242,440,481	—	—	849,861	23,820,346	948,878	25,831,612	977,677	107.6
Iron Ore	MT	18,961,464	—	—	360,401	18,856,150	358,810	20,218,080	427,079	119.0
Nonferrous Metal Ores	MT	5,056,436	—	—	463,668	4,748,343	498,327	5,292,507	490,360	102.2
Other Raw Materials	—	—	—	—	1,321,389	—	2,112,259	—	2,257,578	104.9
Rubber	MT	310,513	—	—	169,756	303,342	223,532	318,720	250,914	112.2
Wood, Lumber & Cork	—	—	—	—	918,312	—	1,835,624	—	1,832,018	99.4
Animal & Vegetable Oils & Fats	MT	142,958	—	—	68,724	193,328	76,747	190,835	106,166	116.3
Mineral Fuels	—	—	—	—	4,236,397	—	4,995,332	—	6,196,319	124.1
Petroleum & Petroleum Products	—	—	—	—	3,911,019	—	4,521,567	—	5,560,618	123.0
Crude & Partially Refined Oil	KKL	40,194	—	—	3,332,852	44,027	3,663,580	51,308	4,578,151	125.0
Petroleum Products	—	—	—	—	378,407	—	857,987	—	981,447	114.4
Liquefied Methane Gas	KMT	3,514	—	—	321,259	4,836	467,476	5,585	627,713	134.1
Manufactured Products	—	—	—	—	1,563,149	—	2,834,924	—	2,855,823	104.1
Chemicals	—	—	—	—	140,546	—	209,480	—	287,725	137.4
Medicinal & Pharmaceutical Products	—	—	—	—	47,843	—	60,792	—	73,240	121.4
Machinery & Equipment	—	—	—	—	537,851	—	694,836	—	896,567	127.7
General Machinery	—	—	—	—	66,271	—	70,363	—	82,353	116.8
Electrical Machinery	—	—	—	—	241,081	—	413,348	—	548,750	132.3
Other Products	—	—	—	—	1,364,912	—	2,080,693	—	2,124,510	104.8
Wood & Cork Products	—	—	—	—	109,321	—	108,081	—	96,674	92.3
Textile Products	—	—	—	—	658,678	—	1,040,968	—	987,663	94.9
Nonmetallic Mineral Products	—	—	—	—	120,349	—	153,808	—	179,029	110.4
Nonferrous Metals	—	—	—	—	156,492	—	290,106	—	311,101	120.4
Miscellaneous Products	—	—	—	—	218,016	—	305,822	—	308,717	123.8
Re-imports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	—	—	56,706	—	64,475	—	109,391	115.8

Grafik 1: EKSPOR KE ASIA TENGGARA  
(Perubahan dalam Rasio Komponen Komoditi)





Grafik IA: EKSPOR KE NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA



Ekspor Jepang ke Asia Tenggara terdiri atas 78,4% hasil produksi industri kimia dan berat, 16,8% hasil produksi industri ringan (antara lain, barang-barang tekstil) dan 4,8% bahan mentah, bahan bakar dan bahan makanan.

### *Ekspor Jepang ke ASEAN*

Ekspor Jepang ke ASEAN dalam tahun 1976 dan 1977 adalah sebagai berikut:

	Nilai Dalam Juta ASS		Persentase Volume Ekspor Total Jepang	
	(1976)	(1977)	(1976)	(1977)
Indonesia	1.638,6	1.797,5	2,4	2,2
Singapura	1.531,4	1.719,2	2,3	2,1
Pilipina	1.113,9	1.099,9	1,7	1,4
Muangthai	1.070,2	1.359,7	1,6	1,7
Malaysia	703,9	863,3	1,0	1,1
Jumlah	6.058,0	6.839,6	9,0	8,5

Secara persentase, ini berarti bahwa ekspor Jepang ke ASEAN adalah sebesar 9,0% dan 8,5% volume ekspor totalnya masing-masing dalam tahun 1976 dan 1977. Mengenai Singapura, bisa diartikan bahwa porsi ekspor tertentu ke negara-negara tersebut diekspor kembali ke Indonesia dan Malaysia.

Ekspor Jepang ke ASEAN dalam tahun 1976 selanjutnya bisa diperinci sebagai berikut:

#### 1. *Indonesia*

Merosotnya ekspor Jepang ke Indonesia sebesar US\$ 1.638,6 dalam tahun 1976 (lihat Tabel 6) adalah sebagai berikut:

- (i) Hasil produksi industri ringan ..... US\$ 216,3 juta
- (ii) Hasil produksi industri kimia dan berat ..... US\$ 1.363,3 juta

termasuk mesin-mesin dan peralatan yang bernilai US\$ 805,4 juta, logam sebesar US\$ 356,4 juta dan bahan-bahan kimia sebesar US\$ 201,4 juta.

Mesin-mesin dan peralatan meliputi mesin-mesin biasa (antara lain, mesin tekstil, peralatan konstruksi dan pertambangan serta peralatan pendingin dan pemanasan), mesin listrik (antara lain, peralatan telekomunikasi serta peralatan listrik rumah tangga) dan peralatan transpor (antara lain, kendaraan bermotor, termasuk truk, dan sepeda motor), sementara logam terdiri atas besi dan baja, logam non-ferrous dan hasil produksi logam (lihat Tabel 6). Ekspor dalam tahun 1977 meningkat menjadi US\$ 1.797,4 juta. Polanya hampir sama dengan tahun 1976.

## 2. *Singapura*

Dalam tahun 1976 ekspor ke Singapura yang bernilai US\$ 1.531,4 juta terdiri atas 82,3% atau US\$ 1.261,5 juta hasil-hasil produksi industri kimia dan berat, di mana nilai mesin-mesin dan peralatan sebesar US\$ 908,3 juta, sedangkan ekspor dari peralatan transpor yang terdiri atas sebagian besar kapal berjumlah US\$ 464,8 juta (lihat Tabel 7). Tahun 1977 ekspor meningkat menjadi US\$ 1.719,2 juta.

Kami yakin bahwa tidak seberapa porsi produk industri kimia dan berat yang dimiliki Indonesia dan Malaysia sebagai tujuan akhir mereka, Singapura dimanfaatkan hanya sebagai pelabuhan transit.

## 3. *Pilipina*

Dalam tahun 1976 ekspor Jepang ke Pilipina berjumlah US\$ 1.113,9 juta, di mana hasil-hasil produksi industri dan berat yang bernilai US\$ 915,5 juta merupakan mayoritas atau 82% produk yang diekspor (lihat Tabel 8). Dalam tahun 1977 nilai ekspor merosot menjadi US\$ 1.099,9 juta.

Pola tersebut tampaknya sama seperti yang terdapat di negara-negara ASEAN lainnya, titik berat masih pada produk industri kimia dan berat.



Tabel 6: INDONESIA

## PERDAGANGAN DENGAN INDONESIA

(Unit: \$ 1,000)

Commodity	Year	Unit of quantity	1975		1976		1977		Compared with previous year (%)
			Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	
Total Exports	—	—	—	1,849,801	—	1,638,658	—	1,797,462	109.7
Foodstuffs	—	—	—	5,403	—	11,379	—	16,144	141.9
Raw Materials & Fuels	—	—	—	16,894	—	19,040	—	24,042	126.3
Mineral Fuels	—	—	—	11,314	—	8,439	—	9,195	111.3
Petroleum & Its Products	—	—	—	10,512	—	7,685	—	8,527	111.0
Light Industrial Products	—	—	—	254,780	—	214,268	—	201,927	94.2
Textiles	—	—	—	112,669	—	88,260	—	78,586	89.0
Textile Raw Materials	MT	19,685	21,677	18,048	—	21,729	19,025	23,791	109.5
Yarn	MT	14,911	28,570	14,095	—	32,615	11,266	28,729	88.1
Fabrics	—	—	—	52,376	—	26,216	—	17,579	67.1
Textile Secondary Products	—	—	—	10,046	—	7,700	—	8,488	110.2
Nonmetallic Mineral Products	—	—	—	39,250	—	34,780	—	27,515	79.1
Cement	KMT	724	25,964	615	—	21,037	259	9,742	46.3
Other Light Industrial Products	—	—	—	82,862	—	91,228	—	95,827	105.0
Rubber Products	MT	9,737	19,109	6,407	—	12,602	—	11,107	88.1
Paper & Paper Products	MT	70,232	35,316	87,980	—	43,364	74,621	41,988	96.8
Heavy & Chemical Industrial Products	—	—	—	1,560,063	—	1,365,649	—	1,541,865	112.9
Chemicals	—	—	—	266,971	—	203,335	—	236,156	116.1
Organic Compounds	MT	25,842	25,189	57,587	—	38,810	101,717	59,305	152.8
Inorganic Compounds	MT	75,124	18,688	86,949	—	18,552	130,597	24,135	130.1
Dyes & Coatings	MT	5,814	15,169	7,933	—	15,883	6,217	16,241	102.3
Essential Oils, Perfume & Cosmetics	—	—	—	11,201	—	11,664	—	11,972	102.6
Chemical Fertilizers	MT	295,128	90,068	18,131	—	2,620	12,697	2,013	76.8
Plastic Materials & Artificial Resins	MT	125,512	86,870	125,924	—	96,756	137,618	100,263	103.6
Other Chemical Products	—	—	—	15,969	—	14,886	—	18,310	125.0
Metals	—	—	—	476,906	—	357,087	—	331,645	92.9
Iron & Steel	MT	642,568	336,012	759,690	—	223,136	802,867	229,250	102.7
Nonferrous Metals	MT	22,248	25,221	26,061	—	32,499	33,361	44,938	138.3
Metal Products	—	—	—	115,672	—	101,452	—	57,458	56.6
Machinery & Equipment	—	—	—	816,187	—	805,227	—	974,064	121.0
General Machinery	—	—	—	310,384	—	294,251	—	316,503	107.6
Electrical Machinery	—	—	—	134,456	—	200,159	—	215,842	107.8
Transportation Equipment	—	—	—	359,303	—	292,957	—	421,961	144.0
Precision Instruments	—	—	—	12,045	—	17,879	—	19,757	110.5
Re-exports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	—	32,660	—	28,322	—	13,483	47.6
Total Imports	—	—	—	3,430,263	—	4,090,674	—	4,996,586	122.1
Foodstuffs	—	—	—	122,703	—	208,000	—	238,681	114.8
Fish & Shellfish	MT	23,441	96,297	27,066	—	158,924	27,504	176,526	111.1
Lobsters & Shrimps	MT	21,060	92,224	25,522	—	154,766	25,762	168,090	108.6
Raw Materials	—	—	—	528,445	—	836,325	—	868,687	103.9
Textile Raw Materials	MT	56	28	113	—	46	108	57	123.9
Metal Raw Materials	MT	2,325,036	110,387	2,212,599	—	102,851	2,528,376	113,893	110.7
Nonferrous Metal Ore	MT	2,039,977	106,675	1,927,416	—	98,967	2,245,909	109,079	110.2
Other Raw Materials	—	—	—	418,030	—	733,428	—	754,737	102.9
Rubber	MT	27,619	15,864	26,815	—	20,615	29,266	24,025	116.1
Wood, Lumber	KCM	7,435	361,328	9,698	—	682,642	9,635	703,442	103.0
Animal & Vegetable Oils & Fats	MT	49,891	22,497	40,791	—	14,636	12,379	6,377	43.6
Mineral Fuels	—	—	—	2,725,251	—	2,972,469	—	3,777,076	127.1
Crude and Partially Refined Oil	KKL	30,074	2,505,782	32,172	—	2,684,135	37,792	3,352,944	124.9
Heavy Fuel Oil	KKL	2,565	219,446	3,451	—	284,601	4,088	359,009	126.1
Manufactured Products	—	—	—	51,285	—	67,746	—	98,114	144.8
Chemicals	—	—	—	3,399	—	3,210	—	4,786	149.1
Machinery & Equipment	—	—	—	155	—	280	—	129	46.1
Other Products	—	—	—	47,531	—	64,256	—	93,199	145.0
Nonferrous Metals	—	—	—	41,714	—	47,778	—	70,354	147.3
Re-imports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	—	2,598	—	6,134	—	14,027	228.7

Sumber: White Paper on Japanese Trade, 1978

Tabel 7: SINGAPURA

PERDAGANGAN DENGAN SINGAPURA  
(Unit: \$ 1,000)

Commodity	Year	Unit of quantity	1975		1976		1977		Compared with previous year (%)
			Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	
<b>Total Exports</b>	—	—	—	1,523,711	—	1,531,433	—	1,719,219	112.3
Foodstuffs	—	—	—	31,669	—	26,693	—	29,216	109.5
Fish & Shellfish	MT	—	24,853	17,676	14,799	12,005	15,663	16,564	138.0
Processed Fish & Shellfish	"	—	24,211	16,365	13,914	9,801	14,916	14,097	143.8
Fruits & Vegetables	—	—	—	7,282	—	8,975	—	7,503	83.6
Vegetables	—	—	—	7,187	—	8,740	—	7,245	82.9
Raw Materials & Fuels	—	—	—	4,854	—	5,446	—	10,533	193.4
Light Industrial Products	—	—	—	214,091	—	221,394	—	254,731	115.1
Textiles	—	—	—	110,957	—	104,860	—	115,117	109.8
Fabrics	—	—	—	84,988	—	78,354	—	81,879	104.5
Textile Secondary Products	—	—	—	15,491	—	17,228	—	21,484	124.7
Nonmetallic Mineral Products	—	—	—	35,877	—	40,115	—	48,304	120.4
Cement	KMT	—	768	20,330	1,119	24,464	1,052	25,737	105.2
Other Light Industrial Products	—	—	—	67,258	—	76,420	—	91,309	119.5
Rubber Products	MT	—	3,371	7,926	4,296	10,234	3,436	8,764	85.6
Paper & Paper Products	"	—	41,661	22,731	52,372	25,009	44,710	24,637	98.5
Heavy & Chemical Industrial Products	—	—	—	1,258,074	—	1,265,659	—	1,405,353	111.0
Chemicals	—	—	—	72,994	—	85,228	—	99,223	116.4
Organic Compounds	MT	—	38,133	14,854	54,295	21,362	55,799	24,347	114.0
Plastic Materials & Artificial Resins	"	—	42,145	35,391	44,249	38,245	46,958	42,687	111.6
Metals	—	—	—	388,450	—	272,283	—	332,349	122.1
Iron & Steel	MT	—	982,762	321,511	775,084	200,775	836,643	249,031	124.0
Nonferrous Metals	"	—	10,740	16,291	15,028	24,234	16,117	27,923	115.2
Metal Products	—	—	—	50,649	—	47,274	—	55,395	117.2
Machinery & Equipment	—	—	—	796,629	—	908,148	—	973,781	107.2
General Machinery	—	—	—	165,451	—	184,719	—	288,252	156.0
Electrical Machinery	—	—	—	168,392	—	217,090	—	317,384	146.2
Transportation Equipment	—	—	—	429,521	—	463,880	—	314,200	67.7
Precision Instruments	—	—	—	33,266	—	42,459	—	53,946	127.1
Re-exports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	—	15,023	—	12,240	—	19,387	158.4
<b>Total Imports</b>	—	—	—	398,958	—	646,622	—	687,351	106.3
Foodstuffs	—	—	—	8,186	—	11,336	—	22,123	195.2
Fish & Shellfish	MT	—	1,664	3,245	1,855	4,489	11,749	11,513	256.5
Crustacea (Fresh, Frozen)	"	—	578	1,694	1,545	4,159	3,531	6,894	165.8
Coffee, Tea & Cocoa	"	—	2,639	3,745	4,195	5,251	6,286	7,985	152.1
Cocoa	"	—	2,203	2,853	3,779	3,990	6,154	7,206	180.6
Raw Materials	—	—	—	8,311	—	11,525	—	13,797	119.7
Textile Raw Materials	MT	—	269	230	338	359	142	157	43.7
Metal Raw Materials	"	—	1,491	956	5,458	4,218	6,625	5,384	127.6
Other Raw Materials	—	—	—	7,125	—	6,947	—	8,256	118.8

Animal & Vegetable Oils & Fats	MT	3,475	2,157	2,363	1,217	646	504	41.4
Mineral Fuels	—	—	295,395	—	458,436	—	512,150	111.7
Petroleum and Its Products	—	—	295,395	—	458,436	—	512,150	111.7
Napbtha	KKL	1,707	143,753	2,327	216,236	3,284	305,204	141.1
Kerosene	"	355	31,523	387	36,296	366	35,770	98.6
Heavy Fuel Oil	"	1,430	114,655	2,478	197,950	1,834	160,314	81.0
Lubricating Oil & Grease	—	—	3,455	—	3,801	—	3,885	102.2
Manufactured Products	—	—	82,588	—	152,606	—	126,216	82.7
Chemicals	—	—	33,282	—	39,939	—	53,828	134.8
Medicinal & Pharmaceutical Products	—	—	32,046	—	37,742	—	49,399	130.9
Machinery & Equipment	—	—	35,664	—	87,767	—	57,741	65.8
General Machinery	—	—	21,504	—	29,264	—	34,938	119.4
Electrical Machinery	—	—	8,170	—	12,408	—	11,008	88.7
Transportation Equipment	—	—	2,925	—	39,397	—	1,015	2.6
Precision Instruments	—	—	3,066	—	6,697	—	10,780	161.0
Other Products	—	—	13,642	—	24,900	—	14,647	58.8
Rubber Products	MT	55	2,062	26	6,100	1	3	0.0
Textile Products	—	—	3,823	—	8,185	—	3,026	37.0
Miscellaneous Products	—	—	3,438	—	4,331	—	5,554	128.2
Re-imports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	4,479	—	12,720	—	13,065	102.7

Sumber: White Paper on Japanese Trade, 1978

Tabel 8: PILIPINA

PERDAGANGAN DENGAN PILIPINA

(Unit: \$ 1,000)

Commodity	Year	Unit of quantity	1975		1976		1977		Compared with previous year (%)
			Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	
Total Exports	—	—	1,026,211	—	1,113,967	—	1,099,946	—	98.7
Foodstuffs	—	—	28,794	—	28,079	—	23,361	—	81.2
Fish & Shellfish	MT	49,863	26,150	37,312	28,079	26,173	22,228	—	79.2
Processed Fish & Shellfish	"	49,858	26,148	37,312	28,078	26,173	22,225	—	79.2
Raw Materials & Fuels	—	—	12,634	—	10,496	—	14,537	—	118.1
Raw Materials, inedible	—	—	7,039	—	7,272	—	8,588	—	119.4
Synthetic Rubber	MT	7,434	4,761	6,798	4,475	8,137	5,341	—	181.1
Mineral Fuels	—	—	5,008	—	2,953	—	5,347	—	114.4
Light Industrial Products	—	—	128,782	—	147,704	—	168,964	—	114.9
Textiles	—	—	83,318	—	90,369	—	103,865	—	116.3
Textile Raw Materials	MT	23,199	26,364	22,054	26,877	25,056	31,255	—	93.5
Yarn	"	13,368	25,373	8,422	19,267	7,814	18,007	—	126.1
Fabrics	—	—	22,739	—	33,568	—	42,341	—	115.0
Textile Secondary Products	—	—	8,841	—	10,658	—	12,262	—	94.7
Nonmetallic Mineral Products	—	—	8,459	—	11,897	—	11,267	—	118.5
Other Light Industrial Products	—	—	37,004	—	45,437	—	53,831	—	104.4
Rubber & Products	MT	7,791	10,898	7,110	13,044	9,135	13,612	—	119.0
Paper & Paper Products	"	10,679	6,702	12,840	8,586	12,759	10,216	—	



<b>Heavy &amp; Chemical Industrial</b>								
Products	—	—	849,207	—	916,974	—	882,209	96.2
Chemicals	—	—	122,474	—	124,415	—	143,251	115.1
Organic Compounds	MT	47,843	23,782	69,379	31,737	82,407	39,387	124.1
Inorganic Compounds	"	288,741	18,966	431,657	17,852	406,649	18,429	103.2
Dyes & Coatings	"	1,387	5,454	1,979	6,237	2,680	8,503	136.3
Chemical Fertilizers	"	64,891	18,090	114,657	11,074	94,519	8,598	77.6
Plastic Materials &								
Artificial Resins	"	70,383	45,523	58,445	44,673	74,808	53,189	119.1
Other Chemical Products	—	—	6,419	—	7,000	—	8,495	121.4
<b>Metals</b>								
Iron & Steel	MT	439,199	128,753	579,771	157,409	624,307	176,597	112.2
Nonferrous Metals	"	12,906	14,755	15,429	18,964	20,757	24,904	131.3
Metal Products	—	—	52,600	—	39,192	—	27,595	70.4
<b>Machinery &amp; Equipment</b>								
General Machinery	—	—	530,624	—	576,994	—	509,861	88.4
Electrical Machinery	—	—	242,380	—	284,075	—	189,793	66.8
Transportation Equipment	—	—	83,510	—	105,517	—	114,081	108.1
Precision Instruments	—	—	195,278	—	174,611	—	189,579	108.6
	—	—	9,456	—	12,791	—	16,409	128.3
<b>Re-exports, Commodity &amp; Transaction not Classified</b>								
According to Kind	—	—	6,795	—	10,036	—	10,876	108.4
<b>Total Imports</b>	—	—	1,121,029	—	793,099	—	897,376	113.1
<b>Foodstuffs</b>								
Fish & Shellfish	MT	2,990	6,658	7,239	18,381	7,342	24,065	130.9
Crustacea (fresh, frozen)	"	1,252	5,426	2,386	14,417	2,851	18,537	128.6
Fruits & Vegetables	—	—	145,016	—	149,350	—	161,050	107.8
Fruits	—	—	142,170	—	144,261	—	153,071	106.1
Sugar	MT	963,964	463,655	481,058	62,663	628,345	70,018	111.7
Raw Sugar	"	595,760	431,790	106,606	41,531	230,065	44,067	106.1
Molasses (excl. Feeds)	"	367,752	30,933	373,863	19,854	397,718	25,045	126.1
Feedstuffs	"	90,817	7,857	81,451	5,194	70,696	5,403	104.0
Molasses	"	80,203	6,654	66,433	3,567	54,023	3,367	94.4
Beverages & Tobacco	—	—	7,166	—	5,609	—	4,990	89.0
Leaf Tobacco	MT	4,063	6,917	3,153	5,370	2,563	4,863	90.6
<b>Raw Materials</b>								
Textile Materials	MT	6,599	3,889	9,336	5,321	9,779	5,122	96.3
Metal Materials	"	2,465,378	267,244	1,895,481	288,849	3,344,441	340,456	117.9
Iron Ore	"	1,516,817	20,697	893,450	13,300	2,052,825	69,027	519.0
Nonferrous Metal Ore	"	947,106	246,101	998,937	273,414	1,281,005	258,714	94.6
Other Raw Materials	—	—	192,187	—	183,477	—	205,528	112.0
Raw Materials for Vegetable								
Oils	MT	44,918	11,798	70,138	15,861	55,492	21,968	138.5
Wood & Lumber	KCM	3,109	160,586	1,952	145,067	1,738	150,493	103.7
Animal Oils & Fats	MT	469	1,091	445	978	190	442	45.2
<b>Mineral Fuels</b>								
	—	—	6	—	0	—	1	—
<b>Manufactured Products</b>								
Chemicals	—	—	25,051	—	57,360	—	61,455	107.1
Machinery & Equipment	—	—	6,954	—	10,486	—	20,596	196.4
Other Products	—	—	3,242	—	18,927	—	17,993	95.1
	—	—	14,855	—	27,947	—	22,866	81.8
<b>Re-imports, Commodity &amp; Transaction not Classified</b>								
According to Kind	—	—	2,146	—	13,668	—	6,003	43.9

#### 4. *Muangthai*

Titik berat ekspor Jepang ke Muangthai dalam tahun 1976, yang bernilai US\$ 1.070,2 juta, juga pada hasil-hasil industri kimia dan berat yang bernilai US\$ 951,6 juta atau 89%, di mana peralatan dan mesin-mesin sebanyak US\$ 548,3 juta atau 51% yang merupakan komponen tertinggi dalam kategori ini (lihat Tabel 9). Angka-angka tahun 1977 menunjukkan suatu kenaikan yang mencapai US\$ 1.359,7 juta.

#### 5. *Malaysia*

Dari ekspor Jepang ke Malaysia dalam tahun 1976, yang bernilai US\$ 703,9 juta, tidak kurang dari US\$ 609,4 juta atau 86,5% adalah teruntuk hasil-hasil produksi industri kimia dan berat (lihat Tabel 10) dan dalam tahun 1977 meningkat menjadi US\$ 757,2 juta.

Di sini juga titik berat adalah pada mesin dan peralatan yang bernilai US\$ 381,0 juta dalam tahun 1976, yang meliputi mesin-mesin pertanian, peralatan konstruksi dan pertambangan, peralatan telekomunikasi dan kapal laut.

Maka pola ekspor Jepang ke ASEAN dalam banyak hal terdiri atas peralatan industri kimia dan berat dengan titik berat pada mesin dan peralatan. Seperti dikemukakan sebelumnya, kami berpendapat bahwa hal ini berhubungan dengan investasi langsung yang ditanam Jepang di negara-negara ASEAN.

#### **Impor Jepang dari Asia Tenggara**

Mengenai impor Jepang dari Asia Tenggara, Grafik II dan IIA menunjukkan kenaikan dari tahun 1967 ke tahun 1973, masing-masing dari 15,4% mencapai 20,8%. Walaupun demikian segera sesudah "oil shock" dalam tahun 1973, terjadi kemunduran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi Jepang yang mengakibatkan penurunan akan impor sebesar 18,3% dalam tahun 1975 di mana sesudahnya impor meningkat lagi setingkat dengan masa sebelum "oil shock" yaitu sebesar 20,7% dalam tahun 1976 dan 21,3% dalam tahun 1977. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu Jepang telah pulih dari penekanan yang disebabkan kemunduran kegiatan ekonomi. Pola impor yang

Tabel 9: MUANGTHAI

## PERDAGANGAN DENGAN MUANGTHAI

(Units: \$ 1,000)

Commodity	Year	Unit of quantity	1975		1976		1977		Compared with previous years (%)
			Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	
<b>Total Exports</b>	—	—	—	958,700	—	1,070,221	—	1,359,762	127.1
Foodstuffs	—	—	—	5,104	—	4,967	—	7,695	154.9
Raw Materials & Fuels	—	—	—	19,789	—	15,691	—	15,952	101.7
Crude Materials, Inedible	—	—	—	6,550	—	7,217	—	7,472	103.5
Mineral Fuels	—	—	—	12,111	—	7,403	—	6,598	89.1
Petroleum Products	—	—	—	9,989	—	4,281	—	3,338	78.0
Light Industrial Products	—	—	—	86,911	—	87,913	—	101,488	115.4
Textiles	—	—	—	50,888	—	46,460	—	45,217	97.3
Textile Raw Materials	MT	5,682	6,071	9,614	10,933	6,084	7,678	70.2	
Yarn	"	3,053	8,063	2,526	8,281	1,552	4,889	59.0	
Fabrics	—	—	—	32,131	—	21,835	—	26,471	121.2
Textile Secondary Products	—	—	—	4,623	—	5,411	—	6,179	114.2
Nonmetallic Mineral Products	—	—	—	8,099	—	7,773	—	11,185	143.9
Other Light Industrial Products	—	—	—	27,924	—	33,680	—	45,086	133.9
Paper & Paper Products	MT	24,682	10,935	27,127	12,702	31,697	16,024	126.2	
Heavy & Chemical Industrial Products	—	—	—	838,924	—	954,457	—	1,227,433	128.6
Chemicals	—	—	—	160,834	—	164,679	—	174,738	106.1
Organic Compounds	MT	76,587	43,997	117,818	62,935	125,835	64,501	102.5	
Inorganic Compounds	"	60,556	15,382	53,336	13,549	46,366	13,237	97.7	
Dyes & Coatings	"	4,104	11,066	5,226	13,545	5,456	15,444	114.0	
Medicinal & Pharmaceutical Products	—	—	—	4,409	—	4,880	—	5,006	102.6
Chemical Fertilizers	MT	160,260	26,492	196,357	15,905	160,040	11,656	73.3	
Plastic Materials & Artificial Resins	"	70,399	48,181	50,064	38,980	60,310	45,745	117.4	
Other Chemical Products	—	—	—	7,054	—	9,675	—	13,050	134.9
Metals	—	—	—	186,715	—	241,571	—	290,680	120.3
Iron & Steel	MT	567,096	142,294	752,929	192,566	806,952	228,934	118.9	
Nonferrous Metals	"	15,440	17,600	17,345	22,219	19,774	29,220	131.5	
Metal Products	—	—	—	26,822	—	26,786	—	32,525	121.4
Machinery & Equipment	—	—	—	491,374	—	548,208	—	762,016	139.0
General Machinery	—	—	—	191,201	—	175,202	—	234,039	133.0
Electrical Machinery	—	—	—	76,009	—	90,962	—	112,712	123.5
Transportation Equipment	—	—	—	215,832	—	272,039	—	400,530	147.2
Precision Instruments	—	—	—	8,332	—	10,005	—	14,735	147.3
Re-exports, Commodity & Transaction not Classified	—	—	—	—	—	—	—	—	—
According to Kind	—	—	—	7,972	—	7,193	—	7,194	100.0
<b>Total Imports</b>	—	—	—	723,729	—	848,041	—	748,201	88.2
Foodstuffs	—	—	—	455,740	—	526,619	—	363,735	69.4
Fish & Shellfish	MT	22,689	69,912	24,290	96,370	25,085	84,153	87.1	
Lobsters & Shrimps	"	8,837	36,763	9,851	59,715	7,227	45,942	76.9	
Cuttlefish (Fresh, Frozen)	"	9,262	20,642	7,524	19,712	8,250	18,789	95.1	
Cereals (Excl. Feeds)	"	61,751	12,184	55,315	8,580	72,103	13,610	158.0	
Malze (Excl. Feeds)	"	49,578	8,460	43,813	5,745	23,798	2,837	49.1	



Fruits & Vegetables	—	—	19,835	—	39,773	—	41,481	104.3
Vegetables	—	—	18,589	—	37,598	—	35,434	94.2
Sugar	MT	486,863	219,067	963,878	240,132	949,490	147,674	61.5
Raw Sugar	"	308,413	206,363	662,598	223,903	621,788	128,062	57.2
Mollasses (Excl. Feeds)	"	178,448	12,703	301,280	16,229	327,702	19,612	120.8
Feedstuffs	"	799,698	125,433	1,011,318	128,745	544,328	59,250	46.0
Maize	"	728,246	116,881	949,629	124,056	467,454	52,389	42.2
Kaoliang	"	39,433	5,980	1,426	170	2,421	279	164.1
Beverages & Tobacco	—	—	8,706	—	8,827	—	9,197	104.2
Leaf Tobacco	MT	3,521	8,704	3,668	8,821	3,418	9,162	103.9
Raw Materials	—	—	153,587	—	202,047	—	235,456	116.5
Textile Materials	MT	6,667	1,875	16,829	4,275	10,804	3,219	75.3
Metal Materials	"	15,652	2,245	23,527	5,376	67,609	8,135	151.3
Other Raw Materials	—	—	149,467	—	192,396	—	224,102	116.5
Raw Materials for Vegetable								
Oil	MT	49,035	11,243	45,317	11,864	49,483	17,544	147.9
Natural Rubber (Crude)	"	205,463	110,360	197,428	143,380	211,662	164,971	115.1
Wood, Lumber	KCM	23	8,593	28	13,308	28	12,753	95.8
Nonmetallic Minerals	—	—	9,123	—	7,869	—	9,397	119.4
Mineral Fuels	—	—	3	—	0	—	0	0.0
Manufactured Products	MT	—	110,761	—	116,232	—	144,484	124.3
Chemicals	—	—	17,797	—	19,707	—	26,621	135.1
Medicinal & Pharmaceutical								
Products	—	—	3,962	—	4,381	—	5,864	133.9
Starch, etc.	MT	70,789	13,086	79,852	14,120	94,206	17,822	126.2
Machinery & Equipment	—	—	2,131	—	5,491	—	4,485	81.7
Other Products	—	—	90,833	—	91,033	—	113,378	124.5
Textile Products	—	—	27,406	—	22,503	—	18,930	84.1
Nonmetallic Mineral Products	—	—	16,727	—	14,821	—	16,195	109.3
Nonferrous Metals	—	—	37,235	—	44,534	—	66,915	150.8
Miscellaneous Products	—	—	6,318	—	6,498	—	8,978	138.2
Imports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	3,638	—	3,143	—	2,526	80.4

Source: White Paper on Japanese Trade, 1978

Table 10: MALAYSIA

PERDAGANGAN DENGAN MALAYSIA

(Unit: \$ 1,000)

Commodity	Year	Unit of quantity	1975		1976		1977		Compared with previous year (%)
			Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	
Total Exports	—	—	—	566,094	—	703,964	—	863,354	122.6
Foodstuffs	—	—	—	9,019	—	8,528	—	11,634	136.4
Fish & Shellfish	MT	—	10,373	6,171	9,986	6,242	10,682	9,258	148.3
Mackerel, canned	"	—	8,592	5,008	6,422	3,706	5,790	4,819	130.0
Raw Materials & Fuels	—	—	—	3,726	—	4,106	—	5,826	141.9
Synthetic Rubber	MT	—	2,285	1,285	3,061	1,734	3,426	2,045	117.9
Coal, Cokes	"	—	5,758	388	8,847	572	17,754	1,165	203.7
Light Industrial Products	—	—	—	74,430	—	75,671	—	81,546	107.8

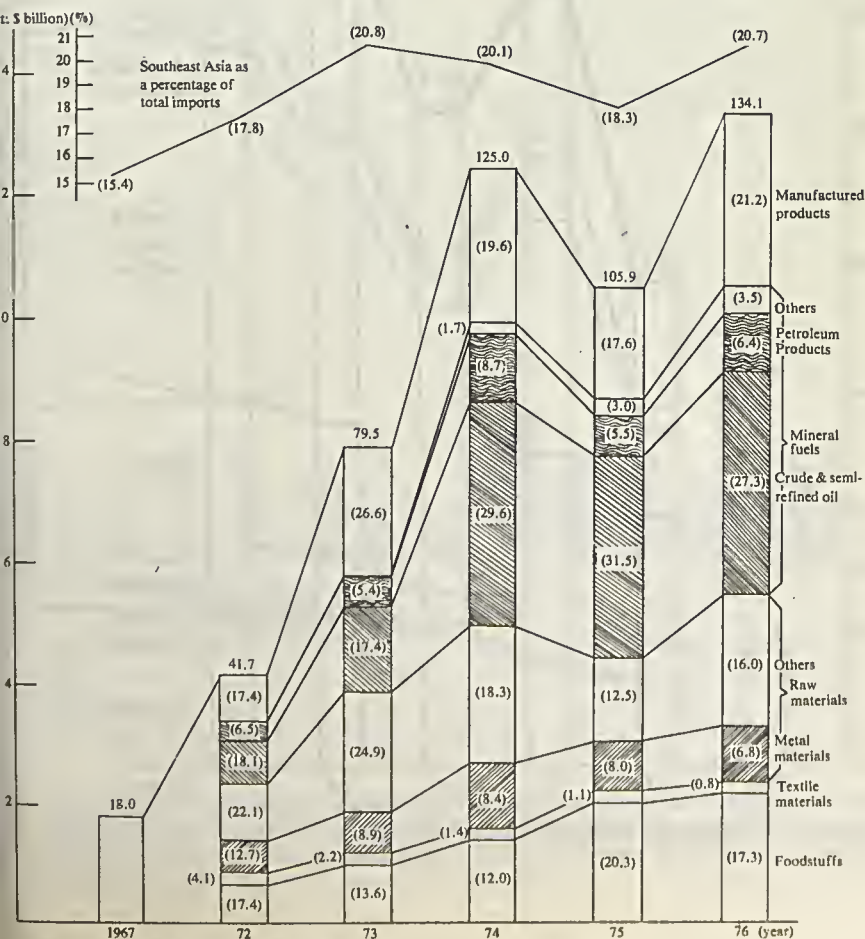
Textiles	—	—	38,541	—	35,029	—	35,392	101.0
Synthetic Fiber, Discontinuous	MT	2,666	2,768	5,845	5,889	5,689	5,666	96.2
Yarn	"	2,624	4,845	1,803	4,437	1,519	4,743	106.9
Cotton Fabrics	KSM	3,611	2,281	2,583	2,149	2,087	2,318	107.9
Synthetic Fiber Discontinuous Fabrics	"	10,798	6,232	6,944	4,916	6,107	4,886	99.4
Knit Fabrics (Knitted, Clocheted)	MT	1,012	4,717	676	3,377	430	2,203	65.2
Nonmetallic Mineral Products	—	—	10,823	—	9,069	—	10,500	115.8
Cement	KMT	182	6,113	110	3,625	95	3,099	85.5
Glass & Glasswares	—	—	967	—	1,235	—	2,002	162.1
Other Light Industrial Products	—	—	25,066	—	31,572	—	35,654	112.9
Rubber Products	MT	1,493	3,135	1,881	4,256	1,968	4,943	116.1
Paper & Paper Boards	"	33,453	14,635	40,497	16,132	37,498	16,299	101.0
Heavy & Chemical Industrial Products	—	—	473,346	—	610,801	—	757,211	124.0
Chemicals	—	—	56,272	—	78,037	—	86,965	111.4
Organic Compounds	MT	40,602	20,689	51,901	25,672	61,356	28,115	109.5
Inorganic Compounds	"	11,235	4,573	22,797	6,486	31,975	8,000	123.3
Dyes & Coatings	"	1,108	1,902	1,714	2,622	2,079	3,434	131.0
Chemical Fertilizers	"	13,196	2,342	91,381	6,796	98,847	7,396	108.8
Plastic Materials & Artificial Resins	"	27,817	19,528	32,380	25,849	36,909	28,338	109.6
Metals	—	—	122,330	—	151,715	—	179,238	118.1
Iron & Steel	MT	368,110	95,095	440,516	116,219	453,275	124,392	107.0
Nonferrous Metals	"	5,564	8,112	10,253	15,552	10,591	17,408	111.9
Metal Products	—	—	19,124	—	19,944	—	37,438	187.7
Machinery & Equipment	—	—	294,744	—	381,028	—	491,007	128.9
General Machinery	—	—	89,008	—	99,870	—	137,584	137.8
Electrical Machinery	—	—	78,794	—	92,243	—	135,018	146.4
Transportation Equipment	—	—	121,170	—	181,424	—	208,904	115.1
Precision Instruments	—	—	5,772	—	7,491	—	9,501	126.8
Re-exports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	5,573	—	4,859	—	7,137	146.9
<b>Total Imports</b>	—	—	691,444	—	1,362,231	—	1,560,641	114.6
Foodstuffs	—	—	28,468	—	61,276	—	73,785	120.4
Fish & Shellfish	MT	5,950	18,686	10,387	43,681	10,098	47,668	109.1
Lobsters & Shrimps	"	4,524	15,684	7,328	37,377	7,200	41,977	112.3
Raw Materials	—	—	396,152	—	843,101	—	855,422	101.5
Nonferrous Metal Ores	MT	797,690	21,179	803,496	43,512	813,528	52,922	121.6
Bauxite	"	590,263	9,371	512,474	8,888	521,516	9,531	107.2
Titanium Ore	"	104,736	3,346	123,825	3,651	130,024	3,801	104.1
Copper Ore	"	14,274	4,696	81,648	27,509	115,489	37,385	135.9
Manganese Ore	"	86,526	2,880	83,744	2,388	45,693	1,351	56.6
Natural Rubber (Crude)	"	48,067	27,940	45,720	36,688	35,876	31,403	85.6
Natural Rubber (Latex)	"	24,087	11,547	29,266	16,816	30,260	20,124	119.7
Wood, Lumber	KCM	6,633	300,365	10,204	687,699	9,713	661,689	96.2
Animal & Vegetable Oils & Fats	MT	62,523	30,287	116,246	45,212	140,209	72,543	160.5
Palm Oil	"	61,422	29,752	114,870	44,650	136,336	70,616	158.2
Mineral Fuels	—	—	130,017	—	234,119	—	374,065	159.8
Crude & Partially Refined Oil	KKL	1,572	127,312	2,787	229,719	4,076	369,504	160.9
Manufactured Products	—	—	134,188	—	219,649	—	245,199	111.6

Chemicals	—	—	3,906	—	6,724	—	6,447	95.9
Starch, etc.	MT	17,107	2,385	19,288	2,516	20,795	3,074	122.2
Machinery & Equipment	—	—	25,307	—	35,735	—	34,516	96.6
General Machinery	—	—	14,817	—	10,401	—	6,027	57.9
Electrical Machinery	—	—	10,036	—	23,629	—	24,357	103.1
Textile Products	—	—	708	—	2,566	—	6,986	272.3
Wood Chips	MT	494,786	31,861	324,293	24,383	—	23,375	95.9
Tin, Unwrought	"	9,923	67,959	18,465	135,628	14,951	155,107	114.4

Re-imports, Commodity & Transaction not Classified According to Kind	—	—	2,619	—	4,085	—	12,169	297.9
----------------------------------------------------------------------------	---	---	-------	---	-------	---	--------	-------

Sumber: White Paper on Japanese Trade, 1978

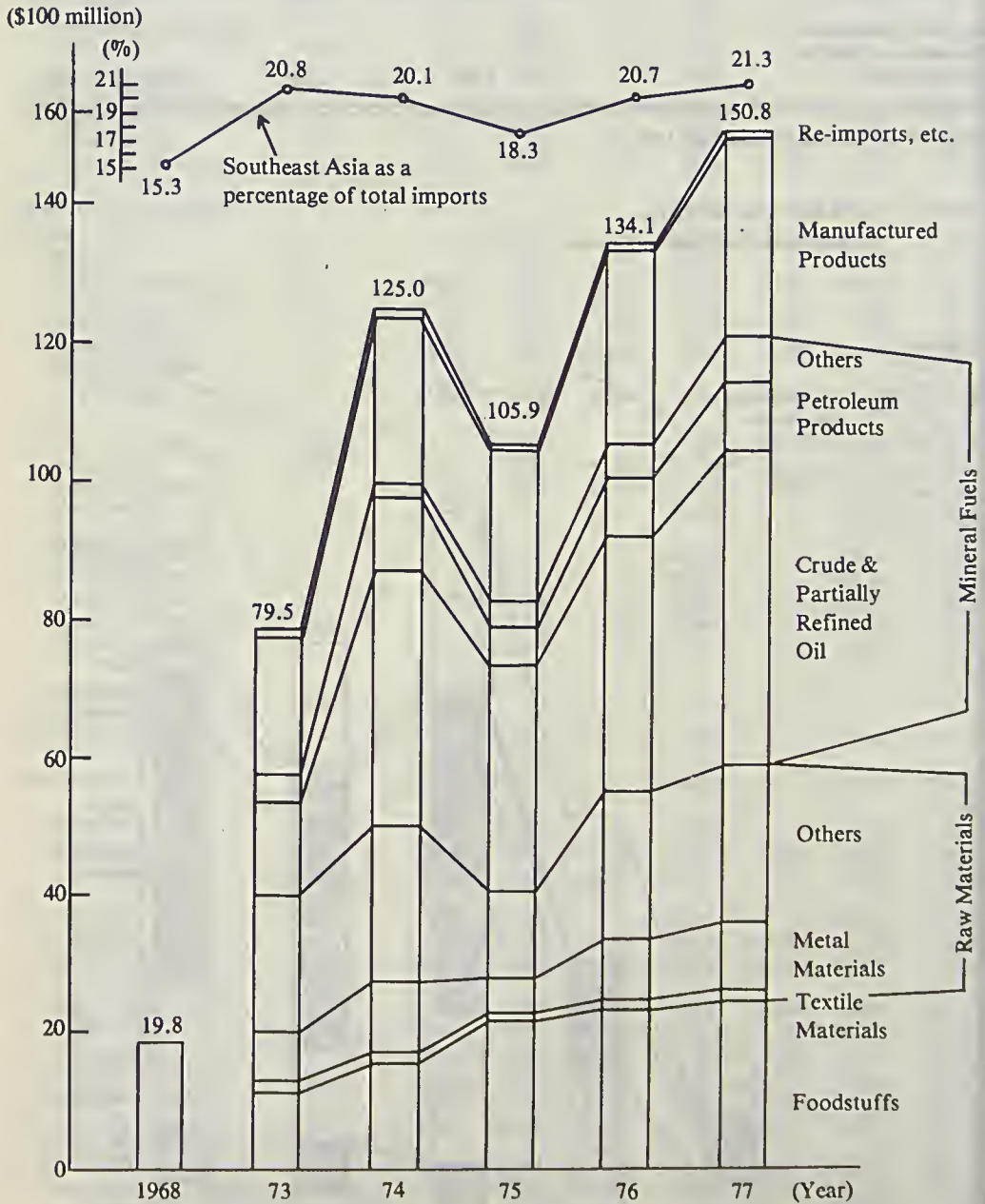
Grafik II: IMPOR DARI ASIA TENGGARA  
Perubahan dalam Rasio Komponen Komoditi)



Sumber : White Paper on International Trade, MITI, 1977



Grafik IIA: IMPOR DARI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

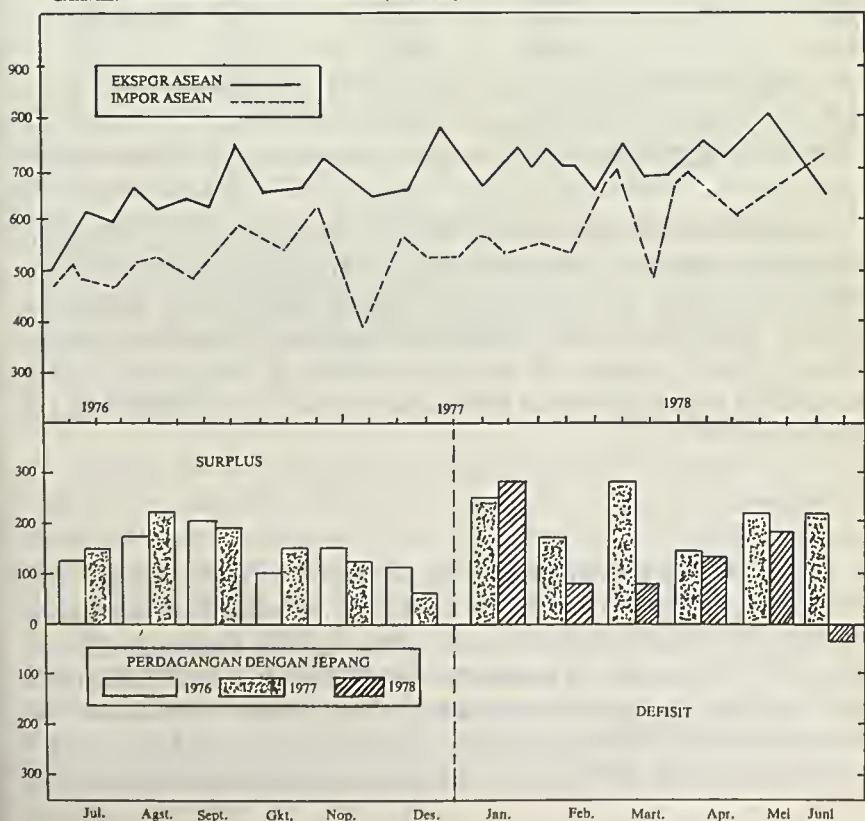


Sumber : White Paper on International Trade, MITI, 1977

berkenaan dengan Asia Tenggara amat berbeda dari wilayah yang dianggap sebagai sumber suplai bahan-bahan mentah bagi industri-industri Jepang. Lihat juga Grafik IIB untuk angka-angka dan trend-trend lain sampai Juni 1978.

Terdapat tiga kategori impor dari Asia Tenggara, yaitu hasil produksi pabrik, bahan bakar mineral, dan bahan mentah serta bahan makanan. Dalam hal hasil produksi pabrik, kebanyakan barang impor yang berasal dari negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan, sedangkan minyak, bahan mentah industri dan bahan makanan biasanya akan diimpor dari negara-negara Asia Tenggara.

Grafik IIB: PERDAGANGAN ASEAN — JEPANG (Juta dollar)



Perdagangan ASEAN dengan Jepang mengalami defisit \$ 48,3 juta dalam bulan Juni, terutama disebabkan pajak minyak yang mempunyai efek selama bulan tersebut, yang memberanikan para pengimpor untuk melengkapi pengapalan pada akhir Mei. Surplus biasa ASEAN dengan Jepang paling banyak disebabkan ekspor minyak oleh Indonesia.

### *Jepang dan ASEAN*

Impor Jepang dari ASEAN dalam tahun 1976 dan 1977 adalah sebagai berikut:

	Nilai Dalam Juta US\$		Persentase volume Impor Total Jepang	
	(1976)	(1977)	(1976)	(1977)
Indonesia	4.090,6	4.996,6	6,3	7,1
Malaysia	1.362,2	1.560,6	2,1	2,2
Muangthai	848,0	748,2	1,3	1,1
Pilipina	793,0	897,4	1,2	1,3
Singapura	646,6	687,4	1,0	1,0
Jumlah	7.740,4	8.890,2	11,9	12,7

Dikatakan bahwa kira-kira 57% impor Jepang dari Asia Tenggara berasal dari ASEAN, di mana bagian Indonesia kira-kira 30%, terutama jika kita memperhitungkan impor Jepang dari Singapura, termasuk yang berasal dari Indonesia, walaupun jumlahnya sangat menurun. Seperti terlihat dari data-data statistik di atas, impor Jepang dari ASEAN meningkat dari 11,9% dalam tahun 1976 menjadi 12,7% dalam tahun 1977.

#### *1. Indonesia*

Impor Jepang dari Indonesia dalam tahun 1976 berjumlah US\$ 4.090,7 juta yang terdiri atas bahan makanan termasuk ikan dan udang yang bernilai US\$ 208,0 juta, bahan mentah US\$ 836,3 juta, bahan logam US\$ 102,8 juta, dan bahan mentah lainnya hanya US\$ 20,6 juta untuk karet alam, sedangkan impor bahan bakar mineral dari Indonesia berjumlah US\$ 2.972,4 juta (lihat Tabel 6). Angka tahun 1977 adalah sebesar US\$ 4.996,5 juta. Kenaikan terjadi pada bahan bakar mineral.

Menurut *Asian Wall Street Journal*, 22 Agustus 1978, komponen-komponen ekspor bahan bakar mineral dalam tahun 1977 adalah sebagai berikut:



Jepang	: 48%
AS	: 37%
Trinidad	: 7%
Pilipina	: 2%
Lain-lain	: 6%
<hr/>	
	100%

Dalam hal suplai bahan mentah dari ASEAN, peranan Indonesia terutama antara Indonesia dan Jepang sangat berarti, walaupun dari pandangan perdagangan internasional Jepang, suplainya hanya sebesar 10%.

## 2. *Malaysia*

Impor Jepang dari Malaysia dalam tahun 1976 bernilai US\$ 1.362,2 juta dengan bahan mentah yang bernilai US\$ 843,1 juta, yang paling menonjol. Dari impor bahan mentah, kayu berjumlah US\$ 687,6 juta, karet alam US\$ 36,6 juta dan minyak palm US\$ 44,6 juta. Impor bahan bakar mineral bernilai US\$ 234,1 juta dan timah US\$ 135,6 juta.

Maka sejauh menyangkut kayu, Malaysia dan Indonesia dalam tahun 1977 merupakan pensuplai-pensuplai utama Jepang (lihat Tabel 10). Impor tahun 1977 meningkat menjadi US\$ 1.560,6 juta.

## 3. *Muangthai*

Dalam tahun 1976 Jepang mengimpor dari Muangthai komoditi-komoditi bernilai US\$ 848,0 juta, di mana US\$ 526,8 juta adalah impor bahan makanan, antara lain, ikan yang bernilai US\$ 96,6 juta, buah-buahan dan sayur-sayuran US\$ 39,7 juta, gula US\$ 240,1 juta dan makanan ternak US\$ 128,7 juta.

Impor bahan mentah berjumlah AS\$ 202,0 juta, di mana karet alam yang bernilai US\$ 143,3 juta selama ini merupakan komponen terbesar melebihi karet alam yang diimpor dari Malaysia dan Indonesia. Hasil produksi pabrik, termasuk timah seluruhnya berjumlah US\$ 116,2 juta (lihat Tabel 9). Angka-angka tahun 1977 menunjukkan suatu penurunan menjadi US\$ 748,3 juta.

#### 4. *Pilipina*

Impor Jepang dari Pilipina dalam tahun 1976 berjumlah US\$ 793,0 juta. Bahan mentah yang bernilai US\$ 476,0 juta menduduki tempat terkemuka, sedangkan bahan-bahan logam berjumlah US\$ 288,8 juta dan bijih logam non-ferrous US\$ 273,4 juta, dimana bijih tembaga bernilai US\$ 246,8 juta.

Berikutnya bahan-bahan makanan dengan US\$ 244,7 juta, di mana kira-kira US\$ 149,3 juta adalah untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, dengan pisang yang bernilai US\$ 128,6 juta, sebagai komponen terbesar. Gula yang bernilai US\$ 62,6 juta merupakan bahan impor dari Pilipina, sedangkan hasil produksi pabrik yang diekspor ke Jepang seluruhnya berjumlah US\$ 58,9 juta (lihat Tabel 8). Impor dari Pilipina meningkat menjadi US\$ 897,3 juta dalam tahun 1977.

#### 5. *Singapura*

Impor Jepang dari Singapura berjumlah US\$ 646,6 juta di mana hasil produksi minyak yang bernilai US\$ 458,4 juta selama ini merupakan bahan impor yang terbesar. Ini menunjukkan betapa pentingnya Singapura sebagai pemasok hasil produksi minyak Jepang. Ekspor total Singapura akan komoditi ini berjumlah US\$ 3.783,8 juta dalam tahun 1976. Impor dari Singapura meningkat menjadi US\$ 687,3 juta dalam tahun 1977.

Dibandingkan dengan impor hasil produksi pabrik Jepang, tanpa timah, dari negara-negara ASEAN lainnya, impor dari Singapura yang bernilai US\$ 152,6 juta adalah yang paling tinggi, dengan mesin-mesin serta peralatan sebanyak US\$ 87,7 juta sebagai komponen terbesar. Besar kemungkinan bahwa mereka merupakan produk pabrik-pabrik yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan Jepang di Singapura.

Hasil produksi pertanian sukar sekali diekspor dari Singapura. Mungkin berarti untuk ekspor hasil produksi pertanian dari Indonesia, Singapura tidak lagi dipergunakan sebagai pelabuhan pemindahan muatan (port of transshipment) dan ini hanya berlaku bagi barang-barang impor Jepang ke Indonesia (lihat Tabel 7).

Dari data statistik mengenai barang-barang impor Jepang dari ASEAN, terlihat bahwa dalam tahun 1976 Indonesia dan Malaysia

adalah pensuplai utama bahan bakar mineral, kayu dan ikan. Sebaliknya Pilipina dan Muangthai adalah pensuplai penting buah-buahan dan sayur-sayuran serta gula bagi Jepang, tetapi ekspor gula dari Muangthai jauh melampaui ekspor yang berasal dari Pilipina.

Muangthai mengekspor lebih banyak karet alam daripada Malaysia dan Indonesia, walaupun kedua negara ini adalah penghasil tradisional karet alam. Paling mungkin dengan menggunakan "petunjuk administratif". Ini merupakan strategi perdagangan Jepang, karena Eropa dan Amerika Serikat adalah pasar-pasar tradisional karet alam dari Indonesia dan Malaysia.

### BADAN-BADAN MULTINASIONAL — SOGO SHOSHA

Kita telah meninjau pola-pola perdagangan antara Jepang dan dunia internasional, antara Jepang dan Asia Tenggara, dan antara Jepang dan ASEAN dari sudut pandangan makro, tetapi selanjutnya kita akan memusatkan perhatian pada perdagangan antara Jepang dan negara-negara ASEAN dari sudut pandangan bisnis.

Tidak bisa diingkari bahwa dalam hal perdagangan antara Jepang dan ASEAN, badan-badan multinasional Jepang atau "Sogo Shosha" telah memainkan peranan yang dominan (lihat Grafik III). Diketahui juga perusahaan-perusahaan dagang umum, Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, C. Itoh (tempat Ataka dilahirkan), Sumitomo Shoji, Nissho Iwai, Toyo Menka, Kanematsu Gosho dan Nichimen adalah kesembilan badan multinasional besar Jepang, yang selanjutnya bisa dilihat pada data bersangkutan di daftar Lampiran.

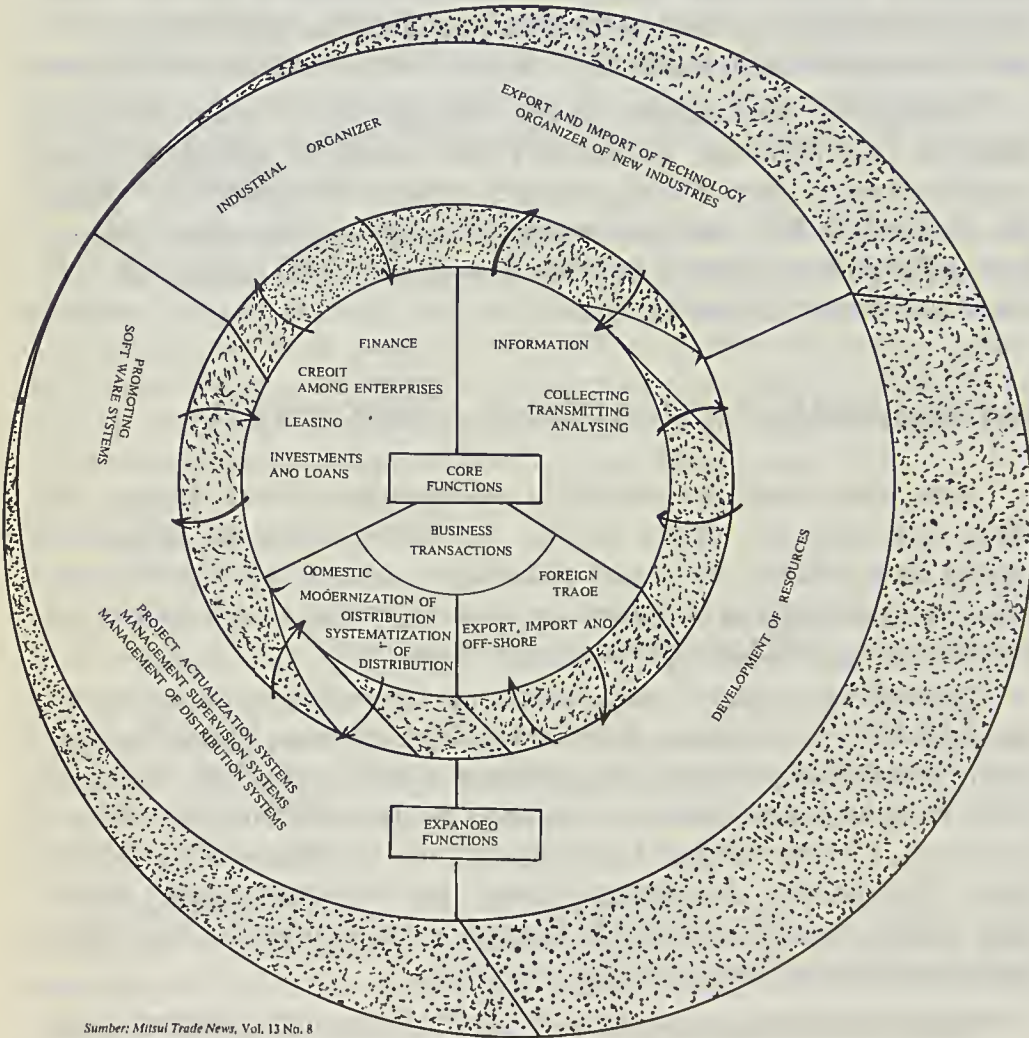
Ketika perusahaan-perusahaan dagang umum ini telah mengembangkan "struktur kekuatan bersegi lima" — modal, manajemen, teknologi, jaringan internasional dan bantuan pemerintah — mereka membentuk suatu kekuatan luar biasa dalam hubungan perdagangan Jepang-ASEAN dan perdagangan luar negeri Jepang.

### Peranan "Sogo Shosha" dalam Perdagangan Luar Negeri Jepang

Dalam tahun 1950 kira-kira 85% impor Jepang dan kurang lebih 80% eksportnya telah dikuasai oleh "Sogo Shosha" tersebut. Pertengahan 1960 jumlah yang mereka kuasai menurun sekitar 70%. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kurang lebih 30% perdagangan luar



Grafik III: FUNGSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAGANG UMUM (SOGO SHOSHA)



Sumber: Mitsui Trade News, Vol. 13 No. 8  
August, 1976

negeri Jepang telah diteruskan oleh pabrik-pabrik mereka, yang berarti mereka mengimpor bahan-bahan mentah dan mengekspor hasil produksi mereka sendiri. Walaupun demikian kurang lebih 90% barang-barang seperti baja, mobil, kapal dan peralatan industri telah diekspor oleh "Sogo Shosha". Saat ini mereka masih menguasai sekitar 50% barang-barang tersebut, sementara pabrik-pabrik menguasai kurang lebih 45%, tetapi dalam wilayah-wilayah mereka sendiri, perusahaan-perusahaan dagang umum masih mengendalikan sekitar 90% perdagangan luar negeri Jepang.<sup>1</sup>

Penulis Nagahide yakin bahwa "Sogo Shosha" berhubungan erat dengan industri-industri kimia dan berat (lihat tabel yang bersangkutan pada Lampiran I di mana akan terlihat bahwa ekspor Jepang ke ASEAN terdiri atas bagian besar hasil-hasil produksi industri-industri ini). Maka jika pabrik-pabrik menyalurkan hasil-hasil produksi, hubungan tersebut akan merenggang tetapi proses untuk melengkapinya akan memakan waktu, walaupun beberapa aspek seperti keuangan dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha ini. Walaupun demikian, hubungan erat antara "Sogo Shosha" dengan bank-bank internasional yang besar telah memberikan mereka pengaruh yang lebih baik, sehingga banyak pengusaha pabrik masih membutuhkan jasa-jasa dan perantara perusahaan-perusahaan dagang umum.

Prof. Tsurumi<sup>2</sup> yakin bahwa sampai sekarang "Sogo Shosha" masih memperlihatkan fleksibilitas organisasi mereka dalam menghadapi perubahan-perubahan iklim perdagangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di front dalam negeri, mereka bekerjasama dengan badan-badan multinasional asing ini, Jepang merupakan suatu pasar yang sukar untuk dimasuki karena sistem distribusi yang terlalu berbelit-belit. Di luar negeri, "Sogo Shosha" membentuk ikatan-ikatan dengan pengembang-pengembang sumber alam. Negara-negara berkembang yang tidak mempunyai jaringan internasional serta menemukan kesukaran dalam memasarkan hasil-hasil produksi dari industri-industri inti mereka sering menggunakan jasa perusahaan-perusahaan dagang umum Jepang (seperti Singapura) yang juga

1 Shioda Nagahide: "The Sogo Shosha at the Turning Point", *Japan Quarterly*, April—Juni 1978

2 Yoshi Tsurumi, *The Japanese are Coming: A Multinational Interaction of Firms and Politics*, Ballinger Publishing Company, 1976

memasuki bidang-bidang "manufacturing" ASEAN untuk skala yang besar.

## INVESTASI JEPANG

Menurut "Japan's 1977 White Paper on International Trade", investasi Jepang di luar negeri sampai Maret 1976 berjumlah kurang lebih US\$ 16 milyar, yang jauh di bawah AS dengan US\$ 133,2 milyar, dan Inggris dengan US\$ 38,9 milyar tetapi hampir sama dengan Jerman Barat yang juga berjumlah US\$ 16 milyar.

Investasi Jepang di Asia berjumlah 29%, terlihat pada Tabel di bawah di mana investasi Jepang di Indonesia adalah yang terbesar dari investasi Jepang di ASEAN. Dari tabel tersebut bisa dicatat juga bagaimana pola keuangan "partner-partner" usaha patungan Jepang di ASEAN. Angka-angka tersebut diambil dari angka-angka MOF seperti pada akhir Maret 1974, tetapi mungkin sekali pola ini masih berlaku pada waktu sekarang.

	Modal Sendiri	(dalam juta US\$)	Modal Pinjaman
Indonesia	239		560
Malaysia	106		92
Singapura	120		45
Muangthai	115		44
Pilipina	66		63
Korea Selatan	372		38

Perbandingan modal sendiri dan pinjaman Indonesia adalah sekitar 1 : 2,4, sedangkan Pilipina mempunyai perbandingan hampir 1 : 1. Ini mungkin mencerminkan luasnya perkembangan pasar modal dan uang di negara tersebut. Dalam hal Singapura, Malaysia dan Muangthai, tampaknya partner-partner nasional sanggup mencari sendiri modal bersih, dan modal pinjaman dapat diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan dalam negeri (domestically based financial institutions). Di Indonesia dana yang ditanam oleh "sogo shosha" pada usaha-usaha patungan adalah kecil dibandingkan dengan dana tersedia untuk maksud-maksud keuangan lainnya, seperti pinjaman dan kredit



buat pembelian bahan mentah, mesin-mesin dan peralatan. Diperkirakan bahwa investasi langsung dalam bentuk-bentuk kredit perdagangan, pinjaman dan sejenisnya sekurang-kurangnya lebih dari 10-15 kali.

Tampaknya pola keuangan yang sama bisa juga diterapkan pada negara-negara ASEAN lainnya. Peranan "sogo shosha" sebagai tangan penyebar bank-bank Jepang dan bank lain dari Jepang sangat efektif dalam pengendalian perdagangan antara Jepang dan ASEAN.

### Jenis Investasi yang Sedang Dikembangkan<sup>1</sup>

Negara-negara ASEAN menitikberatkan pada peningkatan produksi lokal perusahaan-perusahaan patungan, pengangkatan lebih banyak warga negara pada tingkat pimpinan, dan peningkatan perbandingan ekspor hasil selesai dalam usaha mereka meningkatkan kemampuan nasional, dan ini mengarah kepada suatu kecenderungan mencari jenis investasi lainnya. Pola investasi yang sedang dikembangkan sekarang adalah sebagai berikut:

1. Proyek-proyek investasi yang sangat menitikberatkan pada bantuan yang menerima fasilitas dan bantuan dari pemerintah. Mereka adalah proyek-proyek besar yang bersifat padat modal, seperti proyek Asahan di Sumatera Utara dan proyek petro kimia yang direncanakan di Singapura.
2. Investasi di negara-negara industri, antara lain, dengan maksud mengurangi efek proteksionisme di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan Jepang yang sedang dan akan menanamkan modal di Amerika Serikat adalah Honda, Matsushita, Sanyo, Mitsubishi dan sebagainya.
3. Keharusan Jepang untuk mengubah dan menyesuaikan diri dengan produksi dunia internasional dalam suatu bentuk yang akan mempermudah "division of labour on an international scale". Sebagai contoh, perusahaan tekstil di Jepang tidak lagi menguntungkan, maka lebih baik dialihkan ke Korea Selatan, Taiwan, atau Hong Kong.
4. Investasi di bidang-bidang kimia, konstruksi, baja dan logam non-ferrous dan perikanan.

<sup>1</sup> Susumu Awanohara: "Not Enough Money in Hand to Invest Abroad", *FEER*, Juli 28 1978

Khusus ASEAN, investasi akan diadakan di:

- a. Filipina : Baja, petro-kimia dan pencairan tembaga terpadu
- b. Indonesia : Penyimpanan dan pengilangan minyak
- c. Malaysia : Petro-kimia
- d. Muangthai : Pabrik baja
- e. Singapura : Petro-kimia

di samping bantuan untuk kelima proyek industri ASEAN.

## PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAGANG UMUM JEPANG AKAN TERUS MEMAINKAN PERANAN YANG DOMINAN DALAM HUBUNGAN PERDAGANGAN ASEAN-JEPANG

Berdasarkan pengalaman, data statistik yang tersedia dan cara mengerjakannya, kami yakin bahwa perusahaan-perusahaan dagang umum Jepang akan terus memainkan peranan dominan dalam memperkuat hubungan perdagangan antara Jepang dan ASEAN. Sehubungan dengan ini, salah satu kesimpulan MY Yoshino sangat tepat. Dalam bukunya yang berjudul *Japan's Multinational Enterprises*, Harvard University Press 1976, ia mengatakan:

"Perusahaan-perusahaan dagang pasti akan terus memainkan peranan penting sebagai agen perdagangan Jepang. Investasi mereka terhadap bahan mentah dan "manufacturing ventures" di luar negeri tentu akan bertumbuh. Namun demikian sebagai alasan yang perlu dicatat, investasi mereka terutama akan merupakan usaha melengkapi perdagangan, dan peranan utama mereka cenderung untuk tetap memudahkan gerakan-gerakan multinasional oleh yang lain. Oleh karena sebagai daerah para ahli yang utama dan organisasi sekelilingnya yang tinggi, perusahaan-perusahaan dagang Jepang yang besar tampaknya tidak akan berkembang menjadi perusahaan-perusahaan multinasional dengan pengawasan terpusat yang kuat terhadap afiliasi-afiliasi dan sistem koordinasi yang luas. Di daerah-daerah di mana mereka telah menanamkan modalnya, perusahaan-perusahaan dagang akan menghadapi ancaman konstan terhadap stabilitas mereka."

Walaupun kesimpulan Yoshino bahwa perusahaan-perusahaan dagang umum ini akan terus memainkan peranan penting, kesimpulannya bahwa mereka tidak akan menjalankan suatu pengawasan pusat terhadap afiliasi mereka mungkin tidak benar. Di negara-negara ASEAN, Tokyo ditunjuk sebagai pusat hampir semua keputusan, maka sekarang pada dasarnya terdapat suatu "management through telex and telephones".

## Perubahan-perubahan yang Akan Mempengaruhi Perdagangan Luar Negeri

Sejak akhir 1950 Jepang telah menitikberatkan struktur perdagangan dan industri pada industri kimia dan berat. Ini menyebabkan efek-efek yang kurang baik terhadap lingkungan, seperti masalah kependudukan, perumahan, investasi modal, yang mempengaruhi mutu kehidupan dan standar hidup orang-orang Jepang.

Dewasa ini usaha Jepang untuk mengubah struktur industri menjadi sesuatu yang lebih bersifat padat teknologi dan memiliki nilai tambah (added value) yang lebih tinggi, belum dirumuskan dalam suatu bentuk yang lebih tinggi, belum dirumuskan dalam suatu bentuk yang lebih terperinci, maka Jepang menuju ke arah struktur yang lebih "sophisticated", di mana akan terjadi pengurangan kebutuhan bahan mentah dan bahan bakar mineral.

Menurut Walter Browne,<sup>1</sup> industri Jepang bersifat "export-oriented", karena dalam 10 tahun antara tahun 1960 dan 1970, industrinya telah meningkatkan kapasitas produksinya pada jumlah yang mendesaknya untuk mengeksport hasil produksinya. Pertumbuhan kapasitas produksi sangat tinggi daripada pertumbuhan standar hidup orang-orang Jepang, maka terdapat kelebihan kapasitas yang tidak dapat diserap oleh para konsumen Jepang. Maka sejauh tidak terjadi perubahan dalam struktur industri Jepang, badan-badan multinasional Jepang akan tetap berorientasi ekspor dan hanya pada saat terjadi perubahan struktur perdagangan yang vertikal saat ini, seseorang bisa mengharapkan perkembangan struktur perdagangan yang horisontal.

## RINGKASAN

Struktur perdagangan dan industri Jepang menitikberatkan pada industri kimia dan berat, dan sekarangpun telah mempengaruhi juga pola impor dan ekspor Jepang yang mengakibatkan suatu hubungan perdagangan yang vertikal dengan ASEAN. Ini berarti bahwa Jepang melihat ASEAN sebagai pemasok hasil produksi industrinya. Ini terlihat pada angka-angka serta hasil produksi yang diimpor dari ASEAN dan Jepang. Dalam tahun 1976, ekspor Jepang ke ASEAN

1 "Is Japan's Monetary Policy Lop-sided", *Asian Finance*, 15 Juli 1978



sebesar AS\$ 6,0 milyar (dalam tahun 1977, US\$ 6,8 milyar) atau 9% jumlah ekspor total, sedangkan impor Jepang dari ASEAN dalam tahun 1976 sekitar US\$ 7,7 milyar atau 12% (dalam tahun 1977 US\$ 8,9 milyar) dari jumlah impor total.

Mengenai ekspor, Jepang mengeksport sekitar 84,2% hasil produksi industri kimia dan berat ke ASEAN (lihat Tabel yang bersangkutan) sedangkan impornya dari ASEAN meliputi 13,6% bahan makanan, 30,6% bahan mentah, dan 47,3% bahan bakar mineral.

Pertumbuhan kapasitas produksi Jepang sangat pesat dibandingkan dengan pertumbuhan standar hidup masyarakatnya. Ini telah menyebabkan kelebihan kapasitas yang tidak bisa diserap oleh para konsumen Jepang, sehingga kapasitas lebih ini harus diatur pada pasaran internasional melalui perantara "sogo shosha"-nya dengan semua fasilitas yang tersedia untuk mereka. Sebagai akibat, surplus pada neraca perdagangan Jepang terus meningkat dan telah menyebabkan reaksi-reaksi keras dari banyak negara maju. Trend ini akan menghadapi hubungan-hubungan yang "tegang" dengan negara-negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah mendesak Jepang untuk mengurangi surplus perdagangannya dengan mengimpor lebih banyak dari negara tersebut. Eropa Barat telah menciptakan gagasan "Organized Marketing Arrangements (OMAS)", yang pada dasarnya, merupakan nama lain dari proteksionisme.

Di Jepang sendiri suatu perubahan dari struktur perdagangan dan industri saat ini dengan menitikberatkan pada industri-industri kimia dan berat ke struktur yang bersifat padat teknologi dengan nilai tambah yang lebih tinggi sedang dipikirkan, maka akan berkuranglah ketergantungan pada bahan bakar mineral. Tetapi dalam jangka pendek, Jepang tetap merupakan negara berorientasi ekspor, yang mencerminkan struktur industri dan ekonominya dewasa ini.

Mengenai ASEAN, hubungan perdagangan antara Jepang dengan ASEAN adalah penting, dan bagi ASEAN, Jepang juga merupakan partner dagang yang penting. Maka apa yang terjadi pada sektor perdagangan di Jepang serta usaha-usahanya mencari kesempatan akan mempunyai akibat juga di ASEAN.

## Beberapa Masalah dan Prospek

Jika Jepang berhasil mengubah struktur industrinya, impor bahan bakar mineral<sup>1</sup> dan bahan mentahnya dari ASEAN akan merosot. Maka beberapa industri Jepang mencari jalan ke luar di ASEAN dalam kerangka "international division of labour".

Sehubungan dengan ini, peranan yang dimainkan perusahaan-perusahaan dagang umum, Jepang akan tetap dominan, bukan hanya sebagai partner dalam usaha-usaha patungan tetapi juga sebagai pen-suplai fasilitas serta kredit perdagangan dan penyalur hasil produksi ekspor ASEAN. Sebagai contoh, ekspor hasil produksi Singapura ke Jepang disalurkan melalui "sogo shosha" ini. Contoh-contoh persoalan lain yang dicatat Malaysia bisa dilihat pada Lampiran II.

Seperti diketahui, beberapa proyek ASEAN akan memperoleh bantuan dari Jepang. Mereka adalah proyek-proyek besar dan dikelompokkan sebagai proyek-proyek yang berorientasi pada bantuan. Walaupun dalam jangka panjang, akan terjadi perubahan struktur perdagangan dan industri Jepang, hubungan perdagangan yang vertikal saat ini akan terus ada dalam sepuluh tahun berikutnya.

Tersedianya lebih banyak bantuan di Jepang, tidak bisa dicegah kemungkinan bahwa dalam sepuluh tahun kemudian ASEAN akan melihat lebih banyak investasi padat modal yang bermunculan. Dengan mengapresiasi akan yen dan harga pokok yang lebih tinggi bagi hasil produksi Jepang, akan terjadi suatu pengiriman suplai hasil produksi Jepang melalui perusahaan-perusahaan patungan Jepang di negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan negara-negara ASEAN.

Ekspor hasil industri dari negara-negara ASEAN akan meningkat di tahun-tahun mendatang, tetapi peningkatan ini mungkin sekali disalurkan melalui "sogo shosha", karena tanpa campur tangan mereka pasaran dalam negeri Jepang tidak bisa ditembus.

Dalam waktu-waktu mendatang, semakin banyak perusahaan Jepang harus mengelola bahan mentah mereka di ASEAN, karena bahan mentah tersebut tidak lagi diijinkan kemudian untuk diekspor sebagai bahan mentah. Kami yakin bahwa dengan dana yang tersedia dan masuknya ke pasar-pasar uang internasional, Jepang mampu untuk mulai mengelola bahan mentahnya di ASEAN dan menjadikan

1 Saya secara khusus mengarah kepada perjanjian Jepang dan RRC dewasa ini yang mempertimbangkan jumlah impor bahan bakar mineral sebesar 12% pada tahun-tahun mendatang terhadap harga yang diturunkan.



bahan tersebut hasil selesai. Sebagai contoh, kertas dari bahan mentah adalah dari ASEAN.

Lembaga-lembaga keuangan Jepang dan perusahaan-perusahaan dagang yang besar akan terus memainkan peranan penting dan pengaruh mereka sebagai pensuplai fasilitas dan kredit murah secara relatif akan terus dirasakan dalam hubungan perdagangan Jepang-ASEAN, terutama Indonesia, dalam sepuluh tahun berikutnya.

Dalam memperkuat dan melanjutkan hubungan perdagangan yang vertikal, "sogo shosha" akan terus mengendalikan perdagangan vertikal ini melalui fasilitas-fasilitas mereka yang merupakan pencerminan kekuatan akan struktur kekuatan bersegi lima. Mereka mungkin sekali dapat berperan juga sebagai perantara di pasar-pasar internasional, jika kita berhasil memproduksi hasil-hasil setengah jadi dan jadi dari bahan mentah kita sendiri.

Perkembangan perdagangan antara ASEAN dan Jepang akan ditunjang oleh kegiatan-kegiatan pasar modal dan uang Jepang. Semakin banyak negara-negara ASEAN mendapatkan keuntungan atas tersedianya dana pada pasar-pasar tersebut. Kami percaya bahwa ini merupakan suatu sumber alternatif yang bisa meningkatkan kredibilitas dan penghargaan kami, jika kami bisa menyadap sumber ini pada proyek-proyek yang menguntungkan dan yang bisa diperoleh sendiri (self-liquidating).

Tetapi kita tidak perlu menyerahkan semuanya kepada lembaga-lembaga keuangan Jepang, karena dalam tahun-tahun mendatang lembaga-lembaga keuangan kita sendiri harus juga membentuk kelompok dengan ahli-ahli mereka di bidang ini, sejauh sumber alternatif ini akan menjadi sumber penting dalam usaha-usaha kita untuk menciptakan suatu "image of respectability" di dunia industri dalam bisnis serta juga di perbankan.

Walaupun demikian, semua kegiatan tersebut akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih meruncing, jika salah satu partner terlalu dominan. Tetapi jika negara-negara ASEAN tidak bisa meningkatkan kemampuan mereka, akan terjadi suatu ketidakseimbangan kekuatan. Untuk menciptakan partner dagang yang sederajat, kedua pihak harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu, sehingga masing-masing bisa menuntut perlakuan yang adil dan wajar.

'Partnership' (persahabatan) yang sederajat akan tercapai secara otomatis jika kondisi-kondisi tersebut dipenuhi. Dalam kenyataan, hal ini terlihat pada tingkat operasional di mana perusahaan-perusahaan dagang umum, bank-bank, dan lain-lain giat bekerja.



## Lampiran I

## MITSUBISHI CORP.

Est.: April, 1950 Fiscal Year Ended: March, (Mid) September

Head Office: 2-6-3, Marunouchi, Chiyodaku, Tokyo 100

Tel.: 03-210-2121 Telex: 22222

Branches: Osaka (Tel. 06-343-1111), Nagoya (Tel. 052-565-2111)

Chairman: Chujiro Fujino President: Bunichiro Tanabe

References: Mitsubishi, Tokyo, Dai-ichi Kangyo, Sanwa, Tokai, Mitsubishi Trust.

Capital Change	Allotment Ratio	Capital (Y mil.)	Capital: (Y50 par value)	45,093 ©
(May '50)	SE	30)	Total Assets: (Mar. '77)	3,716,123
Apr. '75	1:20 G	36,649	Stockholders' Equity (Mar. '77)	141,512
Oct. '75	1:20G	38,486	Debts: (Mar. '77)	1,360,492
Nov. '75	PG 25	39,736	Capital Surplus: (Mar. '77)	19,757
Apr. '76	1:20G	41,744	Employees (Age): (Mar. '77)	9,854 (32)
Oct. '76	1:20G	43,938	No. Stockholders: (Mar. '77)	42,968
*1st '78	1:10G PG25		Major Stockholders:	(1,000) %
			Mitsubishi Bank	70,023 (7.8)
			Tokyo M. & F. Ins.	65,029 (7.3)
			Mitsubishi Heavy Ind.	49,015 (5.5)
			Meiji M. Life Ins.	45,157 (5.0)
			Mitsubishi Trust	36,437 (4.1)
			Bank of Tokyo	29,890 (3.3)
			Foreign Ownership	14,837 (1.7)
			No. Shares Out.: (Mar. '77)	896,925
			Listed: All markets, Luxemburg	
			Underwriters: (M) Nikko (S) Yamaichi, Nomura,	
			Daiwa, Kangyo Kakumaru, New Japan	
			Sales Breakdown in %: (Mar. 1977) Metals (21),	
			fuels (19), machinery (15), foodstuffs (13),	
			chemicals (8), nonferrous metals (9), others (15)	
			Trade Ratio: 53%	

## Business Results: (Y mil.)

	Sales	Current Profit	Profit	Earnings	Dividend Per Share	Equity
Sept. 1974	4,760,148	16,749	6,986	Y 10.0	Y 3.75	Y 138.1
Mar. 1975	4,647,532	16,778	7,154	10.2	3.25	144.5
Mar. 1976	9,140,648	24,356	14,527	18.3	6.5	144.2
Mar. 1977	9,609,009	40,364	17,945	20.0	6.75	157.8
Mar. 1978*	10,300,000	43,000	19,000	21.1	7	
Sept. 1976	4,599,023	23,106	9,050	10.8	3.25	145.0
Sept. 1977*	5,000,000	24,000	10,000	11.1	3.5	

Characteristics: Largest general trading house in Japan and virtual leader of the mighty Mitsubishi group. Active in development overseas of natural resources, such as crude oil, LNG and ores.

Remarks: Profit will top target only modestly in Mar. '78 term in view of severe business climate. Profit will show record high partly from investment earnings from overseas and declining interest payment burden. Started LNG development in Sarawak for importing 6 million tons annually from 1983. Petrochemical project in Saudi Arabia may start as optional undertaking.

**MITSUI & CO.**

Est.: July, 1947 Fiscal Year Ended: March, (Mid) September  
 Head Office: 1-2-1, Otemachi, Chiyodaku, Tokyo 100  
 Tel.: 03-285-1111 Telex: 22253  
 Offices: Osaka, Nagoya, Sapporo & 55 others Overseas: 127  
 Chairman: Eichi Hashimoto  
 President: Yoshizo Ikeda  
 References: Mitsui, Fuji, Tokyo, Mitsui Trust, Sumitomo

Capital Change	Allotment Ratio	Capital (Y mil.)	Capital: (Y50 par value)	45,823©
(May '49)	R	25	Total Assets: (Mar. '77)	3,959,460
Dec. '72	PO50	25,677	Stockholders' Equity: (Mar. '77)	151,111
Oct. '73	1:4G	32,514	Debits: (Mar. '77)	1,762,587
Sept. '76	PO40	36,492	Capital Surplus: (Mar. '77)	47,306
Apr. '77	1:4G	45,718	Employees (Age): (Mar. '77)	11,037 (35)
•	N		No. Stockholders: (Mar. '77)	101,137
			Major Stockholders: (1,000) %	
			Mitsui Bank	46,015 (6.3)
			Fuji Bank	36,296 (5.0)
			Bank of Tokyo	27,210 (3.7)
			Taisho M. & F. Ins.	25,000 (3.4)
			Mitsui M. Life Ins.	24,160 (3.3)
			Mitsui Trust	20,417 (2.8)
			Foreign Ownership	24,244 (3.3)
			No. Shares Out.: (Mar. '77)	731,506
			Listed: All markets, Luxembourg, Amsterdam, Frankfurt, Hong Kong	
			Underwriters: Nomura, Yamaichi, Nikko, Daiwa, New Japan	
			Sales Breakdown in %: (Mar. 1977) Metals (32), machinery (18), chemicals (12), foodstuffs (14), textiles (7), crude oil (7), others Trade Ratio: 49%	

**Business Results: (Y mil.)**

	Sales	Current Profit	Profit	Earnings	Dividend Per Share	Equity
Sept. 1974	4,340,156	16,460	7,052	Y10.6	Y 3.5	Y 159.1
Mar. 1975	4,287,060	18,405	7,087	10.4	3.5	169.0
Mar. 1976	7,885,170	15,169	13,366	19.4	7	182.8
Mar. 1977	9,024,958	23,453	13,325	18.2	7	165.3
Mar. 1978*	9,700,000	28,000	16,000	17.5	7	
Sept. 1976	4,354,780	10,630	6,364	8.7	3.5	200.3
Sept. 1977*	4,700,000	12,000	7,000	7.7	3.5	

**Characteristics:** Tops in major commercial houses vying with Mitsubishi Corp. Leader of Mitsui group. Propelling moves for multinationalization. Actively developing natural resources overseas.

**Remarks:** Current profit will make another energetic rally in Mar. '78 term as gross profits from petroleum, paper-pulp and foodstuffs will improve soundly. Aid to interest payment by related firms is burden. Iran petrochemical project (due to commence operation in 1982) is in smooth swing due to stability of equipment cost. Started develop-and-import of LNG from Abu Dhabi.

## MARUBENI

Est.: December, 1949 Fiscal Year Ended: March, (Mid) September

Head Office: 3-3, Hommachi, Higashiku, Osaka 541

Tel.: 06-266-2111 Telex: 22326 (TKY), 63261 (OSK)

Tokyo Head Office: 1-4-2, Otemachi, Chiyodaku, Tokyo 100

Tel. 03-282-2111

President: Taiichiro Matsuo

References: Fujii, Tokyo, Taiyo Kobe, Yasuda Trust

Capital Change	Allotment Ratio	Capital (Y mil.)	Capital: (Y50 par value)	35,656②
(Juli '50	SE	3,200	Total Assets: (Mar. '77)	2,434,541
Oct. '72	1:10G	30,250	Stockholders' Equity: (Mar. '77)	85,173
Nov. '73	M	30,459	Debts: (Mar. '77)	1,034,862
Oct. '74	PO26.77	32,838	Capital Surplus: (Mar '77)	14,959
Oct. '75	1:10G	35,022	Employees (Age): (Mar '77)	7,976 (34)
*2nd '78	PO20		No. Stockholders: (Mar. '77)	22,268
			Major Stockholders:	(1,000) %
			Fuji Bank	51,784 (7.3)
			Yadusa F. & M. Ins.	38,461 (5.4)
			Taiyo Kobe Bank	31,676 (4.4)
			Nissan Motor	31,460 (4.4)
			Tokio M. & F. Ins.	25,533 (3.6)
			Foreign Ownership	1,326 (0.2)
			No. Shares Out.: (Mar. '77)	713,125
			Listed: All Markets, Dusseldorf, Frankfurt, Amsterdam	
			Underwriters: Yamaichi, Nomura, Daiwa, Nikko, Kangyo Kakumaru, New Japan	
			Sales Breakdown in %: (Mar, 1977)	
			Metals (25), machinery (24), petroleum & chemicals (14), textiles (14), foodstuffs (14), commodities (9) Trade Ratio: 56%	

Business Results: (Y mil.)						
	Sales	Current Profit	Profit	Earnings	Dividend Per Share	Equity
Sept. 1974	2,756,171	10,687	4,912	Y8.1	Y 3	Y 101.0
Mar. 1975	2,792,230	7,898	4,113	6.5	3	113.4
Mar. 1976	5,762,570	16,691	8,914	12.5	6	114.1
Mar. 1977	6,438,242	18,530	8,151	11.4	6	119.4
Mar. 1978*	6,900,000	19,000	8,500	11.9	6	
Sept. 1976	3,166,443	8,976	4,020	5.6	3	116.6
Sept. 1977*	3,400,000	9,000	4,000	5.6	3	

Characteristics: Places third among top commercial houses, originated from textile specialist in Osaka. Has a stable business structure. Plays leading role within Fuyo group led by Fuji Bank.

Remarks: Domestic sales of steel and machinery bottomed out, and exports of plants and chemicals rising. Exempting affiliated firms in shipping, textiles, food, etc., from interest payments totaling Y5 billion a year. Consolidated profits bottomed out in fiscal 1976. Exports of plants and trading among third countries brisk. Pushing overseas development of natural resources.



### C. ITOH & CO.

Est.: December, 1949 Fiscal Year Ended: March, (Mid) September

Head Office: 4-68, Kita-Kyutaramachi, Higashiku, Osaka 541

Tel.: 06-241-2121 Telex: 63260 (OSK), 22295 (TKY)

Tokyo Head Office: Tel. 03-639-5111

Chairman: Masakazu Echigo President: Seiki Tozaki

References: Dai-ichi-Kangyo, Sumitomo, Tokyo, Kyowa, Sumitomo Trust

Capital Change	Allotment Ratio	Capital (Y mil.)	Capital: (Y 50 par value)	34,912
			Total Assets: (Mar. '77)	2,173,066
			Stockholders' Equity: (Mar. '77)	73,220
			Debts: (Mar. '77)	937,812
			Capital surplus: (Mar. '77)	19,216
			Employees (Age): (Mar. '77)	7,399 (32)
			No. Stockholders: (Mar. '77)	29,380
			Major Stockholders:	(1,000) %
			Sumitomo Bank	60,632 (8.7)
			Dai-ichi Kangyo Bank	60,632 (8.7)
			Bank of Tokyo	32,379 (4.6)
			Nippon Life Ins.	27,649 (4.0)
			Asahi M. Life Ins.	25,900 (3.7)
			Tokio M. & F. Ins.	24,376 (3.5)
			Foreign Ownership	6,532 (0.9)
			No. Shares Out.: (Mar. '77)	698,257
			Listed: All Markets, Luxemburg	
			Underwriters: Nikko, Nomura, Daiwa, Yamaichi, New Japan, Kangyo Kakumaru	
			Sales Breakdown in %: (Mar. 1977)	
			Textiles (20), petrochemicals & chemical products (28), metals (15), machinery & construction (18), foodstuffs (13), others (6)	
			Trade Ratio: 50%	

#### Business Results: (Y mil.)

	Sales	Current Profit	Profit	Earnings	Dividend Per Share	Equity
Sept. 1974	2,596,548	8,501	3,159	Y 4.5	Y 3	Y 116.4
Mar. 1975	2,635,199	5,076	719	1.0	3	117.5
Mar. 1976	5,630,673	3,592	(—) 5,770	(—) 8.3	6	103.2
Mar. 1977	6,332,657	15,138	5,354	7.7	6	104.9
Mar. 1978*	7,000,000	17,000	6,000	8.1	6	
Sept. 1976	3,128,293	5,410	2,156	3.1	3	103.3
Sept. 1977*	3,250,000	7,000	2,500	3 6	3	

Characteristics: Fourth among top commercial houses vying with Marubeni. Originated from textile trading specialist in Osaka district. Shifting from Sumitomo group to Dai-ichi Kangyo Bank group.

Remarks: Absorbs Ataka & Co. 5:1, in Oct. 1977. Trading volume will increase to over Y 600 billion annually, and more than 1,000 employees will be accepted. Steel and chemical departments will become stronger. Interest on loans to Toa Oil Co. shelved partly. Receipts of large-scale plant orders at high level, including natural gas treatment plant for Algeria and oil-refining plant for Nigeria.

References: Sumitomo, Kyowa, Sumitomo Trust, Tokyo, Mitsubishi

Remarks: Will be merged by C. Itoh & Co. as of Oct. 1, 1977. Best part of metal, mineral products and chemical divisions will be shifted to new firm together with part of machinery and food divisions. Textile division was transferred to Itohan. Slaughting 800 surplus personnel by voluntary retirement. Tropical lumbers will be taken over by newly-established Ataka Lumber.

## SUMITOMO SHOJI

Est. December, 1919 Fiscal Year Ended: March, (Mid) September

Head Office: 5-15, Kitahama, Higashiku, Osaka 541

Tel.: 06-220-6000 Telex: 63227

Tokyo Head Office: Tel. 03-217-5000 Telex: 22202

Chairman: Yukio Shibayama President: Mitsuo Uemura

References: Sumitomo, Sumitomo Trust, Tokyo, Export-Import Bank, Nippon Fudosan

Capital Change	Allotment Ratio	Capital (Y mil.)	Capital: (Y50 par value)	15,686
(Aug. '49	SE	120)	Total Assets: (Mar. '77)	1,621,529
Aug. '70	M	10,800	Stockholders' Equity: (Mar. '77)	58,515
July '72	PO 24	12,000	Debts: (Mar. '77)	627,162
Oct. '72	1:10G	13,200	Capital Surplus: (Mar. '77)	9,552
July '73	PO21.2	14,260	Employees (Age): (Mar. '77)	6,043 (33)
Oct. '73	1:10G	15,686	No. Stockholders: (Mar. '77)	17,744
*1st '78	PO20		Major Stockholders:	(1,000) %
			Sumitomo Bank	27,259 (8.7)
			Sumitomo M. Life Ins.	15,604 (5.0)
			Sumitomo Trust	13,913 (4.4)
			Sumitomo Metal Ind.	13,799 (4.4)
			Sumitomo Chemical	10,569 (3.4)
			Bank of Tokyo	10,467 (3.3)
			Foreign Ownership	582 (0.2)
			No. Shares Out. (Mar. '77)	313,720
			Listed: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Hiroshima, Fukuoka, Frankfurt	
			Underwriters: (M) Daiwa (S) Nikko, Nomura, Yamaichi	
			Sales Breakdown in %: (Mar. 1977) Metals (34), machinery (23), chemicals & fuels (21), textiles (5), foodstuffs (9), construction & others (8)	
			Trade Ratio: 41%	

## Business Results: (Y mil.)

	Sales	Current Profit	Profit	Earnings	Dividend Per Share	Equity
Sept. 1974	2,503,347	9,438	3,649	Y11.6	Y3.5	Y145.9
Mar. 1975	2,614,442	9,135	3,565	11.4	3.5	153.6
Mar. 1976	5,509,561	17,946	7,302	23.3	7	169.7
Mar. 1977	5,825,444	18,262	7,542	24.0	7	186.5
Mar. 1978*	6,300,000	19,000	7,800	24.9	7	
Sept. 1976	2,833,481	9,084	3,766	12.0	3.5	178.0
Sept. 1977*	3,100,000	9,000	3,800	12.1	3.5	

Characteristics: Commercial division of Sumitomo group. Ranks fifth among trading houses in sales volume based chiefly on heavy and chemical industry goods. Noted for stable management.

Remarks: Mar. '78 term will see slight increase in profits due to drop in interest rate and decrease in reserves against doubtful claims. Company has maneuverability because little involved in depressed sugar refiners and steelmakers equipped with open hearth and electric furnaces. But textiles are doubtful parties to transaction. Oil development and import enterprise in Iraq, started in '76.



References: Sanwa, Dai-ichi Kangyo, Tokyo, Daiwa, Talyo Kobe

Remarks: Expects about 20% growth of machinery, lumbers and chemicals in Mar. '78 term. Sets sales target bullishy at ¥5,200 billion for term. Current profit will swell even without profits from securities sales. Interest payment burden to assist subsidiaries sugar refiners will be heavy. Plans to start LNO project in Indonesia by 1977 autumn.

## TOYO MENKA

Est.: April, 1920 Fiscal Year Ended: March, (Mid) September

Head Office: 2-64, Kawaramachi, Higashiku, Osaka 541

Tel.: 06-208-2211 Telex: 22421 (TKY), 63245 (OSK)

Tokyo Head Office: 1-1-3, Otemachi, Chiyodaku, Tokyo 100

Tel.: 03-218-8781 Telex: 22421

Chairman: Kazuo Yasumoto President: Toshio Takeuchi

References: Tokai, Mitsui, Daiwa, Tokyo, Saitama

Capital Change	Allotment Ratio	Capital (Y mil.)	Capital: (Y50 par value)	12,100
			Total Assets: (Mar. '77)	1,068,370
			Stockholders' Equity: (Mar. '77)	30,393
(July '50	SE	115)	Debts: (Mar. '77)	470,791
Oct. '63	1:2	6,750	Capital Surplus: (Mar. '77)	7,844
Oct. '63	M	7,425	Employees (Age): (Mar. '77)	3,741 (36)
Nov. '72	PO31.5	9,000	No. Stockholders: (Mar. '77)	9,419
Apr. '73	1:10G, TP	10,000	Major Stockholders:	(1,000) %
Mar. '77	1:10G	11,000	Tokai Bank	18,600 (8.5)
Apr. '77	1:10G	12,100	Kanebo Co.	15,666 (7.1)
*2nd '77	1710G		Kondo Spinning	10,000 (4.6)
	PO10		Mitsui Bank	9,100 (4.1)
			Taisho M. & F. Ins.	8,800 (4.0)
			Daiwa Bank	7,078 (3.2)
			Foreign Ownership	381 (0.2)
			No. Shares Out.: (Mar. '77)	220,000
			Listed: Tokyo, Osaka, Nagoya	
			Underwriters: Nikko, Nomura, Daiwa, Yamaichi, Maruman	
			Sales Breakdown in %: (Mar. 1977) Textiles (22), metal & minerals (22), foodstuffs (19), machinery (21), chemicals & oil (12), lumber (4)	
			Trade Ratio: 58%	

## Business Results: (Y mil.)

	Sales	Current Profit	Profit	Earnings	Dividend Per Share	Equity
Sept. 1974	1,216,576	1,899	373	Y1.9	Y3	Y124.6
Mar. 1975	1,227,873	4,116	1,137	5.7	3	127.3
Mar. 1976	2,394,810	4,312	1,492	7.5	6	128.6
Mar. 1977	2,521,751	4,119	1,574	7.2	6	125.6
Mar. 1978*	2,650,000	4,400	1,700	7.0	6	
Sept. 1976	1,253,986	1,904	757	3.8	3	129.4
Sept. 1977*	1,300,000	2,000	700	2.9	3	

Characteristics: Ranks 7th among top commercial houses. Emanated from former raw cotton division of Mitsui & Co. Now strongly teaming up with Tokai Bank.

Remarks: Mar. '78 term will see increase in imports of steel-making materials and food and recovery in machinery exports. But sales will tend slightly upward. Profits will increase thanks to decreased interest payments. Promising pending plant export deals total about Y180 billion. New joint venture in Mideast with Arab International Bank gradually heading toward materialization.

Est.: August, 1889 Fiscal Year Ended: March, (Mid) September Head Office:  
12-5, Takaracho, Chuoku, Tokyo 104  
Tel.: 03-562-8111 Telex: 22333, 22334, 22205  
Head Shop: Kobe (Tel. 078-391-5406) Branches: Osaka, Nagoya  
President: Masaji Kiyokawa  
References: Tokyo, Dai-Ichi Kangyo, Taiyo Kobe, Hokkaido Takushoku, Tokai

Capital Chang	Allotment Ratio	Capital (Y mil.)
(Sept. '61	SE	1,200)
Apr. '73	PO20	6,600
Oct. '73	1:10G	7,260
Oct. '74	PO9.6	7,740
Apr. '75	1:10G	8,314
Oct. '76	1:20G	8,939
*1st '79	PO10	

Capital: (Y50 par value)	8,939
Total Assets: (Mar. '77)	888,290
Stockholders' Equity: (Mar. '77)	23,388
Debts: (Mar. '77)	347,425
Capital Surplus: (Mar. '77)	5,925
Employees (Age): (Mar. '77)	3,896 (34)
No. Stockholders: (Mar. '77)	5,746
Major Stockholders:	(1,000) %
Bank of Tokyo	17,879 (10.0)
Dai-ichi Kangyo Bank	17,879 (10.0)
Tokio M. & F. Ins.	16,469 ( 9.2)
Taiyo Kobe Bank	15,644 ( 8.8)
Dai-ichi M. Life Ins.	7,891 ( 4.4)
Sumitomo M. & F. Ins.	7,806 ( 4.4)
Foreign Ownership	* 160 ( 0.1)
No. Shares Out.: (Mar. '77)	178,794
Listed: Tokyo, Osaka, Nagoya	
Underwriters: Nomura, Yamalchl, Kangyo Kakumaru	
Sales Breakdown in %: (Mar. 1977) Textiles (27), metals (18), foodstuffs (17), machinery & construction (13), petroleum (13), others (12)	
Trade Ratio: 52%	

	Sales	Current Profit	Profit	Earnings	Dividend Per Share	Equity
Sept. 1974	1,157,258	1,961	1,253	Y8.6	Y3	Y154.9
Mar. 1975	1,163,391	2,173	1,232	8.0	3	136.6
Mar. 1976	2,308,101	1,448	625	3.7	5	134.5
Mar. 1977	2,335,713	4,303	829	4.6	5	130.8
Mar. 1978*	2,500,000	3,500	1,000	5.6	6	
<hr/>						
Sept. 1976	1,175,397	1,065	213	1.3	0	127.4
Sept. 1977*	1,200,000	1,500	500	2.8	3	

Remarks: Fuel, timber imports favorable, textiles contributing to profits despite poor textile environment. For Mar. '78 term, current profits to fall due to decreasing income from stock sales. Strengthening support for burdensome subsidiary Funabashi Seiko in cooperation with Bank of Tokyo. Reorganizing textile affiliates and cutting surplus personnel are current topics of attention.



## NICHIMEN

Est.: November 1892 Fiscal Year Ended: March, (Mid) September

Head Office: 2-15, Nakanoshima, Kitaku, Osaka 530

Tel.: 06-202-2271 Telex: 63247, 22620

Tokyo Head Office: 1-6, Takaracho, Chuoku 104 (Tel. 03-566-2111)

Chairman: Masanori Kambayashi President: Shunji Uyeda

References: Sanwa, Tokyo, Daiwa, Toyo Trust, Mitsubishi Trust

Capital Change	Allotment Ratio	Capital (Y mil)	Capital: (Y50 par value)	11,011
			Total Assests: (Mar. '77)	722,485
			Stockholders' Equity: (Mar. '77)	25,437
(May '49)	R	100	Debts: (Mar. '77)	303,161
Aug. '61	1:1	7,350	Capital Surplus: (Mar. '77)	6,461
Apr. '63	M	7,500	Employees (Age): (Mar. '77)	3,746 (35)
Apr. '73	PO32	9,100	No. Stockholders: (Mar. '77)	6,149
Oct. '73	1:10G	10,010	Major Stockholders:	(1,000) %
Apr. '76	1:10G	11,011	Sanwa Bank	18,032 (8.2)
			Bank of Tokyo	14,036 (6.4)
			Daiwa Bank	8,800 (4.0)
			Tokio M. & F. Ins.	7,793 (3.5)
			Nippon F. & M. Ins	7,585 (3.4)
			Sumitomo M. & F. Ins.	6,886 (3.1)
			Foreign Ownership	126 (0.1)
*1st '78	1:10G		No. Shares Out.: (Mar. '77)	220,220
	PO10		Listed: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto	
			Underwriters: (M) Daiwa (S) Nomura, Yamaichi, Nikko, New Japan	
			Sales Breakdown in %: (Mar. 1977) Textiles (18), metals & fuels (28), foodstuffs (14), machinery & construction (22), chemicals & synthetic resins (10), lumbars, papers, pulps & others (8)	
			Trade Ratio: 60%	

## Business Results: (Y mil.)

	Sales	Current Profit	Profit	Earnings	Divident Per Share	Equity
Sept. 1974	1,031,035	1,803	1,217	Y 6.1	Y3	Y122.5
Mar. 1975	1,037,644	1,763	1,179	5.9	3	125.3
Mar. 1976	1,688,074	3,676	2,061	10.3	6	117.7
Mar. 1977	1,810,546	8,205	815	3.7	6	115.5
Mar. 1978*	2,000,000	6,000	2,000	9.1	6	
Sept. 1976	883,316	3,341	801	3.6	3	118.5
Sept. 1977*	950,000	2,500	800	3.6	3	

Characteristics: Ranks 9th among major commercial houses. Member of Sanwa Bank group. Exeels in exports of heavy machinery and industrial plants to Communist bloc and Mideast.

Remarks: In Mar. '78 term, both exports and imports favorable and sales will rise but current profit will drop because of decreased capital gain on securities sold. Negotiations for exports very brisk. Bending efforts to help Miyoshi Paper and steel-making subsidiaries equipped with open hearth and electric furnaces, as well as Nikku Oils & Fats which canceled Y 2 billion worth of claims receivable.

**Lampiran II: MALAYSIA'S JAPAN-DESTINED EXPORT ITEMS AND PROBLEMS**

Merchandise items which Malaysia is interested in exporting to Japan	Problems
Lumber Logs	Irregular fluctuations due to business variations in Japan is a problem.
Conversions	Quality is not very high
Ties	Traditionally strong on Japan's domestic market, having the prospect for increase in the future.
Minerals	
Crude oil	
Tin	No problems in the short and medium term.
Bauxite	The volume of exports is falling (resources are drying up).
Copper ore	Increase in the future because of the start of full-scale shipment by the Japanese-affiliated Mamouth Mine.
Antimone ore Kaolin	Decreasing due to the Sarawak Pacific issue. Decreasing in the future because of inferior quality.
Food	
Chilled shrimp	Import tariff cuts demanded
Palm oil	Import tariff reduction demanded. Exports determined by the variation of oil & fat price (soybean price). The propensity to consume palm oil in Japan is also a problem.
Jellyfish	To increase in the future.
Pepper	Expansion and improvement of its grading & quality control facility in Kuching is necessary.
Canned pineapple	Japan's global IQ is the only problem.
Natural rubber	Substantial expansion of exports to Japan is impossible because of the price disparity with Thai-produced natural rubber.
Manufactured products of wood	
Furniture & knock- down parts of furniture	Promising item. Exports growing annually. Conversion and improvement of design from Europe—America-centered to Japan-oriented and cost reduction through mass production are required. Improvement of adhesive agents and paint & varnish also necessary.
Rattan furniture	Great potential if greater efforts are given to marketing activity for articles for hotel use and other items. (Japanese domestic demand for this merchandise item exists).

Plywood	Mostly oriented to the European market. Improvements in such aspects as standards and specifications to suit the Japanese market are required (the production equipment itself will have to be replaced).
Wooden parts for prefab houses	Establishment of mass production systems required. Big potential if Japan's technical guidance is available.
Fiber goods Cotton yarn Cotton woven fabric	Prospects for an increase.
Petroleum products	Depends on the recovery of business activity in Japan.
Pharmaceuticals	Growing annually. Chiefly penicillin. No problems in particular.
Non-electrical machinery	Sent home by Japanese-investment-recipient firms. Bearings, machine tools, etc.
Electrical machinery	Similar to the case of non-electrical machinery.
Fiber yarn, cotton woven fabric, apparel articles	Generally lacks competitive power to be exportable to Japan.
Marine vessels	No competitiveness for being exportable to Japan.
Articles of wood, plywood	Declining competitiveness for being exportable to Japan.
Furniture	Rattan furniture, wooden furniture and metal furniture still require much improvement in both design and quality. Metal furniture is not competitive.
Pewterware	Compared to silverware, demand in Japan is small.
Bagging articles	Handbags, travel bags, cases of all sorts, etc. of leather and plastics, require improvements in design to suit the Japanese market.
Footwear	No problems in particular.
Processed food Canned food (fruit) (canned papaya, slice cut)	inadequate PR
Curry products	Seasoning should suit the Japanese taste.
Dried bonito	Prospect for increase.



# PELARIAN DARI IRIAN MASALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

R.S. ROOSMAN

Garis lurus yang melintang dari utara ke selatan di peta Pulau Irian, dan memotongnya menjadi dua belah, ialah Irian Jaya dan Papua New Guinea, sebenarnya merupakan garis tak nyata. Pada hakikatnya garis perbatasan ini tertutup oleh hutan-rimba raya, dan hanya dapat dikenal orang oleh karena didirikan tugu-tugu beton pada jarak-jarak tertentu yang cukup jauh antaranya. Di kiri-kanan perbatasan ini terdapatlah kampung-kampung yang penduduknya sering berhubungan dan kunjung-mengunjung, karena ada pertalian famili, ataupun mempunyai ladang. Seorang penduduk di sebelah kawasan Indonesia misalnya secara kebetulan memiliki ladangnya di daerah yang termasuk wilayah Papua New Guinea. Pelintasan perbatasan tradisional ini (traditional border crossing) — yang terjadi harian — telah berlaku sejak lama. Untuk penduduk kampung-kampung perbatasan ini konsep kawasan (territory) hanya diketahui dari kunjungan patroli-patroli perbatasan Indonesia ataupun Australia (sekarang Papua New Guinea).

Sebelum Perang Dunia II sewaktu Pulau Irian di bawah Belanda dan Australia tak pernah pelintasan perbatasan sampai meletus menjadi masalah internasional, karena kedua pemerintahan telah mendapatkan kata sepakat bahwa "pelintasan tradisional ini sudah selayaknya terjadi dan kepada penduduk perbatasan seharusnya diberi keleluasaan untuk berbuat demikian". Pelintasan semacam ini tidak menimbulkan suatu ancaman terhadap pihak manapun juga, maka kehidupan tradisional di perbatasan — yang kebanyakan terdiri dari saling berkunjung serta menggarap ladangnya masing-masing — dapat berlangsung terus tanpa diusik oleh siapa-siapa.

Dengan adanya bangsa Australia masih terang teringat akan invasi Bala Tentara Dai Nippon di New Guinea pada Perang Dunia II — yang membawakan Perang Pasifik sampai ke ambang pintu Australia — maka penyerbuan tentara Indonesia untuk merebut Irian dari tangan Belanda pada tahun 1963, menghidupkan kembali ketakutan di kalangan bangsa Australia, bahwa perang mungkin dapat meluas ke kawasan mereka yang terdekat dari Indonesia, ialah Papua New Guinea. Maka bala bantuan tentara Australia waktu itu dikirimkan ke daerah perbatasan.

Setelah pengoperan Irian, kekuatiran akan kemungkinan adanya invasi dari pihak Indonesia ke arah Timur dengan berlarut-larut berdemam terus, sekalipun orang yang mendalangi penyatuan Irian ke dalam wilayah Indonesia — ialah almarhum Presiden Soekarno — lama telah wafat. Setelah Papua New Guinea menjadi merdeka pada tanggal 16 September 1975, pikiran yang selanjutnya timbul di negara itu akan "Greater Melanesia" (Kesatuan Melanesia Raya) — yang terdiri dari bangsa Melanesia di daerah Pasifik Selatan, ialah Pulau Irian, Kepulauan Solomon, New Hebrides, New Caledonia, dan Fiji — yang sifat fisiknya berkulit hitam dan berambut keriting, bolehlah ditafsirkan sebagai suatu manifestasi dari phobia "untuk bertahan menghadapi kemungkinan serangan dari pihak Indonesia ke arah Timur".

Tumbangnya rezim Soekarno pada tahun 1966 disusul oleh pergantian politik di Indonesia yang sangat berbeda haluannya. Usaha Pemerintah Orde Baru untuk mengejar dan menangkap bekas anasir-anasir kiri di dalam ABRI — yang mencoba meloloskan diri ke luar negeri, akhirnya hanya terbatas pada operasi-operasi sepanjang perbatasan Malaysia — terutama di Kalimantan Utara — dan Papua New Guinea.

Dengan Pemerintah Malaysia lekaslah didapati kata sepakat mengenai formulasi istilah "refugee" (pelarian) — yang dalam hal ini diartikan "pemberontak". Maka tak ada kesulitan untuk mengajak Malaysia melakukan operasi bersama menyapu bersih daerah perbatasan bersama dari kaum kiri. Namun dengan Papua New Guinea, ternyata halnya berlainan.

Seth Rumkorem — seorang putera daerah Biak di Irian Jaya, dan bekas perwira ABRI — setelah melakukan desersi bersama beberapa

rekannya mulai berperang mini gerilya secara sergap dan lari (hit and run battles) sepanjang perbatasan Papua New Guinea — Indonesia. Sesungguhnya mereka main kucing dan tikus dalam siasatnya, dan mempergunakan daerah perbatasan Papua New Guinea semata-mata untuk mencari suaka bilamana dikejar oleh ABRI. Pernah gerombolannya berjumlah kira-kira 400 orang. Mustahillah mereka dapat bertahan jikalau tak dibantu oleh penduduk setempat yang merasa kurang senang dengan keadaan dan perkembangan di Irian. Dalam logistik ketentaraan Rumkorem cs tidak setanding dengan 25-30 ribu orang ABRI yang ditempatkan pada pos-pos strategis. Konon kabarnya, kini hanya tinggal 11-14 orang pengikutnya yang masih taat kepadanya.

Gerakan Rumkorem ini biasanya disebut-sebut orang OPM (Organisasi Papua Merdeka). Di Australia serta Papua New Guinea singkatan tersebut telah dipopulerkan pula, dan mengandung maksud separatist akan mendirikan negara West Papua sendiri. Bantuan uang datang pula dari luar negeri, antara lain dari golongan-golongan atau organisasi-organisasi tertentu di Papua New Guinea, Australia, Negeri Belanda dan Jepang; demikian pula dari beberapa negara di Afrika, namun sebagian besar sokongan mereka ini hanya berupa publicity untuk OPM saja.

Adapun Irian Jaya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia pada tahun 1969 dengan diawasi dan disetujui oleh PBB, ini berarti bahwa cita-cita "Indonesia Raya dari Sabang sampai ke Merauke" yang telah begitu lama diidam-idamkan akhirnya terwujudlah! Maka dapat pula dipastikan, bahwa Indonesia takkan melepaskan sejenkal tanahnya dari Irian Jaya untuk mengadakan perubahan perbatasan (border corrections), sekalipun hal ini dilakukan dengan tekanan dari luar. Maka Pemerintah Indonesia takkan mengakui adanya OPM.

Sir Maori Kiki — sewaktu masih menjabat Menteri Luar Negeri Papua New Guinea — pernah menyarankan serta berikhtiar "hendak mempertemukan para pembesar Indonesia dengan pimpinan OPM di suatu lokasi di Papua New Guinea". Kedutaan Besar RI di Port Moresby telah menerima perintah dari Jakarta "untuk mengabaikannya saja dan jangan sekali-kali bertemu dengan kaum pemberontak".



Tertimpa oleh konfrontasi fisik yang berkobar antara Belanda dan Indonesia dalam perebutan Irian Barat, maka banyak penduduk meninggalkan kampung halamannya, berjalan kaki ke arah timur, dan memasuki "The Territory of Papua and New Guinea" yang waktu itu masih di bawah administrasi Australia. Bagi Pemerintah Australia tak ada pilihan lain kecuali memberikan "permissive residence" (memperbolehkan tinggal) kepada pelarian-pelarian ini, namun dengan syarat bahwa "tidak boleh melibatkan diri dalam segala kegiatan politik" (refrain themselves from all political activities).

Di antara kaum pelarian terdapatlah orang-orang yang telah menerima pendidikan dari Belanda sehabis Perang Dunia II sewaktu Belanda menduduki Irian Barat kembali. Jauh berbeda dengan sikapnya acuh tak acuh terhadap koloninya sebelum perang, tiba-tiba dan tampaknya terburu-buru mulailah Belanda dengan usaha pembangunan Irian Barat "yang katanya akan diberi kemerdekaan pada tahun 1970". Sekolah-sekolah dibuka di Hollandia (Jayapura sekarang) dan putera daerah diperbolehkan masuk. Putera-putera daerah secara kilat dilatih dan ditempatkan dalam kedudukan-kedudukan yang dahulunya belum pernah diberikan kepada mereka. Begitu pula Dewan Papua (Papua Raad) untuk "mewakili" rakyat Irian Barat, dan suatu Papua Brigade mereka hidupkan. Maka pada banyak di antara putera daerah ini — yang telah mendapat pengaruh pendidikan Belanda dan melihat prospek kemudian harinya menjadi suram dengan adanya pergantian kekuasaan ke tangan Indonesia — timbul rasa kurang puas dengan Keputusan Komisi Pengawas PBB (United Nations Supervisory Committee) yang "telah menyerahkan Irian Barat kepada pihak Indonesia". Maka banyak di antara mereka pula yang memutuskan untuk lari ke Papua New Guinea.

Pada umumnya dapatlah dilihat bahwa mayoritas kaum pelarian datang dari daerah-daerah yang merupakan pusat pemerintahan Belanda sehabis perang di mana proses pergantian sosial sedang berlaku dengan hebatnya (accelerated social transition). Dari nama-nama "fam" (suku atau clan) para pelarian — yang sekarang bermukim di Papua New Guinea dan diperkirakan ada 5.000 orang jumlahnya — dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang paling banyak berasal dari daerah Jayapura dan sekitarnya, antara lain Sentani, Tobati, Sobron Dosai, Genyem; banyak pula dari Biak yang mudah dikenal dari awalan "Rum" (= rumah) pada "fam"-nya, kemudian cukup banyak

dari daerah Merauke — yang berbatasan dengan Papua New Guinea, dan ada pula yang berasal dari Paniai, Sorong dan Serui.

Pada mulanya Pemerintah Australia mengambil keputusan untuk menempatkan mereka di Pulau Manus yang letaknya agak jauh terpencil di sebelah utara Papua New Guinea. Di antara mereka terdapat bekas pegawai negeri pemerintahan Belanda di Irian Barat, bekas serdadu, guru, pelajar, banyak buruh dan orang-orang desa pula. Dalam keadaan Papua New Guinea masih sangat kekurangan tenaga dalam segala bidang, golongan pelarian ini merupakan suatu sumber tenaga yang berharga (valuable asset), maka kemudian mereka dipindahkan dari Manus untuk disebarkan ke kota-kota di daratan Papua New Guinea, dan ditempatkan di mana mereka dapat dipakai. Di ibu kota Port Moresby saja terdapat paling sedikit 500 orang pelarian yang masing-masing telah mendapat kedudukan atau pekerjaan yang tertentu. Yang kurang beruntung ialah mereka yang tak mempunyai ketrampilan (skill) apa-apa, lalu mereka harus menerima pekerjaan buruh kasar apa saja; inipun kalau ada.

Di Papua New Guinea, di mana banyak tradisi masih kuat berakar, terutama hak milik atas tanah sedemikian pentingnya sehingga "kehormatan dalam masyarakat" (social prestige) ditentukan pula oleh ada tidaknya seseorang mempunyai tanah. Hak atas tanah desa — yang tak boleh diganggu gugat — dimiliki oleh masing-masing suku. Perang suku di Papua New Guinea bisa dicetuskan oleh pelanggaran hak milik tanah ini. Maka sesungguhnya pelarian — di mata orang Papua New Guinea — tak mempunyai "social prestige", justru karena dia tak memiliki tanah sejangkalpun. Sekalipun seorang pelarian berhasil kawin dengan seorang puteri Papua New Guinea, ini tak berarti, bahwa ia dengan otomatis akan mendapat bagian dari tanah pusaka desa isterinya. Tanah pusaka di desa tetap dimiliki oleh clan isterinya, dan anak-anaknya harus balik ke kampung isterinya bila mereka hendak mengerjakan tanahnya.

Walaupun rupa fisik orang Irian mirip dengan penduduk asli Papua New Guinea — mereka toh tetap dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Sebagaimana tampaknya nasib seorang refugee di seluruh dunia ini, mereka umumnya dicurigai penduduk setempat pula. Adanya mereka di rantau orang selalu dihubungkan pula dengan pendapat umum bahwa "kaum refugee mengambil sebagian



dari makanan yang sebenarnya disediakan untuk rakyat setempat''. Begitu pula adat-istiadat lokal, apalagi di Papua New Guinea di mana ada kira-kira 750 macam bahasa masih dipakai sehari-hari — dalam banyak hal berlainan dengan adat kebiasaan di Irian Jaya. Oleh sebab inilah maka rata-rata pelarian tak suka tinggal di daerah pedesaan, maka tampaklah di kota-kota seperti Port Moresby, Wewak, Lae dan Madang mereka bertempat tinggal mengelompok.

Hasrat untuk mengatasi kehidupan (survival) mereka di Papua New Guinea besar tampaknya. Kebanyakan telah mendapat tempat dan pekerjaan, sementara orang berhasil menempati kedudukan yang cukup vital dalam masyarakat Papua New Guinea. Sepanjang pengetahuan saya dua orang menjabat kepala rumah sakit, di Port Moresby dan di Rabaul, seorang menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Papua New Guinea di Port Moresby, seorang lagi mendapat kedudukan sebagai kepala bagian Penyiaran Radio (National Broadcasting Corporation) Pusat di Port Moresby, ada yang menjadi wartawan Post-Courier, harian nasional dalam bahasa Inggris yang terpenting, dan banyak menjadi pegawai pemerintah, guru, dan ada pula yang menceburkan diri dalam bisnis kecil-kecilan. Mayoritas yang tak mempunyai ijazah ataupun keahlian menjadi buruh biasa dalam segala bidang. Dalam pergaulan mereka dengan masyarakat setempat, tak dapatlah dihindarkan, bahwa suara mereka — terutama yang ada hubungannya dengan pengalaman-pengalaman mereka yang kurang beruntung di Irian Barat dahulu — mempengaruhi pendapat umum di Papua New Guinea, terutama terhadap politik dan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia yang sedang berlaku di Irian Jaya.

Di kalangan kaum refugee di Papua New Guinea tak terdapat pimpinan. Serupa halnya dengan OPM di dalam mana pengelompokan-pengelompokan politik (factions) saling bersaing dengan sengitnya, misalnya Jacob Prai memutuskan hubungan dan mengakui dirinya telah merebut pimpinan dari Rumkorem, dan Si Kawakan Nicholaas Youwe yang sejak Belanda mengangkat kaki dari Irian Barat menetap di Holland, masih tetap menamakan dirinya ''pimpinan Pemerintah West Papua dalam suaka (in exile)'' . Sama halnya dengan pelarian-pelarian yang beberapa ribu itu dan menikmati ''permissive residence'' di Papua New Guinea belum bersetuju tentang ''siapa pemimpin mereka'' itu. Karena pertama-tama mereka tak diperkenankan berpolitik, tambahan pula amat sukar rupanya mempersatukan



mereka, oleh karena latar belakang sosial serta kepentingan mereka masing-masing berbeda-bedalah!

Banyak refugee di Papua New Guinea mengutarakan hasrat keinginannya hendak menengok kampung asalnya, karena mereka sangat rindu terutama kepada kaum kerabatnya yang dahulu sekonyong-konyong mereka tinggalkan. Namun demikian kembalipun mereka tak berani. Maka dengan macam-macam media mereka memelihara hubungan dengan Irian Jaya, dan kadang-kadang mengherankan betapa banyaknya dan tepatnya mereka mengetahui tentang perkembangan, masalah-masalah serta kejadian-kejadian yang terakhir di Irian Jaya. Mereka masih suka mendambakan kesukuan serta identitas mereka ialah apa yang mereka namakan dirinya "West Papua", dan suka mengagungkan dirinya bahwa "mereka lebih tahu dan lebih rajin bekerjanya daripada orang Papua New Guinea" dan sebagainya. Sewaktu ada pertandingan sepak bola Papua New Guinea melawan Irian Jaya di Hubert Murray Stadium di Port Moresby pada tahun 1976, merekalah yang paling ramai berteriak-teriak dan bersorak-sorai mendukung kesebelasan Irian, yang akhirnya menang juga.

Sebaliknya idam-idaman kebanyakan di antara mereka ialah menjadi warga negara Papua New Guinea, karena sebagai "refugee" mereka tak mempunyai "status", lagi pula untuk menyelamatkan kemudian harinya (future security). Sejak Desember 1976, 157 pelarian telah memperoleh "Papua New Guinea citizenship", tetapi bagi banyak pula hal ini masih dipertimbangkan. Begitu menjadi warga negara Papua New Guinea, mereka suka menonjol-nonjolkannya, misalnya kepada saya sering mereka tak lupa mengatakan dalam bahasa Inggris: "I am a Papua New Guinea citizen, you know!" Saya tahu pula, bahwa di rumah dan di kalangan mereka sendiri, mereka tetap berbicara bahasa Indonesia dengan logat Irian (Ambon).

Papua New Guinea yang menjadi merdeka pada tanggal 16 September 1975 telah mewarisi persoalan-persoalan yang bergandengan dengan pelarian dari Irian Jaya dan OPM. Yang berjasa merumuskan politik luar negeri terhadap tetangganya, yakni Indonesia — yang sensitif terhadap dua isu ini — ialah Perdana Menteri Michael Somare yang dengan mengabaikan kecaman-kecaman dan teriakan-teriakan ancaman dari pihak simpatisan-simpatisan "West Papua" berhasil mengadakan "package deal" dengan Indonesia dengan politik "universalisme"-nya, yang "enables Papua New Guinea to enter into

friendly relations with all countries irrespective of their size and political system". Pada kunjungannya ke Jakarta pada bulan Januari 1977 diwartakan "he (= Michael Somare) did not want to play down the importance of the border issue", dan "it should not overshadow other aspects of bilateral relations of great significance". Pada bulan Oktober 1977, Patterson Lowa, bekas Menteri Kepolisian dan Acting Menlu dan Perdagangan, dalam menjawab anggota DPR Wewak, Tony Bais, berkata bahwa "the Papua New Guinea government had clearly stated that Irian Jaya is an integral part of Indonesia. It has accepted the realities of the situation, and was dealing in a responsible manner with problems which involved border crossers, dissident Irianese groups, and permissive residents. The United Nations and the international community had accepted Indonesia's sovereignty over Irian Jaya, despite the cultural and ethnic links between Papua New Guinea and Irian Jaya, and that it would not be in the best interest of Papua New Guinea to reopen the question of a separate state or independence in the United Nations".

Papua New Guinea posisinya menjadi kikuk (awkward). Karena pada satu pihak "Papua New Guinea menghormati kedaulatan mutlak atas Irian Jaya", akan tetapi di lain pihak "memperbolehkan gembong-gembong OPM ke luar masuk Papua New Guinea untuk bermusyawarah dengan pejabat-pejabatnya yang tertinggi". Usaha bekas Menlu Mairo Kiki pada tahun 1976 yang kemudian diulangi oleh Perdana Menteri Somare dalam bulan Nopember 1977 untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai, ialah mengajak pihak Indonesia dan OPM pada meja musyawarah gagallah — sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Pemerintah Indonesia tidak memperkenankan pejabatnya bertemu dengan kaum separatis di luar negeri. Pemerintah Papua New Guinea menawarkan jasa-jasanya sebagai perantara (mediator).

Sejak kemerdekaan Papua New Guinea pertemuan antara bupati-bupati masing-masing dari Jayapura dan Merauke dengan rekan-rekannya dari West Sepik dan Western Province, sebulan sekali dilangsungkan bergiliran di Jayapura atau Wewak, dan Merauke atau Daru, terutama untuk membicarakan soal-soal mengenai perbatasan bersama.

Selama tahun 1977 sikap Pemerintah Papua New Guinea terhadap OPM dan pelarian sangat berubah. Dalam bulan Januari 1977 setelah



terjadi kericuhan-kericuhan di Irian Jaya mengenai pemilu pada tanggal 2 Mei 1977, ada 346 orang putera daerah Irian berusaha masuk Propinsi West Sepik dan Western Province, tetapi dihentikan oleh patroli perbatasan Papua New Guinea. Perdana Menteri Somare mendesak agar supaya mereka balik ke kampungnya saja, karena "his government did not wish to get involved in Indonesia's internal affairs, but would seek assurances from the Indonesian government that the welfare of the refugees would be safeguarded". Dalam bulan Nopember 1977 10 orang pelintas perbatasan (border crossers) — rupanya pengikut Rumkorem — di bui (penjara) untuk lima bulan, karena masuk Papua New Guinea secara tidak legal. Menteri Luar Negeri Papua New Guinea, yang pada waktu itu Ebia Olewale, memberikan komentar bahwa "the men would be allowed permissive residency in Papua New Guinea, if there was proof that their lives would be endangered if they were sent back to Irian Jaya". Maka dengan mengatakan saja bahwa seorang pelarian termasuk pengikut Rumkorem, tak lagi bisa dipakai sebagai paspor memasuki Papua New Guinea. Hal yang serupa terjadi pada bulan Januari 1978 ketika Pengadilan Negeri Vanimo di Propinsi West Sepik menghukum 6 bulan penjara 5 pemuda Irian belasan tahun yang masuk Papua New Guinea secara tidak legal. Dalam bulan itu juga Pemerintah Papua New Guinea mengumumkan, bahwa akan diadakan prosedur-prosedur anti-teroris pada lima lapangan udara ialah di Port Moresby, Wewak, Kieta, Daru dan Vanimo karena "it was concerned about possible transportation of arms from Papua New Guinea to the Irian Jaya border", dan lagi "it is worried about terrorist threats made by the leader of the new provisional government of West Papua (Irian Jaya), Jacob Prai". Baru dalam tahun 1979 Jacob Prai bersama "ajudannya" Otto Ondowame terjebak oleh intel Papua New Guinea di suatu tempat di West Sepik, dan kemudian dimasukkan penjara di Port Moresby untuk menunggu ekstradisi (pengusiran) dari Papua New Guinea. Lalu diiklankan negara-negara mana yang bersedia memberikan suaka tetap kepada mereka ini. Anehnya, tak ada satu negarapun yang sanggup, kecuali Swedia. Bersama dengan mereka ada juga seorang putera bupati Jayapura, yang sudah lama meninggalkan Irian Jaya untuk kemudian menjadi satu-satunya pilot pesawat tempur di Papua New Guinea. Dia terlibat dalam perkara Prai Ondowame, dan dideportasikan ke Swedia juga. Baru-baru ini ada lagi kejadian seorang putera daerah Irian yang pernah menjabat Wakil Gubernur Irian Jaya, ialah E. Bonay, yang menghilang dari daerah Jayapura untuk kemudian muncul di Port Moresby dan minta suaka.



Pelintasan perbatasan selalu merupakan "one way route" dari Irian ke Papua New Guinea, dan belum pernah kebalikannya terjadi. Kategori-kategori baru yang lain pula — yang menamakan dirinya "refugee" — muncul di perbatasan Papua New Guinea: pemuda-pemuda putera daerah yang berpetualang "hendak berpesiar ke luar negeri" yang kemudian dikembalikan naik pesawat terbang, dan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan kriminal di Irian Jaya dan hendak meloloskan diri dari peradilan dan hukuman. Dari pusat-pusat penampungan pelarian di daerah perbatasan Papua New Guinea dikabarkan bahwa "di antara refugees tidak hanya terdapat putera daerah Irian saja, tetapi ada pula yang berasal dari lain-lain daerah Indonesia, yang mengakui dirinya OPM".

Ada pula timbul pemikiran di Papua New Guinea untuk melakukan patroli perbatasan bersama (jointly patrolling the common boundary) jadi Pacific Islands Regiment Papua New Guinea campur ABRI, yang amat boleh jadi merupakan satu cara yang paling efektif dalam menyelesaikan pelintasan perbatasan, tetapi pelaksanaan ide ini kemudian dibatalkan karena dikuatirkan akan menimbulkan sentimen-sentimen di kalangan umum di Papua New Guinea.

Perubahan sikap Pemerintah Papua New Guinea yang lebih keras terhadap OPM dan kawan-kawannya ini rupanya menimbulkan amarah di kalangan simpatisan-simpatisan OPM di Papua New Guinea. Dalam tahun 1978 Kantor Besar Pusat Pemerintah Papua New Guinea di Waigani, Port Moresby, dibakar habis bagian atasnya, ialah bagian Keuangan, dan didesas-desuskan bahwa "antek-antek OPM yang bertanggung jawab akan perbuatan itu". Hingga kini kantor yang hangus itu belum diapa-apakan. Di harian "Post Courier" pernah ditulis ancaman dari pihak OPM bahwa "jikalau Pemerintah Papua New Guinea tidak mau memberikan bantuan kepada OPM (di situ disebut "for the West Papue cause") bantuan dari negara-negara komunis akan diminta pula". Pemerintah Papua New Guinea tak gentar akan intimidasi gertak sambal itu, malahan tambah mengeras dalam sikap dan waspadanya. Akhirnya juga tidak terjadi apa-apa.

Yang paling akhir dalam tahun 1979 kejadian yang mengejutkan ialah serangan OPM terhadap pusat penampungan pelarian (refugee centre) di daerah perbatasan Papua New Guinea dengan membawa lari makanan dan barang-barang. Ada yang meninggal pula dalam serangan mendadak itu. Kamp-nya dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan penjagaan diperketat. Ada dugaan bahwa OPM sudah kehabisan bekal, ataupun OPM hendak membuktikan bahwa mereka

masih ada, dan aktif pula. Konon kabarnya, Rumkorem masih berkeliaran di daerah perbatasan.

Tahun-tahun 1978-1979 merupakan tahun yang mehunjukkan pula kelunakan dari pihak Pemerintah Indonesia hendak memberikan kesempatan kepada bekas pelarian dari Irian Jaya — yang telah menjadi warga negara Papua New Guinea untuk mengunjungi familinya di Irian Jaya. Dengan ditilik betul siapa-siapa pantas diberi visa, maka telah banyak eks refugee berkunjung ke kampung halamannya dahulu. Begitu pula atas kebijaksanaan Duta Besar di Port Moresby, Mayjen Drs. Busiri Suryowinoto telah diusahakan kesebelasan sepak bola University of Papua New Guinea — justru mahasiswa-mahasiswa yang paling suka mengritik soal "West Papua" — untuk pergi ke Jayapura selama dua minggu dan main dengan kesebelasan Irian Jaya dan Universitas Cenderawasih. Selama itu mereka menjadi tamu kehormatan Bapak Gubernur Sutran.

Saya rasa kebijaksanaan ini boleh dipuji, karena terbukti merupakan senjata halus untuk meyakinkan mereka, bahwa keadaan di Irian Jaya sekarang sudah sangat berlainan daripada tahun-tahun 1963-1969. Tampak pada para pengunjung, bahwa sikap dan pendapat mereka mengenai Irian Jaya berbalik 180 derajat. Malahan ada yang menjadi marah, karena "kabar-kabar yang disiarkan di Papua New Guinea mengenai Irian Jaya adalah bohong katanya". Di antara pemain sepak bola Papua New Guinea, sudah ada beberapa orang yang mengajukan permintaan mau kawin dengan puteri Indonesia. Sebetulnya, pemimpinnya, Paul Masta dari Fakultas Hukum Universitas Papua New Guinea pada bulan Nopember tahun yang lalu, telah jadi kawin dengan puteri daerah Irian Jaya.

Di daerah Irian Jaya selalu dikabar-kabarkan bahwa situasi ekonomi di Papua New Guinea jauh lebih bagus. Pegunungan yang dari jauh tampak kebiru-biruan di sebelah timur dan yang merupakan perbatasan alam antara Irian Jaya dan Papua New Guinea, dengan Teluk Yos Sudarso sayu berkilau-kilauan di bawah bukit-bukit sekitarnya, agaknya selalu mengelu-elukan putera daerah untuk pergi ke "tanah makmur di mana pekerjaan terdapat dengan berlimpah-limpah". Bagi para putera daerah — apalagi yang tergolong lapisan rendahan — keadaan ekonomi di daerahnya sendiri tak kelihatan cerah.

Walaupun Repelita sekarang sudah sampai pada tahap ketiganya, dan sekolah-sekolah umum dan berbagai sekolah ketrampilan (vocational schools) telah memberikan rakyat Irian Jaya lebih banyak kepandaian, bagi putera daerah sendiri menjadi semakin sulit untuk bersaing dengan para pendatang dalam hal mencari pekerjaan di pasaran tenaga kerja bebas di Irian Jaya.

Karena sayup-sayup terdengar kabar bahwa nun jauh di sebelah sana perbatasan, gaji pekerja adalah 3 sampai 5 kali lebih besar, maka banyak putera daerah berusaha melintasi perbatasan untuk beradu keuntungan nasib mereka, tanpa mengetahui bahwa lowongan pekerjaan di Papua New Guinea serba terbatas, lagi pula kebanyakan pekerjaan adalah disediakan untuk warga negara Papua New Guinea sendiri.





